

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026**

## **BAB I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 bahwa pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Perencanaan infrastruktur adalah proses yang dilakukan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang. Merujuk pada pengertian itu, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusun dokumen rencana strategis dalam suatu dokumen sistemik yang menjadi panduan pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama 5 (lima) tahun kedepan dalam sebuah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah

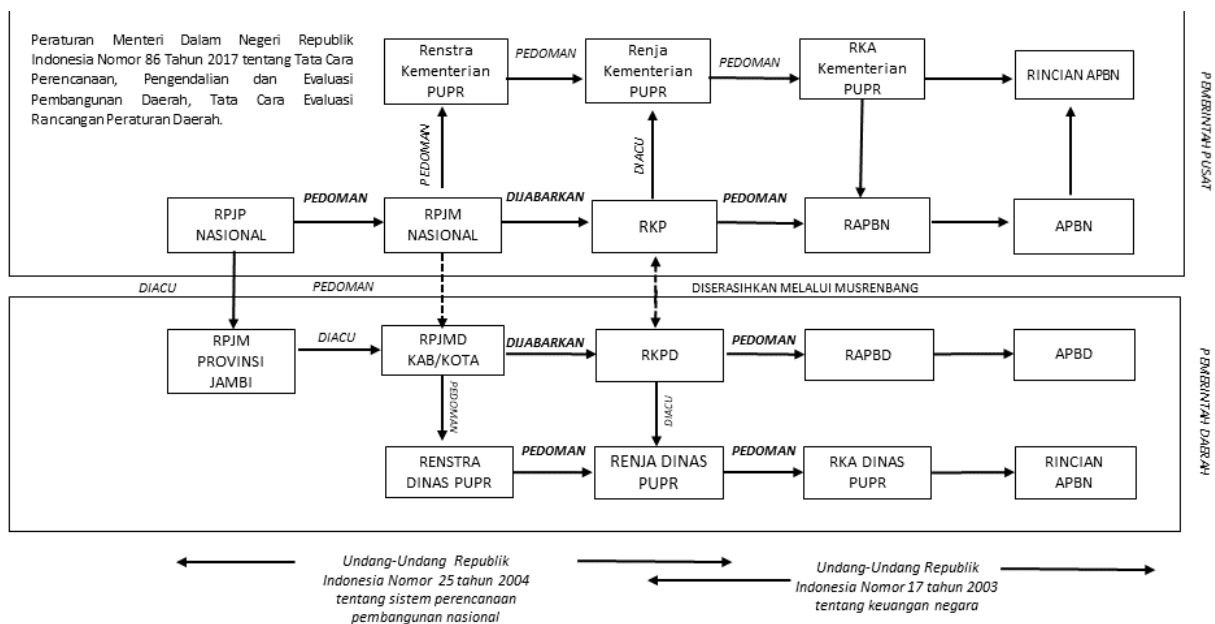
daerah bahwa rancangan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi disusun dengan menyempurnakan rancangan renstra.

Rencana strategis (Renstra) adalah proses orientasi dengan output target pencapaian dalam kurung waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkelanjutan dengan memperhatikan indikator yang terukur dalam input (pendanaan), output (target pencapaian) dan outcome (manfaat capaian) yang akan dihasilkan dari pelaksanaan renstra. Dalam hal pelayanan publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan regional. Kualitas pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Rencana strategis merupakan dasar dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang dimaksud dengan proses yang berorientasi output capaian pada kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Rancangan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dibahas dalam rapat internal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi serta forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil kesepakatan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dirumuskan dalam berita acara dan rancangan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi disempurnakan berdasarkan berita acara. Rancangan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi disajikan dengan memuat tentang isu-isu strategis, visi misi yg ingin dicapai, tujuan dan sasaran jangka menengah kedepan, strategi/kebijakan mulai dari kondisi awal sebelum renstra sampai dengan kondisi akhir pencapaian renstra dengan tetap memperhatikan indikator-indikator sasarnya secara terukur seperti Input, Output, dan Outcome dari program dan kegiatan yang dilaksanakan tiap bidang-bidang nya jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepannya serta menjadi satu kesatuan yang

berkesinambungan dan berkelanjutan dalam penentuan keberhasilan dalam kinerja menjalankan kegiatan.

Dokumen renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi adalah satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti dokumen RKPD, Renja Kementerian/Lembaga, Renja Provinsi/Kabupaten, Kota serta tindak lanjutnya sampai dengan proses penyusunan RAPBD. Gambaran tentang hubungan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan dokumen lainnya dalam kaitan system perencanaan pembangunan sampai dengan sistem penganggaran dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 ini disusun sebagai sebuah dokumen acuan yang didasari atas persepsi positif atas kemampuan dan sasaran yang lebih realistis dan tetap memperhatikan substansi kebijakan pembangunan infrastruktur secara makro di Provinsi Jambi. Selain berdasarkan amanah RPJMD Provinsi Jambi, berbagai isu strategis Provinsi Jambi menjadi warna dalam

pengembangan teknis pembangunan infrastruktur dengan upaya penerapan harmonisasi prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Ketentuan hukum terkait perencanaan dan penganggaran OPD dapat dilihat pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Tahun 2020-2024

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

33. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja dinas – dinas Provinsi Jambi
34. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Propinsi Jambi
35. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033
36. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025
37. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
38. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026
39. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
40. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 216/KEP.GUB/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana strategis (Renstra) memiliki maksud untuk mengidentifikasi kinerja pelayanan OPD dan permasalahan berdasarkan tupoksi serta merumuskan strategi arah kebijakan program untuk pembangunan yang optimal dan konsisten dengan pedoman sebagai acuan dari RPJMN - RPJP Provinsi Jambi - RPJMD Provinsi Jambi - Visi Misi Gubernur - Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang telah ditetapkan. Diperlukan suatu strategi yang efektif dan efisien agar dapat menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual,

analisis, realisasi, rasional dan komprehensif mengenai berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi adalah panduan resmi dalam acuan penentuan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan. Konsistensi antara rencana yang tertuang didalam renstra dan kebijakan dengan pelaksanaan akan dapat mempermudah dalam monitoring dan evaluasi dengan indikator-indikator target yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a) Menentukan arah kebijakan yang terintegrasi dengan visi dan misi gubenur serta sasaran program dan kegiatan pembangunan yang terukur
- b) Pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
- c) Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan acuan untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jambi yang diturunkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam jangka menengah atau 5 tahun periode pembangunan
- d) Sebagai acuan dalam koordinasi dan integrasi pembangunan antara OPD dengan pemerintah kabupaten/kota
- e) Sebagai dokumen perencanaan untuk menyusun rencana kerja (Renja) tahunan
- f) Sebagai tolak ukur dalam monitoring dan evaluasi kinerja pada OPD

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rancangan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dibahas dalam forum Dinas Pekerjaan Umum dan



Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Hasil kesepakatan forum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi akan dirumuskan dalam berita acara dan rancangan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi disempurnakan berdasarkan berita acara. Rancangan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi disajikan dengan memuat tentang :

## BAB I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Uraian ringkas terkait Renstra OPD, fungsi Renstra OPD, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan renja OPD.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat terkait peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

### 1.4. Sistematika Penulisan

Penjelasan terkait pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Menguraikan tugas dan fungsi kepala OPD dan struktur organisasi OPD dan tata laksana OPD (proses, prosedur dan mekanisme)

### 2.2. Sumber Daya OPD

Memberikan penjelasan ringkas terkait macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset.

### 2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Memuat tingkat capaian atau evaluasi kinerja OPD berdasarkan target sasaran Renstra OPD periode sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan OPD atau indikator MDGS atau indicator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Menunjukkan hasil tinjauan dan analisis terhadap Renstra K/L, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD pada 5 tahun mendatang. Pada bagian ini akan dikemukakan terkait pelayanan, perkiraan cakupan kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## BAB III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah

### 3.1. Identifikasi Permasalahan

Memaparkan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur

Menjelaskan faktor-faktor penghambat dan mendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

### 3.3. Telaah Renstra K/L

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

### 3.4. Telaah RTRW dan KLHS

Menjelaskan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sub bab sebelumnya yang selanjutnya dikemukakan rumusan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Pada bagian ini akan diperoleh informasi terkait isu strategis yang paling dominan.

#### BAB IV. Tujuan dan sasaran

Menjelaskan rumusan terkait tujuan, sasaran dan indikator sasaran jangka menengah OPD yang sesuai dan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB V. Strategi dan arah kebijakan

Memberikan penjelasan terkait rumusan strategi dan kebijakan OPD yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam 5 tahun mendatang.

#### BAB VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan

Menjelaskan program yang sesuai dengan RPJMD beserta kegiatan-kegiatan, indikator kinerja, target capaian, indikasi lokasi dan sasaran (tabel 1 sumber dari tabel C-27 Permendagri no.86 tahun 2017).

#### BAB VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Menunjukkan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB VIII. Penutup

Menjelaskan kondisi Provinsi Jambi, serta ditandatangani oleh Kepala OPD.

## **BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi**

#### **a). Dasar Hukum Pembentukan OPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Propinsi Jambi. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi masih bernama Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) Provinsi Jambi merupakan Hasil pengintegrasian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, yang organisasinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja dinas – dinas Provinsi Jambi.

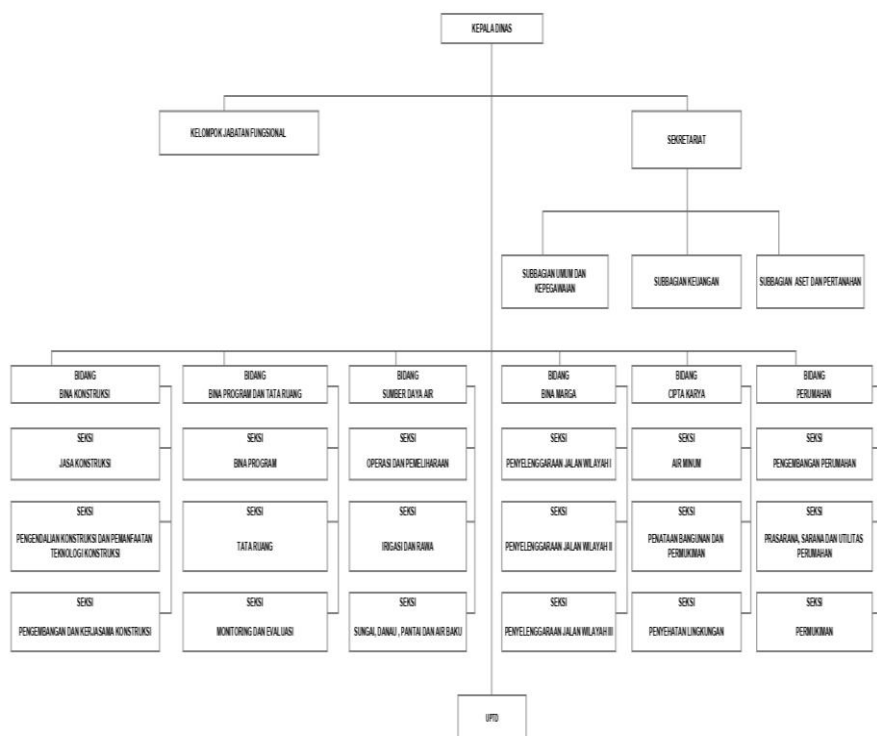
Pembentukan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Perda No.2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan salah satu di antara beberapa Dinas yang ada di Provinsi Jambi dan merupakan bagian Integral dari Pemerintah Provinsi Jambi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana melalui:

- 1) Bidang Sumber Daya Air
- 2) Bidang Bina Marga
- 3) Bidang Cipta Karya
- 4) Bidang Perumahan
- 5) UPTD Workshop dan Peralatan

- 6) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
  - 7) Bidang Bina Konstruksi
  - 8) Bidang Bina Program dan Tata Ruang
  - 9) Bagian Sekretariat
- b). Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dijelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki Struktur Organisasi yang terdiri atas Kepala Dinas, Bagian Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan, Bidang Bina Program dan Tata Ruang, Bidang Konstruksi, UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, UPTD Workshop dan Peralatan, Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2. Struktur Organisasi  
**Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi**



**Sumber : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021**

c). Uraian Tugas dan Fungsi OPD (TUPOKSI)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Uraian Tupoksi Dinas Daerah Provinsi Jambi. Dimana pada Bab II Bagian Pertama Pasal 2, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut :

Tugas : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan  
Pokok daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas  
pembantuan dibidang Dina Pekerjaan Umum  
dan Perumahan Rakyat.

Dengan Fungsinya:

- 1) Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Jambi sesuai dengan bidang tugasnya.

Dimana penyelenggaraan Tupoksinya tersebut OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai media pelaksana (Tim Leader) dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

- Tugas :
- a) Melaksanakan ketentuan sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum
  - b) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sekretariat, bidang , UPTD dan kelompok jabatan fungsional

## 2) Sekretariat

Tugas : Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan dibidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a) pengkoordinasi kegiatan dinas ;
- b) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
- c) penataan organisasi dan tata laksana;
- d) pengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa;
- f) penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- g) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi;
- h) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- i) penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- j) penyelesaian tanah kosong lintas daerah

kabupaten/kota wilayah provinsi;

- k) pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 3) Bidang Bina Program dan Tata Ruang

Tugas	: Membantu Bidang Bina Program dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan penyusunan program dan perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none"><li>a. pengkoordinasi dan penyusunan rencana program serta anggaran dinas;</li><li>b. penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi;</li><li>c. penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/ kota;</li><li>d. pembinaan kepada kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan penataan ruang;</li><li>e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang;</li><li>f. penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;</li><li>g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;</li><li>h. pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang provinsi;</li><li>i. pengkoordinasi penyelenggaraan penataan ruang provinsi;</li></ul>



- j. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4). Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Tugas : Membantu Dinas dalam rangka membantu bidang melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang sumber daya air serta pelayanan teknis dan administrative guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :
- a) pelayanan kebijakan daerah mengenai pengelolaan sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
  - b) penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
  - c) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/ kota;
  - d) penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
  - e) pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
  - f) pengembangan dan penelitian tentang pengelolaan sda dan bangunan pengaman

- pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota
- g) pelayanan kebijakan daerah tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/ kota;
  - h) penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sda dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skun der untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/ kota;
  - i) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sda dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/ kota;
  - j) pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
  - k) pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan, konservasi dan pemeliharaan serta evaluasi dibidang sumber daya air;
  - l) pengembangan sistem pembiayaan dibidang sumber daya air;
  - m) pelaksanaan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelola dibidang sumber daya air;
  - n) pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air baik pada irigasi,rawa,sungai danau pantai dan air baku; dan

- o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 5). Bidang Bina Marga

Tugas	Membantu Dinas Dalam Rangka Melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang bina marga serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"><li>a) pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;</li><li>b) penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;</li><li>c) penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;</li><li>d) pengembangan dan penelitian mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;</li><li>e) perumusan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;</li><li>f) perumusan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;</li><li>g) pengkoordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;</li><li>h) perumusan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;</li><li>i) pengendalian pelaksanaan pembangunan dan</li></ul>

- preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- j) pengendalian pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
  - k) pengendalian pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian - bagian jalan;
  - l) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan, pengujian;
  - m) pengendalian penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang bina marga dalam wilayah provinsi jambi ;
  - n) pengendalian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - o) pelaksanaan dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang bina marga; dan
  - p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 6). Bidang Cipta Karya

Tugas : Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang cipta karya serta pelayanan teknis dan adiministratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a) penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi;
- b) penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
- c) penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/ kota;
- d) fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung lingkup sektoral;
- e) pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten / kota yang menjadi kewenangan provinsi;
- f) pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;
- g) pengendalian, pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
- h) penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
- i) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- j) penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan penelitian untuk mendukung sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- k) pembinaan dan penyusunan program tata bangunan dan lingkungan;

- l) pengelolaan dan pengendalian sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP); dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 7). Bidang Perumahan

- Tugas : Membantu Dinas dalam rangka Melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang perumahan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :
- a) Merumuskan program dan kegiatan bidang Perumahan Rakyat.
  - b) pembinaan SDM bidang perumahan lintas kab/ kota dan atau yang menjadi kewenangan provinsi;
  - c) pengembangan pusat informasi bidang perumahan tingkat provinsi;
  - d) pengendalian penyiapan NSPM bidang perumahan yang menjadi kewenangan provinsi;
  - e) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
  - f) pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi;
  - g) penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha;
  - h) penyelenggaraan PSU permukiman;
  - i) pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;

- j) perumusan kebijakan dan strategi provinsi dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian teknis perumahan formal;
- k) pengkoordinasian untuk fasilitasi dan perumusan kebijakan Provinsi dalam pembiayaan perumahan MBR;
- l) perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang pendataan, pembangunan, kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku pem bangunan perumahan swadaya ; dan
- m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

8). UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi

Tugas : Melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dalam bidang pelayanan jasa Pengujian mutu air, mekanisme tanah, geologi dan bahan Bangunan.

- Fungsi :
- a) Penyusunan Program Kerja kegiatan kelaboratoriuman dengan mengacu pada kebijakan mutu laboratorium.
  - b) Penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium
  - c) Pelayanan jasa pengujian
  - d) Pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengujian
  - e) Pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen laboratorium
  - f) Pembinaan terhadap pengelolaan peralatan laboratorium.

- g) Pembinaan terhadap pengelolaan SDM laboratorium
- h) Pelaksanaan kebijaksanaan yang berkaitan dengan jaminan mutu dan peningkatan profesionalisme laboratorium
- i) Pengoordinasian pelaksanaan operasional pengujian.

#### 9). Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian

- Tugas : Membantu Dinas dalam rangka Melaksanakan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan dibidang bina konstruksi dan pengendalian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :
- a) pelayanan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
  - b) pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi;
  - c) penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
  - d) pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
  - e) pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi;
  - f) peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi;
  - g) pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
  - h) pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan



dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha;

- i) pembinaan teknis, pengendalian mutu pekerjaan dan penelitian dibidang pekerjaan umum dalam wilayah provinsi;
- j) penyelenggaraan bimbingan teknis, dan peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia lingkup dinas;
- k) penerapan norma standar prosedur dan metode konstruksi lingkup dinas;
- l) pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup dinas; dan
- m) pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 10). UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan

Tugas : Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang diberikan Dinas PUPR dalam bidang pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengoperasian, pelayanan jasa, pengelolaan perbekalan dan logistik alat-alat berat dan alat-alat pendukung serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, program dan urusan rumah tangga balai.

Fungsi :

- a) Penyusunan program kerja balai
- b) Pemberian pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan, program dan urusan rumah tangga balai
- c) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengoperasian alat-alat berat dan alat-alat pendukung.

- d) Pelaksanaan pemberian pelayanan jasa alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
- e) Pelaksanaan pengelolaan logistik meliputi penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian untuk penunjang operasional alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
- f) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan provinsi terkait dengan penggunaan alat-alat berat dan alat-alat pendukung dengan cara swakelola.
- g) Pelaksanaan pengelolaan perbekalan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sumber Daya OPD

### a). Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak 259 orang PNS, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pejabat struktural : 36 orang
- 2) Pejabat Fungsional Teknis : 12 orang
- 3) Staf Pelaksana : 211 orang

Untuk jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

NO	UNIT KERJA	TEKNIK								JML	NON TEKNIK									JML	TOTAL
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	S.3		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SEKRETARIAT	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	22	1	0	0	6	0	0	29	31	
2	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	0	0	5	0	0	0	0	5	0	4	4	1	0	0	1	0	0	10	15	
3	PERUMAHAN	0	0	7	0	0	0	0	7	0	1	2	2	0	0	4	0	0	9	16	
4	CIPTA KARYA	0	2	13	0	0	0	0	15	0	5	4	0	0	0	8	0	0	17	32	
5	SUMBER DAYA AIR	0	1	8	0	0	0	1	10	0	1	14	2	0	0	7	1	1	26	36	
6	BINA MARGA	1	3	13	0	0	0	0	17	0	1	22	5	0	0	26	1	0	55	72	
7	BINA KONTRUKSI DAN PENGENDALIAN	0	1	5	0	0	0	0	6	0	2	6	0	0	0	2	1	0	11	17	
8	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN	0	0	5	0	0	0	0	5	0	2	7	0	0	0	7	0	0	16	21	
9	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	0	1	4	0	0	0	0	5	0	0	5	2	0	0	7	0	0	14	19	
JUMLAH		1	9	61	0	0	0	1	72	0	16	86	13	0	0	68	3	1	187	259	

#### b). Aset Daerah

Dari neraca laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2020, terdapat aset daerah yang menjadi kewenangan dan pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, terdiri dari :

##### 1). Aset tetap

Tabel 2. Aset Tetap

No	Uraian	Kondisi		Nilai/input
		Baik	Tidak Baik	
1	Tanah			Rp. 83.416.287.161,33
2	Peralatan dan Mesin			Rp. 124.565.591.543,17
3	Gedung dan Bangunan			Rp. 61.913.493.600,01
4	Jalan, jaringan dan instalasi			Rp. 7.131.590.815.496,20
	Jumlah			Rp. 7.401.486.187.800,71

Sumber : Buku Induk Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

2). Aset lainnya

Tabel 3. Aset Lainnya

No	Uraian	Kondisi		Nilai/input
		Baik	Tidak Baik	
1	Aset tetap lainnya			Rp. 276.563.632.279,24
2	Konstruksi dalam pengerjaan			Rp. 22.167.175.449,00
	Jumlah			Rp. 298.730.807.728,24

Sumber : Buku Induk Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

3). Barang Inventaris

Tabel 4. Daftar Barang Inventaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

No	Uraian	Jumlah
1	Tanah	Rp. 83.416.287.161,33
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 124.565.591.543,17
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 61.913.493.600,01
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp. 7.131.590.815.496,20
5	Aset tetap lainnya	Rp. 276.563.632.279,24
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 22.167.175.449,00

Jumlah	Rp. 7.700.216.995.528,95
--------	--------------------------

Sumber : Buku Induk Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

Tabel 5. Data Identitas Kendaraan Dinas Per Bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BIDANG SEKRETARIAT				
Jenis Kendaraan	Jumlah	Keadaan Barang		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Roda 4	10	10	0	0
Roda 2	16	16	0	0
BIDANG CIPTA KARYA				
Jenis Kendaraan	Jumlah	Keadaan Barang		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Roda 4	2	2	0	0
Roda 2	3	3	0	0
BIDANG SUMBER DAYA AIR				
Jenis Kendaraan	Jumlah	Keadaan Barang		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Roda 4	3	3	0	0
Roda 2	18	18	0	0
BIDANG BINA MARGA				
Jenis Kendaraan	Jumlah	Keadaan Barang		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Roda 4	5	5	0	0
Roda 2	6	5	1	0

BIDANG PERUMAHAN				
Jenis Kendaraan	Jumlah	Keadaan Barang		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Roda 4	5	4	1	0
Roda 2	6	6	0	0
BIDANG TATA RUANG				
Jenis Kendaraan	Jumlah	Keadaan Barang		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Roda 4	2	2	0	0
Roda 2	1	1	0	0
BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PENGENDALIAN				
Jenis Kendaraan	Jumlah	Keadaan Barang		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Roda 4	2	2	0	0
Roda 2	3	3	0	0
UPTD WORKSHOP DAN PERBEKALAN				
Jenis Kendaraan	Jumlah	Keadaan Barang		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Roda 4	8	5	0	3
Roda 3	51	0	0	51
Roda 2	5	3	0	2
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI				
Jenis Kendaraan	Jumlah	keadaan baraang		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Roda 4	4	3	1	0

Roda 2	3	3	0	0
Total	153	94	3	56

Sumber : Buku Induk Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

#### 4) Peralatan

Tabel 6. Jumlah Barang AC dan Komputer

No	Tahun	Nama Barang	
		AC	KOMPUTER
1	2003	-	1
2	2004	-	-
3	2005	-	-
4	2006	-	5
5	2007	4	3
6	2008	3	23
7	2009	-	20
8	2010	7	11
9	2011	2	23
10	2012	16	25
11	2013	-	35
12	2014	36	45
13	2015	25	14
14	2016	25	1
15	2017	25	9
16	2018	5	-
17	2019	7	13
18	2020	1	-
Jumlah		156	228

Sumber : Buku Induk Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

Tabel 7. Kondisi Barang AC dan Komputer

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Komputer	156	63	77	16
2	AC	228	23	119	86
Jumlah		384			

Sumber : Buku Induk Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

Tabel 8. Kondisi Eksisting Peralatan UPTD Workshop dan Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Periode	Jumlah
A.	Alat berat	Bulan Juni 2021	35 unit
B.	Peralatan pendukung :		
	B.1 Kendaraan bermotor	Bulan Juni 2021	28 unit
	B.1 Peralatan	Bulan Juni 2021	39 unit

Sumber : Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021

Tabel 9. Daftar Peralatan UPTD Workshop dan Peralatan

NO	NAMA ALAT	MERK/TYPE/KAPASITAS	TAHUN PENGADAAN	KONDISI ALAT		
1	2	3	4	5		
				B	RR	RB
A.	ALAT - ALAT BERAT :					
1	TIRE ROLLER	TS120 / SAKAI	1983		√	
2	TANDEM ROLLER	SAKAI / 4 TON	1983			√
3	CRANE	KATO / 20 TON	1986		√	
4	EXCAVATOR ON TRACK	KOMATSU PC.200	2005			√



NO	NAMA ALAT	MERK/TYPE/KAPASITAS	TAHUN PENGADAAN	KONDISI ALAT		
1	2	3	4	5		
				B	RR	RB
5	WHEEL LOADER BACK HOE	CASE 580 SERI 2	2005			√
6	MOTOR GRADER	mitsubishi	2005 ( ABT )	√		
7	VIBRO ROLLER	XCMG / 8 TON	2005 ( ABT )			√
8	EXCAVATOR WHEEL	HYUNDAI ROBEX 200	2006	√		
9	VIBRO ROLLER	HAMM / 4 TON	2006			√
10	BULLDOZER	SHANTUI	2007			√
11	MOTOR GRADER	XCMG / 8 TON	2008			√
12	EXCAVATOR ON TRACK	KOBELCO SK 200	2008	√		
13	VIBRO ROLLER	SAKAI SW.502-1 4 TON	2009	√		
14	BULLDOZER D68	KOMATSU	2009	√		
15	WHEEL LOADER BACK HOE	CASE SERI 3	2010	√		
16	VIBRO ROLLER	SAKAI SV 512 D-E 10 TON	2011	√		
28	TANDEM ROLER 7 TON	SAKAI SW.652-1K 7 TON	2013	√		
29	BULLDOZER	KOMATSU D68 E SS-12 18 TON	2013 ( ABT )	√		
30	BACKHOE LOADER	CATERPILLAR 416F 8 TON	2013 ( ABT )	√		
31	MOTOR GRADER	CATERPILLAR 120K 12 TON	2013 ( ABT )	√		
32	VIBRO ROLLER	CATERPILLAR CP-5-33.E & CS-533E 10 TON	2013 ( ABT )	√		
33	FINISHER MAINTENANCE (ASPHALT FINISHER )	HUATONG	2009		√	
34	MOTOR GRADER	KOMATSU GD 511 A - 1	2015	√		
35	EXCAVATOR ON TRACK (LONG ARM)	KOMATSU PC 200	2017	√		

NO	NAMA ALAT	MERK/TYPE/KAPASITAS	TAHUN PENGADAAN	KONDISI ALAT		
1	2	3	4	5		
				B	RR	RB
	<b>B 1. KENDARAAN BERMOTOR</b>					
1	DUMP TRUCK (BH 8023 HZ)	MITSUBISHI PS 120	2005			√
2	DUMP TRUCK (BH 8024 HZ)	MITSUBISHI PS 120	2005			√
3	DUMP TRUCK (BH 8025 HZ)	MITSUBISHI PS 120	2005			√
4	DUMP TRUCK (BH 8026 HZ)	MITSUBISHI PS 120	2005	√		
5	MOBILE FARFES GRASS MAINTANANCE	ISUZU PS 135	2005 ( ABT )		√	
6	TRONTON YAP CRANE (BH 8063 HZ)	HINO	2007	√		
7	DUMP TRUCK (BH 8115 HZ)	MITSUBISHI CANTER	2010	√		
8	DUMP TRUCK (BH 8116 HZ)	MITSUBISHI CANTER	2010 ( ABT )	√		
9	TRONTON (BH 8148 HZ) + JACK WINCH 20 TON	HINO	2011 ( ABT )	√		
10	TRONTON (BH 8149 HZ) + JACK WINCH 20 TON	HINO	2011 ( ABT )	√		
11	DUMP TRUCK (BH 8144 HZ)	HINO DUTRO	2011 ( ABT )	√		
12	DUMP TRUCK (BH 8145 HZ)	HINO DUTRO	2011 ( ABT )	√		
13	DUMP TRUCK (BH 8146 HZ)	HINO DUTRO	2011 ( ABT )	√		
14	DUMP TRUCK (BH 8147 HZ)	HINO DUTRO	2011 ( ABT )	√		
15	DUMP TRUCK (BH 8161 HZ)	TOYOTA	2012 ( ABT )	√		
16	DUMP TRUCK (BH 8166 HZ)	IZUZU ELF	2013 (HIBAH DISHUB)	√		
17	DUMP TRUCK (BH 8162 HZ)	TOYOTA	2012 ( ABT )	√		
18	DUMP TRUCK (BH 8163 HZ)	TOYOTA	2012 ( ABT )	√		
19	DUMP TRUCK (BH 8164 HZ)	TOYOTA	2012 ( ABT )	√		
20	DUMP TRUCK (BH 8165 HZ)	TOYOTA	2012 ( ABT )	√		

NO	NAMA ALAT	MERK/TYPE/KAPASITAS	TAHUN PENGADAAN	KONDISI ALAT		
1	2	3	4	5		
				B	RR	RB
21	WATER TANK (Mobil Tangki Air) Kap 5000 Liter	Toyota Dyna	2014	√		
22	TRONTON (BH 8149 HZ) + JACK WINCH 20 TON	HINO	2015	√		
23	DUMP TRUCK (BH 8210 HZ)	Toyota Dyna	2015	√		
24	DUMP TRUCK (BH 8214 HZ)	Toyota Dyna	2016	√		
25	DUMP TRUCK (BH 8215 HZ)	Toyota Dyna	2016	√		
26	DUMP TRUCK (BH 8022 HZ)	HINO	2019	√		
27	DUMP TRUCK (BH 8023 HZ)	HINO	2019	√		
28	TOYOTA HILUX SINGLE CABIN	TOYOTA	2011	√		
29	ISUZU PANTHER PICK-UP	ISUZU	2012	√		
30	MITSUBISHI STRADA SINGLE CABIN HITAM	MITSUBISHI	2013	√		
31	MITSUBISHI STRADA SINGLE CABIN SILVER	MITSUBISHI	2015	√		
<b>B 2. PERALATAN</b>						
1	ASPHALT RECYCLING	SUPER ASTEN COOK 043	2004		√	
2	ASPHALT RECYCLING	SUPER ASTEN COOK 043	2004			√
3	ASPHALT RECYCLING	SUPER ASTEN COOK 043	2004			√
4	ASPHALT RECYCLING	SUPER ASTEN COOK 043	2004			√
5	AIR COMPRESOR	INGERSOLL RAMD XP 375	2004 ( ABT )			√
6	AIR COMPRESOR	INGERSOLL RAMD XP 375	2004 ( ABT )			√
7	AIR COMPRESOR	INGERSOLL RAMD XP 375	2004 ( ABT )		√	
8	HAND STAMPER	MIKASA	2006			√
9	HAND STAMPER	MIKASA	2006			√
10	HAND STAMPER	MIKASA	2006		√	
11	ASPHALT CUTTER	MIKASA MCD 04 A	2006			√
12	ROAD MARKER	SRT – 8	2006			√

NO	NAMA ALAT	MERK/TYPE/KAPASITAS	TAHUN PENGADAAN	KONDISI ALAT		
1	2	3	4	5		
				B	RR	RB
13	FINISHERMAINTANANCE ( ASPHALT FINESHER )	HUATONG	2009		√	
14	ASPHALT SPRAYER	1400 LITER	2012 ( ABT )	√		
15	AMP MINI MOBILE	AMP - SBU -150 SA	2012 ( ABT )	√		
16	GENSET	60 - 480 KVA	2012 ( ABT )	√		
17	PORTA CAMP	CONTAINER	2012	√		
18	PORTA CAMP	CONTAINER	2012	√		
19	PORTA CAMP	CONTAINER	2012			√
20	PORTA CAMP	CONTAINER	2012			√
21	TYRE CHANGER	EVERET EE - 4408	2012	√		
22	ASPHALT CUTTER	STALLION	2012			√
23	ASPHALT CUTTER	STALLION	2012			√
24	COMPRESSOR	KRISBOW	2012	√		
25	COMPRESSOR	DONG HAI	2012	√		
26	DONGKRAK BUAYA	KRISBOW	2012	√		
27	TOOLSET DUMP TRUCK	KRISBOW SOUKER SET	2012	√		
28	TOOLSET DUMP TRUCK	KRISBOW SOUKER SET	2012	√		
29	TOOLSET DUMP TRUCK	KRISBOW SOUKER SET	2012	√		
30	TOOLSET DUMP TRUCK	KRISBOW SOUKER SET	2012	√		
31	TOOLSET DUMP TRUCK	KRISBOW SOUKER SET	2012	√		
32	TOOLSET DUMP TRUCK	KRISBOW SOUKER SET	2012	√		
33	TOOLSET ALAT BERAT	KRISBOW	2012	√		
34	TOOLSET ALAT BERAT	KRISBOW	2012	√		
35	TOOLSET ALAT BERAT	KRISBOW	2012	√		
36	PORTABLE	KRISBOW	2012	√		
37	PORTABLE	KRISBOW	2012	√		
38	MESIN LAS	DONG FENG 120 kg	2012	√		
39	PORTABLE	KRISBOW	2012	√		

Sumber : Buku Induk Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat Tahun 2020

Tabel 10. Daftar Peralatan UPTD Bahan Konstruksi

No	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
	TAHUN ANGGARAN 2021			
1	Belanja Modal Lab. Aspal Mata Cor Aspal dia 4"	6	Pcs	2 + 2 (Air & Aspal)
	Vakuum Pump 1 Hp	2	Pcs	
2	Belanja Modal Lab. Beton Dial Poket Piknometer	1	Pcs	
	Laboratory Conceret Mixer Pan 100 Liter	1	Unit	
3	Belanja Modal Lab. Air Water Bath	4	Unit	
4	Belanja Mudal Lab. Tanah Dynamic Cone Penetrometer	2	Unit	
	Hand Bor	2	Unit	
	Hydrolic Duch Cone Penetrometer	1	Unit	
	Mold CBR Lab dia 6"	18	Unit	
	Sand Cone	4	Unit	
	Speedy Moister Tester	2	Unit	
5	Belanaja Modal Lab. Air Kulkas [Pendingin]	2	Pcs	1+1 (Air+Ka.Lab)
PERALATAN KANTOR				
6	Belanja Modal Peralatan Kantor Gording	16	Unit	
	Lemari Arsif	1	Unit	
7	Belanja Modal Peralatan Kanto (Komputer) Lap Top ( i7 Ram 16 Gb Hdd 512 Gb )	2	Unit	
	PC (i5 Ram 8 Gb Hdd 512 Gb )	3	Unit	
8	Belanja Modal Peralatan Kantor (Home) AC 2 PK	6	Unit	
	Kursi Kerja	12	Pcs	
	Meja Kerja	12	Pcs	
	Kursi Rapat	25	Pcs	
	TAHUN ANGGARAN 2020			
1	Marshall Tes 6" ( Mates)	1	Set	Lab. Aspal
	- Jangka Sorong 12 "	2	Unit	
	- Cetakan Daktilitas Aspal	2	Unit	
	Alat Uji Tekan Beton ( Mates ka. 3000 KN )	1	Set	Lab. Beton
2	- Hammert Tes (Mates)	2	Unit	

	- Cetakan Selinder Btn Dia 10 x 20 cm	20	Unit	
	- Cetakan Selinder Btn Dia 15 x 30 cm	20	Unit	
	- Cetakan Balok Beton 15 x 15 x 60 cm	20	Unit	
3	Oven ka. 256 ( Memmert )	2	Unit	Lab. TN & BTN
<b>TAHUN ANGGARAN 2019</b>				
1	Lab. Beton			Lab. Beton
	- Slump Tes	5	Set	
	- Jack Hammer	1	Set	
	- Quatring	2	Set	
	- Mata Kor Aspal	3	Set	
	- Vikat Aparatus	1	Set	
	- Vakum Berat Jenis	1	Set	
2	Lab. Aspal	1	Set	Lab. Aspal
	- Ductility	1	Set	
	- Viscositas	1	Set	
	- Penetrometer			
3	Lab. Tanah			Lab. Tanah
	- Exturder	1	Unit	
	- Proctor	2	Unit	
	- Provingring CBR 10 KN	1	Unit	
	- Mol CBR 6"	9	Unit	
	- Gelas Piala 1000 ml	12	Unit	
	- Saringan 2, 1,5, 1, 3/4, 3/8, 4,8,16,40,50,100, 200	2	Set	
	- Labu Ukur 100 ml	12	Pcs	
	- Pipett Volumetrik	24	Pcs	
	- Gelas Ukur 500 ml	5	Pcs	
	- Gelas Ukur 1000 ml	5	Pcs	
4	Lab Air			Lab. Air
	- Alat Ukur OT dan DHL	1	Pcs	
	- Auto Buret	12	Pcs	
	- Mikropipet	15	Pcs	
	- Laminer Air Flow	1	Pcs	
	- Buret	10	Pcs	
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>				
1	Alat Uji Lentur Beton (Mates)	1	Unit	Lab. Beton
2	Cor Drilling Mashin (Mates)	1	Unit	Lab. Aspal
	- Mesin Genset 5 KVA (Krisbow)	1	Unit	
	- Mata cor 2", 4", 6"	1	Pcs	
<b>TAHUN ANGGARAN 2017</b>				
1	Alat Uji Taik Besi	1	Unit	Lab. Beton
2	Hammer Tes	2	Unit	Lab. Beton
3	Pompa Air Gasolin	1	Unit	Lab. Tanah
4	Concrete Meshine	1	Unit	Lab. Beton

5	Mercry Vaporizer Unit	1	Unit	Lab. Air
6	Turbidimeter/alat ukur kekeruhan	1	Unit	Lab. Air
7	Labu Ukur 2000 ml	12	Pcs	Lab. Air
8	Labu Ukur 100 ml	12	Pcs	Lab. Air
9	Picnometer 24 ml	12	Pcs	Lab. Aspal
10	Uninterubtible power supplay ka.5000 watt	2	Unit	Lab. Tnh & Asp
11	Lift Pallet Truck ka. 1000 kg	1	Unit	R. Sampel
12	Loss & Heating	1	Unit	Lab. Aspal
13	Timbangan digital ka. 30 kg	2	Unit	Lab.Tnh & Btn
14	PH Meter	1	Unit	Lab. Air
15	Patch tes kit	1	Unit	Lab. Air
<b>TAHUN ANGGARAN 2016</b>				
I	Pada kegiatan pengadaan tidak ada pengadaan barang dana kegiatan terkena rasionalisasi (Batal)			
II	<b>Pada Kegiatan Rehab</b>			
1	Tripot CBR Lab	6	Bh	Lab. Tanah
2	Dail Swilling	6	Bh	Lab. Tanah
3	Labu Ukur @ 50 ml	12	Bh	Lab. Tnh, Asp
4	Labu Ukur @ 100 ml	12	Bh	Lab.Tnh,Btn,Air
5	Labu Ukur @ 500 ml	12	Bh	Lab.Tnh,Btn,Air
6	Saringan	6	Bh	Lab.Btn & Tnh
<b>TAHUN ANGGARAN 2015</b>				
1	Drilling Machine	1	Set	Lab. Tanah
2	Drilling Tools	1	Set	Lab. Tanah
3	Grout Pump	1	Set	Lab. Tanah
<b>TAHUN ANGGARAN 2014</b>				
<b>APBD Murni 2014</b>				
1	Triaxial CU/CD	1	Set	Lab. Tanah
2	Fitted With Electric Motor	1	Set	
3	Mesin Extrasi Centrifugal	2	Unit	Lab. Aspal
4	Alat Test Keterbalan Aspal	1	Unit	Lab. Aspal
<b>APBD-P 2014</b>				
1	Magnetic Stirrer	1	Unit	Lab. Air
2	Kulkas 2 Pintu	1	Unit	Lab. Air
3	Filter Holder Sterifil	1	Unit	Lab. Air
4	Cool Box	2	Unit	Lab.Tnh & Btn
5	Ice Pack	4	Unit	Lab. Air
6	Botol Semprot	3	Unit	Lab. Air
7	Lemari Asam	1	Unit	Lab. Air
8	Kalium Permanganat	1	Unit	Lab. Air
9	Asam Sulfat	1	Unit	Lab. Air
10	Natrium Asetat	1	Unit	Lab. Air
11	Magnesium Sulfat Heptahidrat	1	Unit	Lab. Air
12	Natrium Hidrogen Karbonat	1	Unit	Lab. Air

13	Kuper Sulfat Pentahidrat	1	Unit	Lab. Air
14	HCl Pekat	1	Unit	Lab. Air
15	Potasium Kromat	1	Unit	Lab. Air
16	Indikator Mureksid	1	Unit	Lab. Air
17	Fenol	1	Unit	Lab. Air
18	Natrium Hipoklorit	1	Unit	Lab. Air
19	Etanol Absolut	1	Unit	Lab. Air
20	Natrium Nitroprusid	1	Unit	Lab. Air
21	Titriplex III	1	Unit	Lab. Air
22	Mata Core Beton	1	Unit	Lab. Beton
23	Compression Machine (UTS)	1	Unit	Lab. Beton
<b>TAHUN ANGGARAN 2013</b>				
1	CBR Labor& Lapangan	1	Unit	Lab. Tanah
2	Marshall Test Elektrik	1	Unit	Lab. Beton
3	Sieve Shaker	1	Set	Lab. Beton
4	Mesin Genset	1	Unit	
5	AC Split	1	Unit	Mob. Lab
6	Mobil Roda 6	1	Unit	
	- Karoseri	1	Unit	Mob. Lab
	- Sand Cone Test	2	Unit	Mob. Lab
	- Dynamic Cone Penetromtr	1	Unit	Mob. Lab
	- Heavy-duty Sol. Balance	1	Unit	Mob. Lab
	- Cent-O-Gram Balance	1	Unit	Mob. Lab
	- Water Bath	1	Unit	Mob. Lab
	- Oven	1	Unit	Mob. Lab
	- Water Pas	1	Unit	
7	Hammer Test Digital	1	Unit	Lab. Beton
8	Electric Density Gauge	1	Unit	Lab. Tanah
<b>TAHUN ANGGARAN 2012</b>				
1	GPS ( Global Positioning System )	2	Unit	R. Aset
2	Triaxial Elektrik	1	Unit	Lab. Tanah
3	CBR Laboratorium Elektrik	1	Unit	Lab. Tanah
4	Ducth Cone Penetrometer 2,5 Ton	1	Set	Lab. Tanah
5	Abration Test Machine	1	Unit	Lab. Beton
6	Hidrolic Bottle Jack 10 Ton	2	Unit	Lab. Tanah
7	Foldable Platform Hand Truck	1	Unit	Lab. Tanah
8	Shrinkage Limit Test	3	Set	Lab. Tanah
9	Stop Watch	1	Unit	Lab. Tanah
10	Bahan Baku dan Pelarut Kimia	1	Unit	Lab. Air
11	Analytic Balance Elektrik 210 Gram	1	Unit	Lab. Beton
12	Lampu AAS + Baku Standar	1	Unit	Lab. Air
13	PH Meter Digital	1	Unit	Lab. Air
14	Column Cadmium Reduction	1	Unit	Lab. Air
15	Automatic Compaction	1	Unit	Lab. Tanah
16	Marshall Test Set 50 KN	1	Unit	Lab. Aspal
17	Bar Meter Test	1	Unit	Lab. Aspal
18	Ductility Mold	1	Unit	Lab. Aspal
19	Digital Balance 6100 Gram	1	Unit	Lab. Air



20	Picnometer Aspal Bitonus 24 Ml	1	Unit	Lab. Aspal
21	Picnometer Aspal Bitonus 25 Ml	1	Unit	Lab. Aspal
22	Diamond Cor Bit 4"	1	Unit	Lab. Aspal
<b>TAHUN ANGGARAN 2011</b>				
1	Drying Oven 53 L	1	Unit	
2	Analytik Balance Elektrik	1	Unit	Lab. Air
3	Triple Beam Balance 2610 Gram	1	Unit	Lab. Tanah
4	Cent 0-Gram Balance 311 Kg	1	Unit	Lab. Tanah
5	Heavy Duty Solution Balance 20 Kg	1	Unit	Lab. Tanah
6	CBR Mould & Accesories (Bs 1377)	6	Set	Lab. Tanah
7	Mata Cor/Diamond Bid 4"	2	Unit	Lab. Aspal
8	Siev Analisis uk. Saringan 1 1/2", 1/2", 3/8", 3/4", 4", 10", 40", 200", Pan.	1	Set	Lab. Beton
9	Biconus Sondir Kap. 2,5 Ton	1	Unit	Lab. Tanah
10	Stop Watch	1	Unit	Lab. Aspal
11	Sample Trays 910 x 910 x 76 mm	6	Buah	Lab. Tana & Btn
12	Digital Balance Kap 6100 gr (GE - 161)	1	Set	Lab. Beton
13	Desicator Vakum dia. 30Cm	1	Unit	Lab. Beton
14	Capping Compound Warmer Kap 3 Ltr (CO-472)	1	Unit	Lab. Beton
15	Compection Hammer (BI-324)	1	Unit	Lab. Aspal
16	Thermometer Kap. 300" (GE-604)	1	Unit	Lab. Aspal
17	Filter Paper (BI-303)	1	Box	Lab. Aspal
18	Compection Factor Apparatus	1	Unit	Lab. Aspal
<b>TAHUN ANGGARAN 2010</b>				
1	Mesin press elektrik beton 2000 KN (Hambold) * 20mm Distance piece * 80mm Distance piece * 200mm Distance piece	1	Set	Lab. Btn
2	Universal Oven kap. 53 liter Konsolidasi elektrik + Assesoris	1	Bh	Lab. Air
3	komputer * Consolidation Frame * Set of weight * Floor mounting stand	1	Set	Lab. Tanah

	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Consolidation cell complete</li> <li>* automous data acquisition unit</li> <li>* 10 mm displacermnt tranduser</li> <li>* One dimensioal consolidasion softwer</li> <li>* kompoter P4</li> </ul>			
4	Diamond Bit 4" inner dia	2	Bh	Lab.Beton

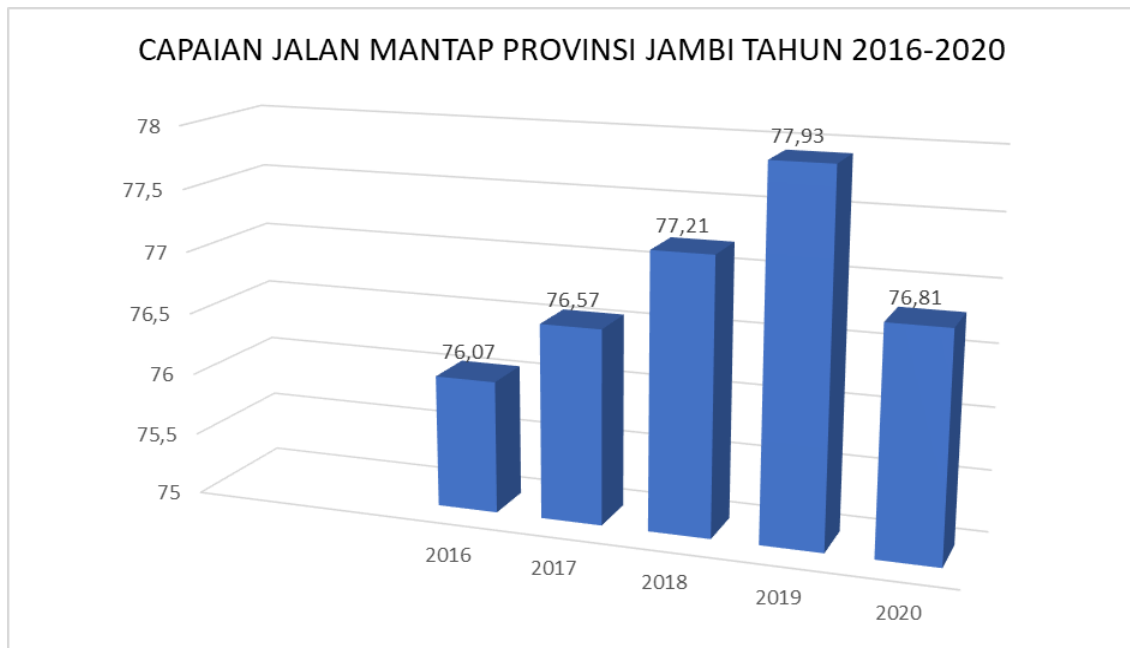
Sumber : Buku Induk Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

## 2.2. Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi melakukan pencapaian-pencapaian dalam Renstra maupun RPJMD Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 tahun. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat meliputi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Indikator-indikator kinerja ini penjabaran dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada tahun sebelumnya. Penilaian kinerja ini dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan variabelnya, sebagaimana tabel pencapaian kinerja dibawah ini :

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan (SKPD)



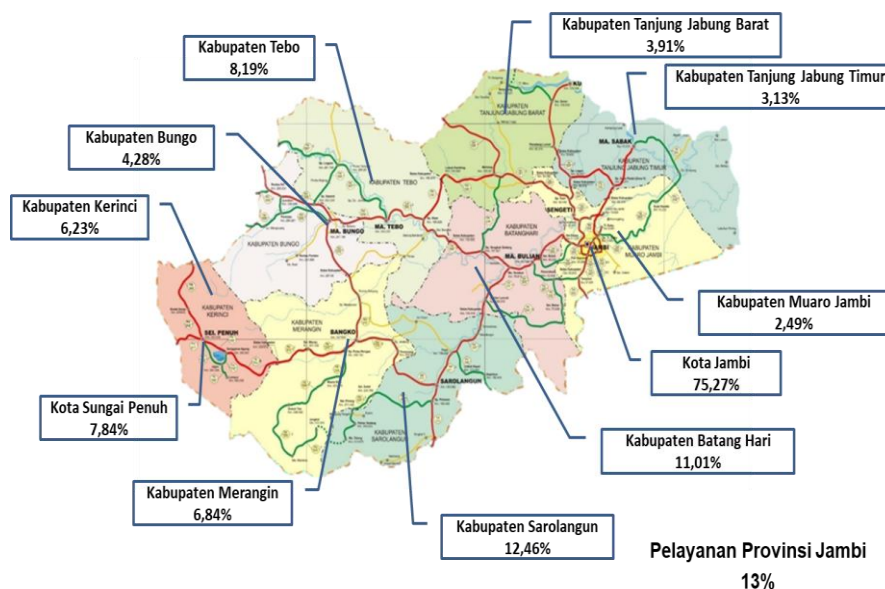
Gambar 3. Capaian Jalan Mantap Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 (Sumber : Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020)

Dari gambar 3 dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan kualitas jalan mantap sebesar 1,12% yang disebabkan oleh Recofusing Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2020 untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.



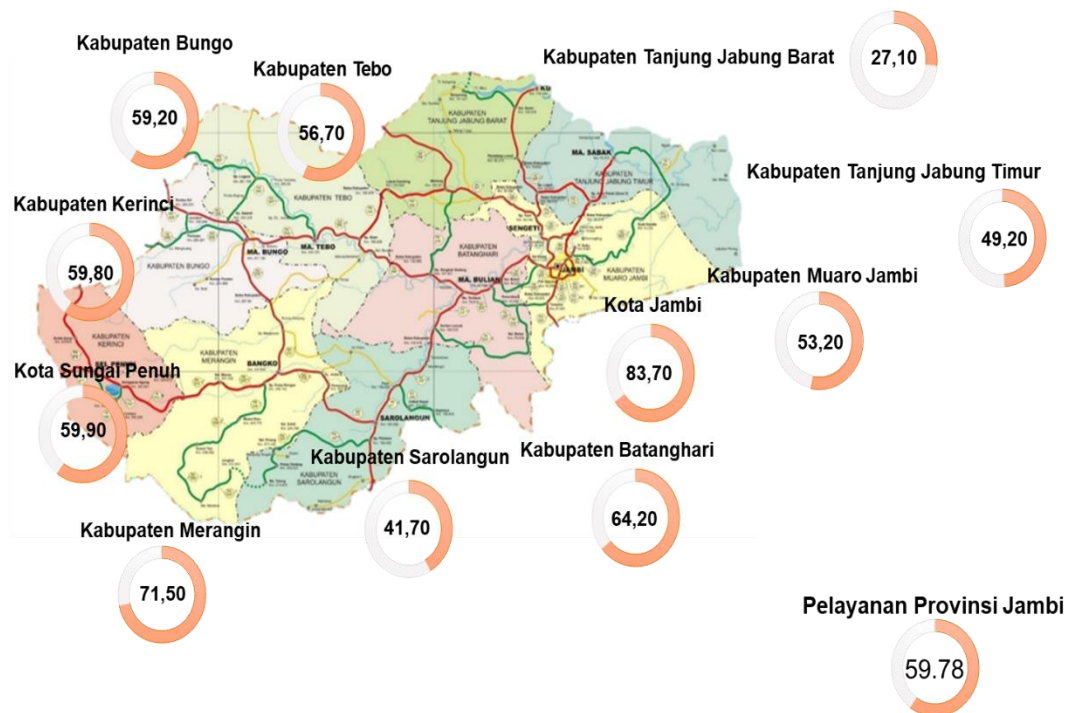
Gambar 4. Capaian Pelayanan Air Minum di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 (Sumber : Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020)

Berdasarkan gambar 4 terkait capaian pelayanan air minum yang tertinggi di Kota Jambi sebesar 65,19 dan terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 9,79. Capaian rata-rata pelayanan air minum di Provinsi Tahun 2016-2020 sebesar 25,79.



Gambar 5. Capaian Pelayanan Persampahan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 (Sumber : LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020)

Pada gambar 5 bahwa capaian pelayanan Provinsi Jambi sebesar 13%. Nilai pencapaian pelayanan persampahan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 75,27% karena terdapat 1 TPA Regional yaitu TPA Talang Gulo.



Gambar 6. Capaian Akses Sanitasi di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 (Sumber : Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020)

Berdasarkan gambar 6 bahwa capaian akses sanitasi provinsi jambi sebesar 59,78, dengan capaian akses sanitasi tertinggi di Kota Jambi sebesar 83,70 dan terendah di Kabupaten Tanjab Jabung Barat sebesar 27,10.

Tabel 11. Target dan realisasi yang telah dicapai pada periode 2012 s/d 2021 pada UPTD Workshop dan Peralatan

URAIAN	TAHUN									
	2012		2013		2014		2015		2016	
	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL
	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi	269,7	245,37	300	438,79	350	329,33	400	536,59	420	483,69
URAIAN	TAHUN									
	2017		2018		2019		2020		Per Juni 2021	
	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL
	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi	407,37	407,37	407,37	453,91	410,01	411,7	407	407,5	407	193,19

Sumber : LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

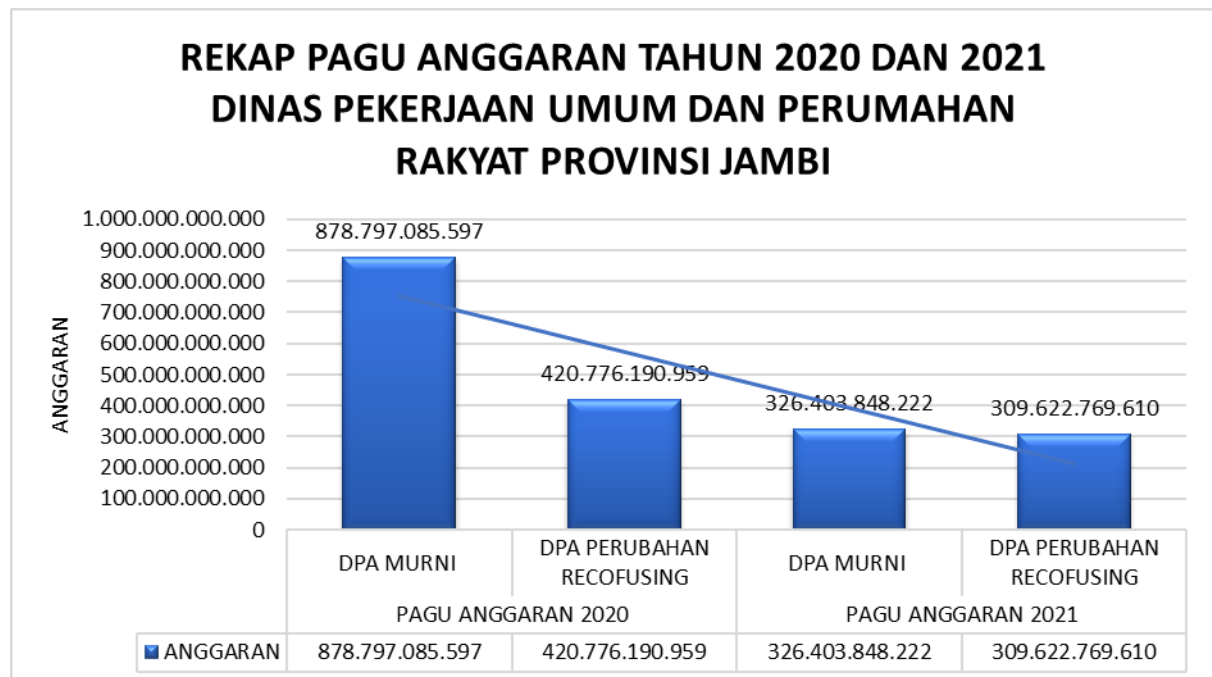
## 2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD



Gambar 7. Rekap Pagu Anggaran Tahun 2016 – 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sumber : LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020)

Dari gambar 7 terlihat terjadi penurunan pagu anggaran pada tahun 2020 dan 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akibat dari

Recofusing Anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Recofusing pagu anggaran pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Rekap Pagu Anggaran Tahun 2020 dan 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sumber : LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020)

Berdasarkan gambar 8 terjadinya recofusing atau pemotongan anggaran pada tahun 2020 sebesar 50% dari DPA Murni. Hal tersebut berdampak terhadap capaian dan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

### **2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Dalam penyusunan strategi digunakan metoda Analisa SWOT yang merupakan suatu penyusunan strategi organisasi. SWOT kepanjangan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O) dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor eksternal (O dan T) dan faktor internal (S dan W). SWOT digunakan dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Analisa ini didasarkan pada interaksi antara faktor internal terhadap faktor eksternal sebagai berikut :

a) Analisis Faktor Internal

Analisis faktor internal adalah rencana pencapaian dan sasaran infrastruktur bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan rakyat, Bina Program dan Tata Ruang, bina konstruksi dan pengendalian, pengujian, peralatan dan perbekalan yang dilakukan dengan mengidentifikasi Strength (kekuatan) dan Weakness (kelemahan). Kekuatan dan kelemahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebagai berikut :

1) Strength (kekuatan)

- Terdapatnya SK kewenangan jalan dan jembatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Adanya kewenangan dan tanggung jawab terkait sungai dan daerah irigasi permukaan dan rawa oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Pembagian kewenangan penanganan kawasan kumuh pada bidang perumahan berdasarkan skala besaran luasan.
- Jumlah sumber daya manusia (tenaga kerja) konstruksi yang tersertifikasi ahli dan terampil
- Adanya rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Jambi tahun 2013-2033 yang masih berlaku.
- Adanya kawasan strategis Provinsi seperti kawasan perkotaan
- Terdapatnya laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Laboratorium yang sudah menerapkan ISO 17025.

2) Weakness (kelemahan)

- Belum optimalnya dalam pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Minimnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan



- Belum optimalnya pemeliharaan wilayah sungai dan daerah irigasi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Terdapatnya alih fungsi lahan yang terjadi secara terus menerus
- Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dibidangnya.
- Minimnya peralatan dan bahan untuk pengujian sampel
- Dibutuhkan upgrade atau pembaharuan peralatan

#### b) Analisis Faktor Eksternal

Analisis faktor eksternal tentang infrastruktur bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan rakyat, Bina Program dan Tata Ruang, bina konstruksi dan pengendalian, pengujian, peralatan dan perbekalan untuk mengidentifikasikan opportunities (peluang) dan threats (ancaman) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari sebagai berikut :

##### 1) Opportunities (peluang)

- Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi yang diikuti dengan peningkatan volume lalu lintas.
- Terdapat komitmen Gubernur tentang program prioritas pembangunan infrastruktur bidang jalan, jembatan dan daerah irigasi.
- Adanya kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan pengembangan infrastruktur untuk mendukung kawasan khusus ekonomi, kawasan khusus pedesaan, kawasan khusus cagar budaya dan kawasan khusus industri.
- Adanya alokasi dana APBN dan dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur.

##### 2) Threats (ancaman)

- Terdapat disparitas regional secara ekonomi dan berkaitan dengan tidak meratanya pembangunan infrastruktur
- Keterbatasan anggaran daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur pada kondisi pandemi Covid-19

- Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya beban tonase muatan seperti transportasi pengangkutan batubara
- Masih adanya kejadian bencana alam longsor dan banjir yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan

Output interaksi antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) terhadap faktor eksternal (peluang dan ancaman) sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi untuk ketersediaan alokasi dana yang harus meningkat dari tahun ke tahun untuk mendukung infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi
- 2) Dukungan alokasi dana untuk program prioritas Gubernur terkait pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan daerah irigasi
- 3) Pemanfaatan kewenangan penyelenggaraan jalan, jembatan dan daerah irigasi oleh OPD dengan meningkatkan serapan anggaran dana APBN dan dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur.
- 4) Pemanfaatan kewenangan penyelenggaraan jalan, jembatan dan daerah irigasi oleh OPD untuk mendukung pengembangan kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan infrastruktur pendukung kawasan khusus ekonomi, kawasan khusus pedesaan, kawasan khusus cagar budaya dan kawasan khusus industri.
- 5) Optimalisasi fungsi UPTD untuk mengatasi tingginya volume lalu lintas dan volume muatan tonase yang berlebih.
- 6) Memanfaatkan ketersediaan peralatan pendukung penanganan jalan dan jembatan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas daerah dan bencana alam yang mungkin terjadi dan mengancam konstruksi jalan dan jembatan.
- 7) Atasi kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan dengan adanya pencairan Gubernur tentang program prioritas pembangunan infrastruktur jalan.
- 8) Optimalkan meningkatnya alokasi dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur untuk menangani ruas-ruas yang berada dalam kondisi

rusak berat dan ruas-ruas yang sulit dijangkau, khususnya di wilayah-wilayah terisolir.

- 9) Diperlukan kualitas perencanaan, penyusunan program dan kebijakan, pemutakhiran data, evaluasi kinerja dan pengalokasian anggaran yang optimal.

### **BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan SKPD**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu penyelenggaraan sub urusan bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan rakyat, Bina Program dan Tata Ruang, bina konstruksi dan pengendalian, pengujian, peralatan dan perbekalan. Dalam melaksanakan urusan tersebut aspek kajian yang dikemukakan disini meliputi aspek jalan, jembatan, daerah irigasi, bangunan gedung, perumahan, penataan ruang, pelatihan SDM, pengujian sampel dan peralatan. Agar terwujudnya sinkronisasi kegiatan dengan kebutuhan dan kondisi aktual yang ada maka diperlukan analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang penting untuk dilaksanakan. Dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

Tabel 12. Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Gambaran pelayanan SKPD	Belum optimal.	SOP/SPM	Sumber daya manusia	MEA /daya saing	Masih kurang nya jabatan fungsional teknis
Kajian terhadap Rencana SKPD Provinsi	Belum optimal	Renstra SKPD/RTRW Provinsi	Belum sinerginya proses perencanaan, pemrograman, penganggaran, pengendalian dan pengawasan	- Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penghubung / konektivitas antar kawasan terutama daerah terisolir.	Besar nya kebutuhan layanan infrastruktur mendukung aksesibilitas, kedaulatan pangan, dan ketahanan air,

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya penyediaan pelayanan dasar secara layak pada kawasan perumahan dan permukiman.</li> <li>- Daya saing di pasar global yang cukup besar menuju tenaga kerja jasa konstruksi yang berkompetensi dalam persaingan Masyarakat Ekonomi Assean (MEA)</li> <li>- Belum optimalnya kinerja pengairan/irigasi pada daerah irigasi, rawa, dan pengairan liannya.</li> </ul>	serta kehidupan yang layak.
Kajian Terhadap Renstra K/L	sinergis	Renstra Kementerian PUPR	-	Arahan pembangunan Provinsi jambi merupakan bagian Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 5 sebagai pusat pertumbuhan terpadu	-
Kajian terhadap RTRW	Belum Optimal	RTRW Provinsi Jambi 2013-	Penyediaan infrastruktur terutama pada	-	-

		2033	Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, dan Pusat Kegiatan lokal		
Kajian KLHS	Sinergis	KLHS 2021-2026	-	Tertuang dalam RTRW Provinsi	-

Dari kondisi gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam periode tahun 2016-2021 yang disajikan pada bab 2 bahwa aspek pembangunan mengalami kenaikan dan penurunan, sehingga timbullah berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dan memerlukan penanganan dengan berbagai kebijakan dan program yang terencana dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanganan rutin jalan dan jembatan yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Kondisi penanganan jalan se-Provinsi Jambi pada tahun 2020 dan 2021 tersebar (total ruas jalan Provinsi) sehingga menjadi kendala dalam pengoptimalan kinerja khususnya di bidang Bina Marga dan Workshop dan Peralatan (WDP. Hal ini disebabkan tidak tercapainya kebutuhan penganggaran dan target ditambah dengan kondisi awal di tahun 2020 terjadi penurunan kondisi karena terjadi reconfusing anggaran sehingga sulit untuk mencapai kondisi dan target jalan mantap pada renstra 2016-2021.

Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Kondisi awal jalan mantap tahun 2020 sebesar 76,81% dan lebih ditargetkan kearah kegiatan padat karya untuk pemulihan ekonomi provinsi dan nasional. Selain itu bidang bina marga menangani daerah-daerah non status dan pembangunan jembatan yang sudah tidak layak pakai yang alokasi dananya terpisah dari dana penanganan jalan. Untuk alternatif penanganan biaya jalan dan jembatan dapat melalui pendanaan dari dana alokasi khusus (DAK)

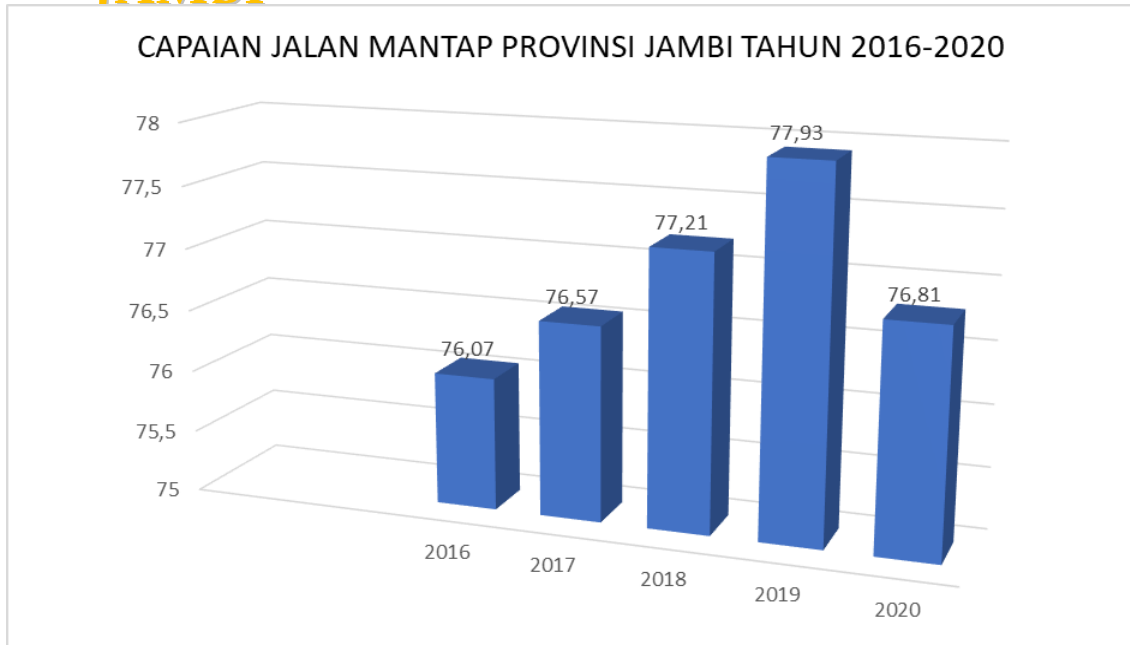
Kategori jalan mantap diartikan bukan hanya dengan sistem pengaspalan jalan, namun dikatakan jalan mantap yaitu jalan yang jenis strukturnya kerikil dan permukaan jalan rata serta dapat ditempuh dengan kecepatan 40 km/jam. Berikut ini tabel kondisi jalan kewenangan provinsi pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 13. Kondisi jalan kewenangan provinsi pada tahun 2020

No	Kabupaten / kota	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Kerinci	25,70	11,12	0,50	-
2	Merangin	57,10	93,60	22,58	22,55
3	Sarolangun	16,30	94,70	32,05	29,20
4	Batang Hari	25,10	20,50	4,83	4,42
5	Muaro Jambi	34,70	55,80	21,89	16,90
6	Tanjab Timur	18,70	38,40	6,70	36,11
7	Tanjab Barat	21,40	8,28	4,00	4,90
8	Tebo	70,60	43,40	20,78	4,20
9	Bungo	23,80	77,80	5,18	0,40
10	Kota Jambi	23,82	23,41	2,27	-
11	Kota Sungai Penuh	7,00	2,15	-	-
JAMBI		324,22	469,16	120,78	118,68

Sumber : Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

Berdasarkan tabel 13 terdapat beberapa ruas jalan yang belum sesuai dengan kondisi jalan yang diharapkan (jalan mantap) dimana dari data jalan yang mengalami kondisi rusak 120,78 km dan rusak berat 118,68 km. Kondisi rusak yang tinggi terdapat pada Kabupaten Sarolangun (32,05 km), Merangin (22,58 km), Muaro Jambi (21,89 km) sedangkan rusak berat yang tinggi pada Kabupaten Tanjab Timur (36,11 km), Sarolangun (29,20 km), Merangin (22,55 km) dan Muaro Jambi (16,90 km) disebabkan oleh semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya beban tonase muatan seperti transportasi pengangkutan batubara. Selain jalan terdapat permasalahan tingkat kerusakan jembatan yang belum mencapai kondisi mantap. Diperlukan strategi dan arah kebijakan agar mampu meningkatkan kondisi jalan mantap di Provinsi Jambi sehingga dapat mencapai visi dan misi Gubernur. Kondisi jalan mantap provinsi jambi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat dilihat pada gambar 9.



Gambar 9. Kondisi Jalan Mantap Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 (Sumber : Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020)

Penanganan jalan kritis dan tanggap bencana saat ini hanya ditangani 1 UPTD yang berada kota jambi. Sehingga sulit untuk meningkatkan kondisi jalan mantap. Diperlukan survey kondisi jalan dan jembatan yang harus lakukan setiap tahun, selain itu dibutuhkan strategi dan kebijakan penanganan agar dapat meningkatkan kondisi jalan mantap kewenangan Provinsi.

2. Terdapat beberapa jalan yang masih belum sesuai dengan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) dan estetika jalan

Beberapa ruas jalan di Provinsi mengalami peningkatan LHR Pasca rampung dan beroperasinya jalan Trans Sumatera (Lampung-Palembang) sehingga banyak masyarakat menggunakan jalur lintas timur untuk efektifitas jarak dan waktu tempuh. LHR yang tidak sesuai dengan jalan akan berdampak terhadap kondisi jalan. Diperlukan langkah kongkrit untuk meminimalisir dampak terhadap kondisi jalan. Selain itu ada LHR yang sudah over kapasitas dan menyebabkan kemacetan pada ruas jalan Tugu Juang. Untuk estetika jalan yaitu terdapat beberapa ruas estetika



jalannya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan fungsi layak jalan untuk estetika saat ini terutama pada ruas jalan perkotaan.

3. Sulitnya akses transportasi antar penghubung desa/kecamatan karena kondisi jembatan yang rusak dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan

Akses transportasi penghubung desa/kecamatan pada jembatan yang berada pada ruas jalan kewenangan provinsi memerlukan perhatian khusus karena banyak jembatan yang fungsinya sudah menurun dan rusak. Jembatan merupakan salah satu infrastruktur penggerak perekonomian daerah terutama di Provinsi Jambi yang memiliki sungai yang terpanjang keempat di Indonesia yaitu sungai Batanghari.

4. Minimnya kondisi peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan

Masih minimnya kondisi peralatan untuk penanganan jalan dan jembatan sehingga belum bisa semua tercover untuk penanganan jalan dan jembatan kewenangan provinsi jambi sebesar 1.032,88 km dan kondisi jalan mantap provinsi belum optimal. Selain itu terdapat kondisi alat berat yang butuh perawatan dan perlu dilakukan upgrade peralatan. Belum terbangunnya sinergitas antara bidang bina marga dan alkal terkait penanganan pekerjaan jalan dan jembatan kewenangan provinsi.

5. Penurunan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan

Belum optimalnya pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai dan daerah irigasi yang merupakan kewenangan provinsi sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas sumber daya air. Padahal Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang potensial untuk pengembangan wilayah sungai, daerah irigasi permukaan dan daerah irigasi rawa. Jika jaringan irigasi permukaan dan rawa dikembangkan secara konsisten, kontinu dan terpadu, maka provinsi Jambi akan dapat memenuhi kebutuhan pangan provinsi bahkan dapat pula menjadi lumbung padi dalam rangka menyokong

pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Menurut permen No. 14/PRT/M2015 luas Daerah Irigasi Permukaan di Provinsi Jambi seluas 49.767 ha dan Daerah Irigasi Rawa seluas 50.340 ha.

Tabel 14. Daerah Irigasi Permukaan Provinsi Jambi

No	Nomenklatur/ Nama D.I		Luas Areal (Ha)			
			Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)	Potensial (Pemetaan IGT)	Sawah/Fungsional (Pemetaan IGT)
1	D.I	Sei. Batang Uleh	2.043	2.043	1.800	742
2	D.I	Sei. Tanduk	1.265	1.265	1.118	659
3	D.I	Sei. Batang Limun Singkut	1.600	2.038	1.600	546
4	D.I	Sei. Suban	1.121	1.121	1.001	826

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015

Daerah irigasi (DI) kewenangan Provinsi sebagai berikut DI Suban, DI Batang Ule, DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas total 6.029 Ha. Untuk saat ini kondisi jaringan irigasi paling rendah adalah DI Batang Ule, hal ini akan ditindak lanjuti dengan melakukan kegiatan revitalisasi dengan biaya 90 miliar. Selanjutnya, DI Limun Singkut akan dituntaskan dengan membangun jaringan primer dan sekunder sebanyak 700 jaringan.

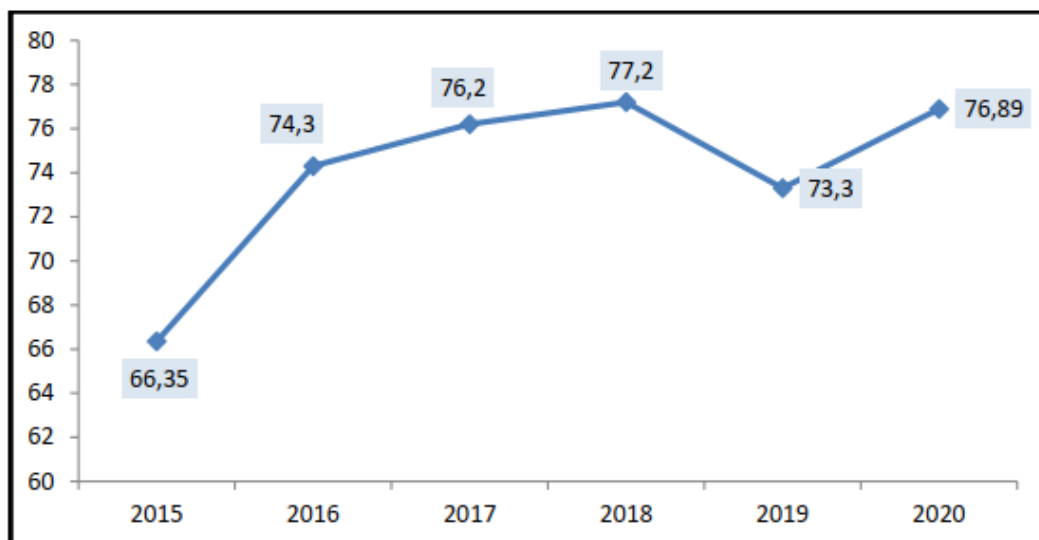
Tabel 15. Daerah Irigasi Rawa Provinsi Jambi

No	Nomenklatur/ Nama D.I		Luas Areal (Ha)			
			Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)	Potensial (Pemetaan IGT)	Sawah/Fung sional (Pemetaan IGT)
1	D.I.R	Sei. Ayam	1.000	1.000,00	1.000,00	-
2	D.I.R	Sei. Senyerang	1.318	1.318,00	1.318,00	379,50
3	D.I.R	Teluk Ketapang	1.250	1.250,00	1.250,00	777,11
4	D.I.R	Teluk Nilau	1.510	1.510,00	1.510,00	871,96
5	D.I.R	Koto Kandis	1.077	1.077,00	1.077,00	171,00
6	D.I.R	Nipah Panjang I-II	1.300	1.300,00	1.300,00	424,00
7	D.I.R	Rantau Rasau	1.734	1.734,00	1.734,00	713,00
8	D.I.R	Simpang Datuk	1.050	1.050,00	1.050,00	859,00

9	D.I.R	Simpang Puding	1.600	1.600,00	1.600,00	1.354,00
10	D.I.R	Sungai Raya	1.200	1.200,00	1.200,00	261,00

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015

Untuk Daerah Irigasi Rawa (DIR) terbagi menjadi DIR Teluk Nilau dimana luas potensi 1.510 Ha dengan luas fungsional 871,96 Ha, DIR Simpang Puding dengan luas potensi 1.600 Ha dan luas fungsional 1.354 Ha, DIR Rantau Rasau dengan luas potensi 1.734 Ha dan luas fungsional 713 Ha, DIR Koto Kandis 1.077 Ha dan luas fungsional 171 Ha, DIR Nipah Panjang dengan luas potensi 1.300 Ha dan luas fungsional 424 Ha, DIR Teluk Ketapang dengan luas potensi 1.250 dan luas fungsional 777 Ha. Danau kerinci merupakan kawasan standar pariwisata nasional (KSPN) dan saat ini menjadi salah satu danau kritis karena kondisinya yang sudah tercemar. Kegiatan penanganan berdampak terhadap kondisi irigasi dan menurunkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi rusak seperti gambar 10.



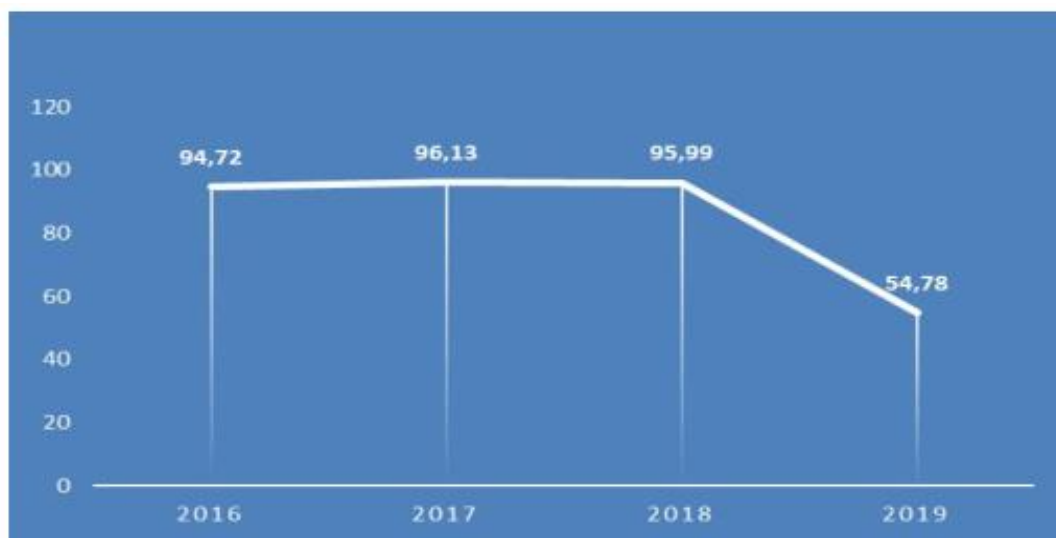
Gambar 10. Persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jambi tahun 2015-2020 (Sumber : Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020)

#### 6. Minimnya hunian yang layak

Penanganan urusan perumahan rakyat merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetik dan

nyaman. Kegiatan penanganan yang dilakukan seperti peningkatan kualitas permukiman dan perumahan beserta utilitasnya terutama didaerah perkotaan. Pemerintah Provinsi berfokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama dalam meningkatkan standar hidup 40% terbawah, permasalahan yang dihadapi adalah akses hunian yang layak.

Hunian yang layak merupakan hunian yang memiliki ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum yang baik, keterjangkauan dilihat dari proporsi pengeluaran rumah tangga, keamanan bermukim. Pada tahun 2019 akses hunian layak bagi rumah tangga turun menjadi 54,78 persen (Gambar 11), banyak hal yang menyebabkan turunnya akses hunian layak ini antara lain kepadatan penduduk yang terus meningkat, penyediaan sumber air yang aman, dan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah sendiri, untuk itu kedepan diharapkan Pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu menekan laju pertumbuhan penduduk, memperbanyak ketersediaan sumber air aman, dan meningkatkan prekonomian masyarakat.



Gambar 11. Kondisi hunian layak bagi rumah tangga di Provinsi Jambi dari tahun 2016-2019 (Sumber : Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019)

7. Terdapat kawasan kumuh tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat

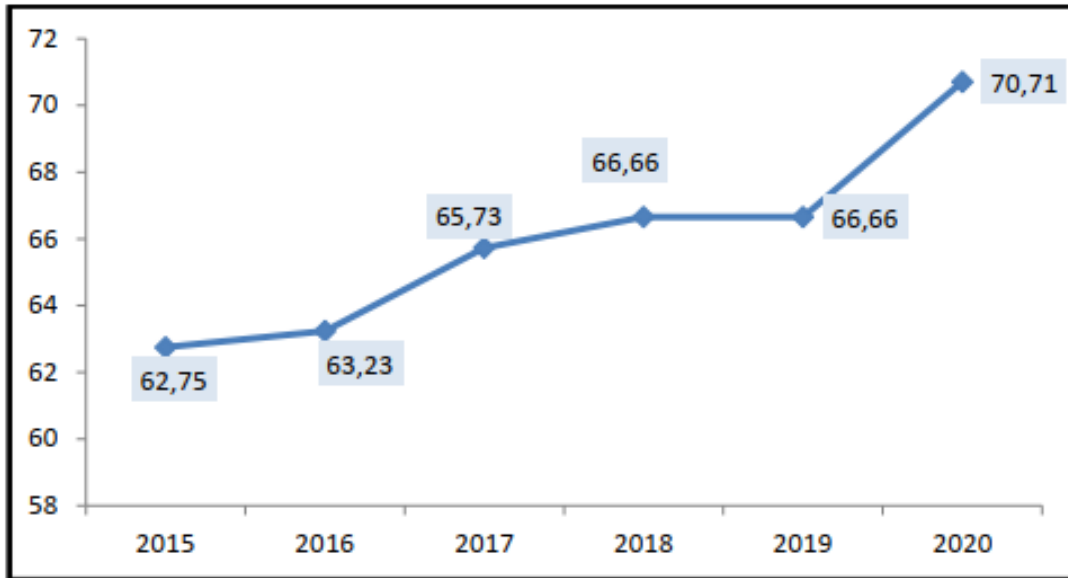
Terdapat permasalahan permukiman yang berada pada kawasan kumuh di kawasan perkotaan. Identifikasi kawasan kumuh dilakukan berdasarkan parameter penilaian kawasan kumuh yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman berdasarkan kondisi fisik bangunan, aksesibilitas, kependudukan, status tanah, dan kondisi prasarana lingkungan. Kawasan kumuh tersebut dikarenakan kawasan tersebut sering tergenang banjir bila musim penghujan dan kualitas lingkungan yang rendah akibat dari buruknya kondisi bangunan dan jarak bangunan yang sangat rapat, serta kondisi prasarana lingkungan seperti kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase, kondisi air limbah dan kondisi persampahan yang buruk. Kawasan kumuh yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat yang tinggal serta menyebabkan tidak layak huni.

8. Masih kurangnya lisensi sertifikasi bagi pengembang kawasan perumahan dan permukiman

Pada penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni yang merupakan tanggung jawab pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Permasalahan yang muncul antara lain spesifikasi rumah yang tidak sesuai dengan informasi pada saat pembelian, sulitnya mendapatkan sertifikat rumah, hingga pembangunan yang tidak terealisasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah konsumen perumahan adalah menjamin mutu pengembang melalui proses sertifikasi. Adanya sertifikasi menjadi jaminan kompetensi dan legalitas pengembang sehingga proses pembangunan dan kualitas perumahan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan.

9. Minimnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak

Pada saat ini kondisi proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2020 adalah 70,71 persen yang dapat dilihat pada gambar 12.



Gambar 12. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (Sumber : Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020)

Permasalahan yang dihadapi sebagai berikut cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak dan aman pada kawasan strategis.

10. Belum maksimalnya pengelolaan persampahan regional pada wilayah kabupaten/kota yang letaknya berdekatan

Pada wilayah kabupaten/kota yang letaknya berdekatan diperlukan pengelolaan persampahan regional. Pengelolaan persampahan regional mampu meminimalisir permasalahan sampah yang terjadi dan dapat memaksimalkan kelembagaan antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain.

11. Kurangnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

Pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik belum dilakukan secara partisipatif sehingga prasarana pengolahan air limbah domestik yang ada tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan air limbah mencakup aspek pelayanan, kelembagaan,

peraturan perundangan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, dan pendanaan.

12. Minimnya perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Sistem drainase yang telah dibangun di wilayah strategis perkotaan tidaklah luput dari permasalahan. Oleh karenanya dibutuhkan pertimbangan yang matang terkait debit, lingkungan, tata guna lahan, kapasitas saluran dan partisipasi masyarakat

13. Belum tertatanya bangunan strategis

Pada pelaksanaan pembangunan masih banyak yang belum menindak lanjuti dan menyesuaikan dengan perda bangunan gedung yang dimilikinya agar sesuai dengan dengan undang-undang bangunan gedung.

14. Minimnya peralatan dan bahan untuk pengujian sampel dan  
Dibutuhkan upgrade atau pembaharuan peralatan

Dalam melakukan analisis dan pengujian masih terbatasnya alat dan bahan untuk melakukan pengujian. Selain itu alat-alat yang digunakan membutuhkan upgrade atau pembaharuan peralatan agar hasil analisis dan uji yang didapatkan akurat.

15. Keterbatasan anggaran daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur pada kondisi pandemi Covid-19

Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Refocusing anggaran dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2020 dan 2021 telah terjadi reconfusing anggaran penyelenggaraan infrastruktur yang menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih**

Dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur yang

dituangkan dalam strategis pembangunan daerah berupa kebijakan terkait program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Jambi serta mempertimbangkan budaya hidup dalam bermasyarakat, maka visi dan misi Gubernur Jambi tahun 2021-2024 dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang hendak dicapai sebagai berikut :

Tabel 16. Visi dan Misi Gubernur Jambi Tahun 2021-2024

<p style="text-align: center;"><b>Visi Gubernur Jambi Tahun 2021-2024</b></p> <p style="text-align: center;"><b>JAMBI MANTAP 2024</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Misi Gubernur Jambi Tahun 2021-2024</b> <b><u>JAMBI MANTAP 2024</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat <u>Provinsi Jambi Tahun 2021-2026</u></b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas</li> <li>2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantapkan kualitas sarana dan prasarana jalan provinsi</li> <li>2. Pemantapan tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar dapat mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air</li> <li>3. Memantapkan infrastruktur perumahan dan</li> </ol>



<p>kesejahteraan masyarakat</p> <p>3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.</p>	<p>permukiman yang layak huni</p>
--	-----------------------------------

Sumber : Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021

Dari table diatas keterkaitan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan bagian yang tak terlepas dari pelaksanaan RPJMD pemerintah Provinsi Jambi, maka analisis terhadap telaah visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sangat penting untuk dilaksanakan. Dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

Tabel 17. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2021-2026

No	Misi dan Program KDH dan wakil KDH terpilih		Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1 :	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	-	-	-
	Program :		-	-	-
2.	Misi 2 :	Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	-	-	-
	Program :	- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Pelabuhan Laut dan Bandara	-	-	-

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi, Air Bersih dan Bendungan</li> <li>- Pemantapan Kelembagaan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya</li> <li>- Peningkatan kualitas dan kelestarian kelestarian lingkungan hidup (sumberdaya air, lahan dan tambang) serta pengelolaan mitigasi perubahan iklim,</li> </ul>			
3.	Misi 3 :	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.	-	-	-
	Program:		-	-	-

Sumber : Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021

### 3.3. Telaah Renstra K/L Kementerian PUPR dan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar tercapainya sasaran-sasaran strategis kementerian. Untuk pelaksanaan program dan pada Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta agar keseluruhan sumber daya yang

ada dapat digunakan secara optimal dan dapat tercapainya kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif agar menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output optimal.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor - faktor penghambat maupun pendorong dari penyelenggaraan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang mempengaruhi permasalahan penyelenggaraan infastruktur ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Identifikasi faktor tersebut dapat ditinjau pada tabel berikut :

Tabel 18. Telaah Renstra K/L Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka menengah Renstra K/L (Kementrian PUPR) Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;</li> <li>- Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;</li> <li>- Kapasitas tampung per</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status Kewenangan Wilayah yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>• Besarnya cakupan layanan irigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran kelembagaan pengelola irigasi yang belum optimal</li> <li>• Koordinasi antar instansi yang belum optimal</li> </ul>	Tertuang dalam RPJMD

	kapita; Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.			
2.	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan</li> <li>• Banyaknya pelanggaran terhadap beban muatan jalan</li> </ul>	Obyek yang ditangani terlalu luas	Tertuang dalam RPJMD
3.	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>;</li> <li>- Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;</li> </ul>	Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman belum optimal	Penyelenggaraan pembangunan yang masih sangat bergantung pada pembangunan langsung oleh Pemerintah	Tertuang dalam RPJMD
4.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan	Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi teknis terkait masalah infrastruktur	Peraturan/regulasi yang membatasi kewenangan	Tertuang dalam RPJMD

	<p>indikator kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;</li> <li>- Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.</li> </ul>			
5.	<p>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;</li> <li>- Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;</li> <li>- Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;</li> <li>- Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;</li> <li>- Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di</li> </ul>	<p>Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi teknis terkait masalah infrastruktur</p>	<p>Ketersediaan Program Kegiatan</p>	<p>Tertuang dalam Renstra PUPR Provinsi</p>

	Kawasan Strategis; - Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.			
--	---	--	--	--

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

Tabel 19. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode PUPR	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode PUPR
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA						
		a. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%)	67	70	73	76	79	
		b. Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%)	54,4	64	77	89	100	

		c. Kapasitas tampung per kapita (m3/kapita)	52,5	55,2	57,1	58,1	58,5	
		d. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m3/tahun/ha)	19.845	20.554	21.263	21.971	22.680	
2	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional						
		Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 km)	2,21	2,19	2,09	2,08	1,90	
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya <i>smart living</i> , dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau						
		a. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> (%)	60,29	70,08	80,07	89,93	98,57	
		b. Persentase pemenuhan kebutuhan	56,86	57,46	58,02	58,71	59,48	

		rumah layak huni (%)						
4	Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional						
		a. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan Profesional (%)	5,8	5,6	6,0	6,4	6,8	
		b. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Yang Kompeten dan Siap Kerja (%)	25	27,5	80	85	90	
5	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya						
		a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (%)	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44	
		b. Tingkat Pemenuhan Investasi / Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan	100	100	100	100	100	



		efektif (%)						
		c. Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur (%)	72	75	82	85	88	
		d. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	70	71	72	74	76	
		e. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis	60	65	70	75	80	
		f. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi	48	51	57	63	68	

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

Tabel 20. Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran Jangka menengah Renstra SKPD (DINAS PUPR PROVINSI JAMBI)	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar			Tertuang dalam RPJMD Prov.Jambi 2021-2026
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan			Tertuang dalam RPJMD Prov.Jambi 2021-2026

Sumber : Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021

Tabel 21. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar								
1	Akses terhadap air minum layak (%)	78,06%	79,08%	83,92%	85,00%	87,00%	90,00%	90,00%
2	Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi (%)	76,90%	81,04%	86,01%	90,16%	94,90%	98,22%	98,22%
3	Persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap (%)	76,81%	79,60%	83,23%	85,32%	87,83%	90,02%	90,02%
4	Persentase tersedianya lingkungan layak huni prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) bagi masyarakat	92% (dari 46,7 km = 42 km)	6%	12%	18%	24%	30%	30%
5	Luas Kawasan Permukiman kumuh (Ha)	196,32 Ha	185,00 Ha	172,00 Ha	160,00 Ha	148,00 Ha	136,00 Ha	136,00 Ha
6	Persentase penyelenggaraan penataan ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	33,00%	40,00%	47,00%	54,00%	61,00%	68,00%	68,00%

Sumber : Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2021-2026 kedepannya tidak hanya dititikberatkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi wilayah, akan tetapi harus bersinergi terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan wilayah yang ingin dikembangkan. Peran dan fungsi pembangunan infrastruktur adalah terciptanya pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman baru yang menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi tersebut. Kebijakan pada Renstra K/L Kementerian PUPR 2020-2024 secara umum untuk melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah, Kementerian PUPR menggunakan pendekatan wilayah pengembangan strategis dimana didalamnya melingkupi kawasan perkotaan dan kawasan industri dengan meliputi :

1. Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan
2. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi
3. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
4. Preservasi Jalan (Peningkatan kualitas kemantapan jalan)
5. Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Penataan Jalan Nasional di Kawasan Perkotaan
7. Pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif
8. Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman
9. Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman
10. Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman
11. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni
12. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder
13. Mempercepat penyediaan rumah layak huni
14. Kebijakan Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah
15. Kebijakan Peningkatan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah

#### 16. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Berdasarkan hasil analisis Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 bahwa gambaran yang akan diimplikasikan dalam pencapaian target 5 tahun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam Renstra Tahun 2021-2026 dalam peningkatan keterpaduan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) melalui pendekatan yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan pengembangan wilayah dimana didalamnya melingkupi kawasan perkotaan dan kawasan industri.

Pendekatan pengembangan wilayah tersebut berazaskan pada efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, manfaat dalam skala ekonomi (economic of scale) serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional; mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik; kebutuhan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat; dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; serta meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Konsepsi pengembangan wilayah diilustrasikan sebagai pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama pengembangan wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan, maupun antar wilayah.

### **3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Pada telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033. Dalam proses pembangunan harus menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan ruang agar mendekati kondisi optimal. Sehingga perencanaan pembangunan yang dilakukan dapat menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi

sumber daya alam yang berasaskan lingkungan hidup guna pembangunan yang berkelanjutan. Dari analisis dan telaah RTRW Provinsi Jambi yang dikaitkan dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, sebagai berikut :

Tabel 22. Telaah RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan infrastruktur di pusat kegiatan Nasional (PKN)			
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum sesuai kebutuhan masyarakat	Database	-	Tertuang dalam RTRW
	- Peningkatan TPA regional serta parasarana dan sarana persampahan	Database	-	Tertuang dalam RTRW
	- Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu melalui pipa sanitasi	Database	-	Tertuang dalam RTRW
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Database	-	Tertuang dalam RTRW
2.	Pengembangan infrastruktur di pusat kegiatan lokal (PKL)			
	- Prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum, TPA, dan insatalasi pengelolaan limbah tinja.	Database	-	Tertuang dalam RTRW

	- Peningkatan kapasitas air minum perkotaan	Database	-	Tertuang dalam RTRW
	- Pengembangan sarana dan prasarana permukiman	Database	-	Tertuang dalam RTRW
3.	Pengembangan infrastruktur di pusat kegiatan Wilayah (PKW)			
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum diperkotaan	Database	-	Tertuang dalam RTRW
	- Peningkatan TPA regional serta sarana dan prasarana persampahan	Database	-	Tertuang dalam RTRW
	- Peningkatan dan pengembangan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)	Database	-	Tertuang dalam RTRW
	- Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana permukiman	Database	-	Tertuang dalam RTRW

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013

Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi yang ditetapkan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)
- Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)

Kawasan strategis provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap bidang ekonomi, sosial dan budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah :

- Kawasan Muara Bulian - Jambi dan sekitarnya
- Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh
- Kawasan Strategis Bangko – Sarolangun
- Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab Timur

Untuk kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial budaya sebagai berikut :

- Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun
- Kawasan Wisata Sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi

Wilayah Provinsi Jambi memiliki 7 kawasan strategis Provinsi yaitu KSP Kota Jambi – Bulian – Sengeti, KSP Perkotaan Muaro Bungo – Muaro Tebo, KSP Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi, KSP Perkotaan Kerinci – Sungai Penuh, KSP Merangin – Sarolangun, KSP Kawasan Candi Muaro Jambi dan KSP Kawasan Panas Bumi Kerinci – Merangin

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jambi pada periode tahun 2021-2026 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

### 3.5.1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas SDM hingga kini menjadi penyebab pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan sebagian penduduk di wilayah Provinsi Jambi. Pada bidang pendidikan, angka rata-rata lama sekolah yang rendah mengindikasikan tidak mampunya sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan, dan pada akhirnya memilih untuk menjadi tenaga kerja pada sektor informal dan/atau usaha-usaha yang dimiliki keluarga atau kerabat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk memperbanyak dan memperkuat institusi-institusi pendidikan menengah kejuruan yang menciptakan manusia berdaya saing untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yang saat ini mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian seperti sektor perdagangan dan jasa.

Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud difokuskan melalui inovasi kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, sehingga terjadi pembangunan yang inklusif di bidang pendidikan, yaitu berupa peningkatan kerjasama dengan para pelaku usaha maupun stakeholder lainnya, sehingga lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat bekerja pada sektor-sektor formal yang mendukung terwujudnya industri hilir berbasis penguatan ekonomi kerakyatan.

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menekan angka kematian ibu, stunting, penyadaran masyarakat terhadap dampak buruk merokok bagi kesehatan dan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Fasilitas-fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan puskesmas pembantu beserta tenaga medisnya difokuskan pada hal-hal tersebut.

### 3.5.2. Daya Saing Ekonomi dan Lingkungan Hidup

Perekonomian Provinsi Jambi hingga kini masih ditopang oleh sektor pertanian dan ada kecenderungan mulai bergeser pada sektor non pertanian, khususnya sektor perdagangan dan jasa. Situasi ini dapat mengindikasikan bahwa sektor pertanian semakin tidak mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat, di sisi lain akses kepada pekerjaan



formal di sektor-sektor non-pertanian juga terbatas terkait dengan rendahnya kualitas pendidikan SDM sebagian besar masyarakat. Untuk itu, daya saing ekonomi dan lingkungan hidup merupakan isu strategis pembangunan Provinsi Jambi.

### 3.5.3. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang berkelanjutan

Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan lahan-lahan pertanian pangan yang produktif dan berskala ekonomi, sehingga hasilnya akan mendukung peningkatan akses bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, terhadap pemenuhan kebutuhan pokok tersebut dengan kualitas yang terjaga dan harga yang semakin terjangkau. Meningkatnya produksi pertanian pangan dapat menjadi salah satu sektor yang juga mendorong meningkatnya tingkat pendapatan kelompok masyarakat petani dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mendorong perekonomian wilayah Provinsi Jambi.

Potensi pengembangan wilayah pertanian pangan sangat besar mengingat sebagian besar wilayah Provinsi Jambi merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Batang Hari, yang merupakan DAS kedua terbesar di Indonesia dan pada saat ini merupakan sumber air yang belum banyak dimanfaatkan. Dibutuhkan penyediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air dari aliran sungai ini berupa perluasan jaringan irigasi dan embung-embung penampungan air untuk kebutuhan lahan pertanian pangan teknis. Dalam hal irigasi untuk sektor pertanian perlu adanya sinkronisasi data dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura guna mengetahui prioritas sektor pertanian di beberapa wilayah dalam Provinsi Jambi yang sangat prioritas dalam hal irigasi.

Adanya infrastruktur ini akan merubah lahan pertanian kering yang belum dimanfaatkan menjadi lahan pertanian sawah irigasi teknis dengan luasan yang cukup signifikan untuk mendorong peningkatan aspek ketahanan pangan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Jambi yang juga dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan, mengingat lebih dari 70% pendapatan masyarakat miskin digunakan untuk konsumsi pangan dan lebih dari 20% digunakan untuk konsumsi beras atau bahan makanan

pokok. Disisi lain, adanya infrastruktur ini akan berfungsi juga didalam pengendalian potensi banjir yang di masa depan akan meningkat jika aktivitas manusia di daerah hulu yang menyebabkan tingginya sedimentasi dan pendangkalan aliran sungai di wilayah Provinsi Jambi tidak segera ditertibkan.

Perluasan lahan pertanian di lahan-lahan rawan kebakaran juga menjadi salah satu program yang dapat mendukung penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Adanya pemanfaatan lahan-lahan tersebut dan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat juga dapat berperan dalam mengurangi potensi bencana kebakaran lahan serta memburuknya kualitas lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi.

#### 3.5.4. Pembangunan infrastruktur pengangkutan komoditas hasil produksi rakyat maupun sektor lainnya (pertambangan)

Pembangunan infrastruktur statis ini tidak hanya dapat menekan biaya logistik, namun juga memiliki dampak lainnya berupa: menurunnya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada jalan pengangkutan yang digunakan pada saat ini serta dampak lanjutannya berupa konflik sosial antara masyarakat disepanjang jalan pengangkutan tersebut dengan para pengguna jalan. Keberadaan infrastruktur ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan menekan potensi terjadinya alih fungsi lahan di sekitar infrastruktur tersebut dibandingkan jenis infrastruktur pengangkutan lainnya (jalan tol atau jalan berbayar) mengingat konflik lahan masih merupakan permasalahan yang dihadapi Provinsi Jambi pada saat ini.

#### 3.5.5. Pembangunan dan peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung

Pembangunan infrastruktur statis ini perlu dilakukan sebagai pelabuhan pengumpul sesuai arahan kebijakan pembangunan nasional. Di masa depan, diperlukan upaya peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung berikut fasilitasnya sebagai pendukung pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara yang saat ini ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hub internasional untuk wilayah Pulau Sumatera. Letak geografis yang strategis menjadi pertimbangan terhadap upaya peningkatan status Pelabuhan

Ujung Jabung ini, karena dapat mengurangi biaya logistik untuk kegiatan ekspor-impor bagi wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya, dan berdampak pada menurunnya harga barang-barang dan pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

Kawasan ujung jabung merupakan kawasan strategis berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 karena mendapatkan support penanganan prioritas. Dinas PUPR Provinsi Jambi sudah melakukan perencanaan kegiatan ujung jabung, pengadaan tanah untuk akses jalan dan akses jembatan sungai rambut. Kebutuhan dana untuk penyelesaian pengadaan tanah ujung jabung sebesar Rp. 20.000.000.000.

#### 3.5.6. Pembangunan kawasan strategis

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 terdapat beberapa kawasan strategis di Provinsi Jambi yaitu kepentingan daya dukung lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial budaya. Untuk kepentingan ekonomi terdapat beberapa wilayah sebagai berikut :

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jambi
- 2) Kawasan industri (KI) Ujung Jabung
- 3) Kawasan industri (KI) Kemingking
- 4) Kawasan Ex Transmigrasi Bathin III Ulu

Sedangkan untuk kepentingan sosial budaya terdapat kawasan strategis nasional percandian muaro jambi.

#### 3.5.7. Pembangunan kawasan strategis ekonomi

Pembangunan kawasan strategi ekonomi sangat diperlukan untuk mengakomodir pembangunan industri pengolahan berbasis komoditas sektor pertanian. Disamping selaras dengan RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 Pertumbuhan ekonomi hijau juga difokuskan pada pembangunan kawasan strategis ekonomi yang memfasilitasi pembangunan berbagai industri yang tidak hanya dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat namun juga meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi tekanan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### 3.5.8. Penataan ruang dan tata guna tanah

Penataan ruang wilayah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sudah merupakan kebutuhan mutlak, terutama Provinsi Jambi yang perekonomiannya masih tergantung pada lapangan usaha berbasis pada pemanfaatan sumber daya lahan dan sumber daya yang terkandung didalamnya. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: i) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; ii) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang wilayah perlu ditindaklanjuti dengan penatagunaan tanah yang baik, yang bertujuan untuk: i) mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan arahan tata ruang wilayah, sehingga tidak terjadi penggunaan lahan yang salah tempat; ii). mengatur persediaan lahan bagi berbagai kegiatan pembangunan dengan mengusahakan agar tidak terjadi penatagunaan tanah yang salah urus; iii). mewujudkan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, yaitu dengan mengendalikan kebutuhan masyarakat akan tanah; dan iv) menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Terwujudnya penataan ruang wilayah dan penata gunaan tanah yang baik merupakan wujud konkrit hasil dari reformasi birokraksi dan berjalannya proses pembangunan yang inklusif. Program ini juga akan mendukung peningkatan pelayanan pada bidang perumahan dan permukiman, yang difokuskan pada program peningkatan akses masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah-rendah, kepada air bersih dan sanitasi yang layak berbasis komunitas. Penyadaran masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana disertai dengan pengalokasian kawasan permukiman di daerah layak huni-tidak rawan bencana dalam rangka pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan relokasi

masyarakat di daerah rawan bencana sesuai penataan ruang juga perlu menjadi prioritas.

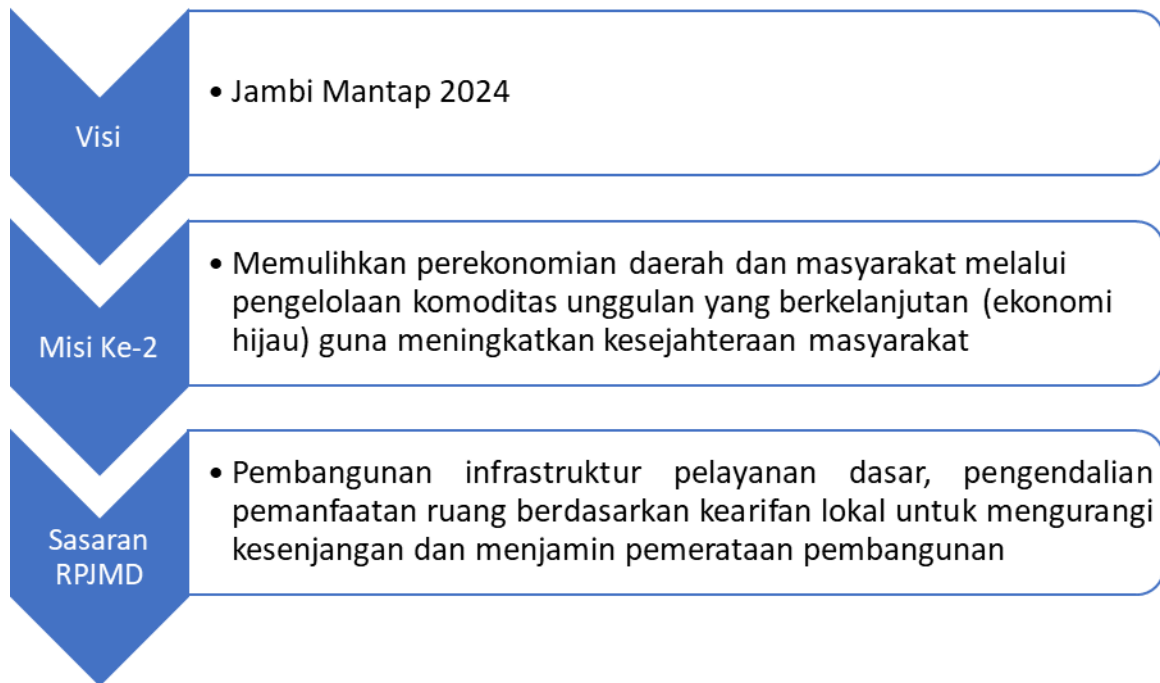
#### 3.5.9. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Terkait dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi, upaya reformasi birokrasi difokuskan untuk pencapaian beberapa hal sebagai berikut:

- a) Peningkatan pelayanan pendidikan
- b) Peningkatan pelayanan kesehatan
- c) Penanganan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan permukiman tangguh bencana,
- d) Penataan ruang yang berdasarkan potensi lokal dan daya dukung lingkungan hidup
- e) Penatagunaan lahan dan penertiban kawasan dan lahan terlantar
- f) Penguatan iklim investasi infrastruktur yang mendukung penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi hijau
- g) Penertiban aktivitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusakkan lingkungan hidup.
- h) Peningkatan kemandirian keuangan daerah.
- i) Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara
- j) Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### **BAB IV. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengacu pada sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi di bidang infrastruktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, keselarasan tujuan OPD terhadap sasaran RPJMD Provinsi Jambi sebagai berikut :



Tujuan adalah penjaran/implementasi dari misi yang akan dicapai dengan mengukur sejauh mana keberhasilan visi dan misi Gubernur. Untuk mencapai pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur dengan pelayanan dasar yang terpadu di Provinsi Jambi agar tercapainya keseimbangan pembangunan antar daerah terutama pada daerah kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, kawasan khusus ekonomi, kawasan khusus pedesaan, kawasan khusus cagar budaya dan kawasan khusus industri
- b) Melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan pemanfaatan ruang wilayah serta prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Provinsi Jambi.

- c) Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antar kawasan di Provinsi Jambi guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik bagi penguatan daya saing daerah yang berfokus pada keterpaduan konektivitas wilayah
- d) Melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia.
- e) Melakukan tata kelola sumber daya organisasi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdiri dari sumber daya manusia, pengendalian, pengawasan, kesekretariatan serta pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dengan gambaran yang akan dihasilkan dalam waktu 5 tahun dan dialokasikan setiap tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan dengan suatu rencana kinerja. Sasaran yang diperlukan harus memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi kegiatan atau operasional setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun. Adapun sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebagai berikut :

- a) Peningkatan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran bidang infrastruktur
- b) Peningkatan keterpaduan pembangunan infrastruktur antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan dari kabupaten, kecamatan dan desa
- c) Terjadinya keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air dengan sasaran lahan produktif pertanian dan pangan
- d) Melakukan upaya pembangunan yang berwawaskan lingkungan di Provinsi Jambi
- e) Meningkatnya persentase kondisi jalan mantap di Provinsi Jambi
- f) Peningkatan kualitas dalam pembangunan infrastruktur permukiman
- g) Terjadinya integrasi rencana tata ruang dan wilayah pada berbagai sektor strategis pembangunan

- h) Peningkatan kinerja pembangunan infrastruktur dengan melakukan optimalisasi kinerja laboratorium teknik dan ditunjang dengan peran penting alat kerja mekanis yang moderen termasuk didalamnya alat berat dan sarana mobilitas lapangan yang menunjang kinerja
- i) Peningkatan kinerja organisasi internal melalui optimalisasi dan maksimalisasi peran unit pelaksana teknis sebagai ujung tombak yang memiliki fungsi pelaksana teknis lapangan dibidang keciptakaryaan, kebinamargaan, tata ruang dan pengairan

Tabel 23. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD (Indikator Kinerja Utama/IKU Renstra Tahun 2021-2026)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi kinerja Akhir Periode Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Menyelenggarakan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	79,60 %	83,23 %	85,32 %	87,83 %	90,02 %	90,02%
2.	Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	39,38 %	49,61 %	63,45 %	75,48 %	87,52 %	87,52%
			Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi	81,04 %	86,01 %	90,16 %	94,90 %	98,22 %	98,22%

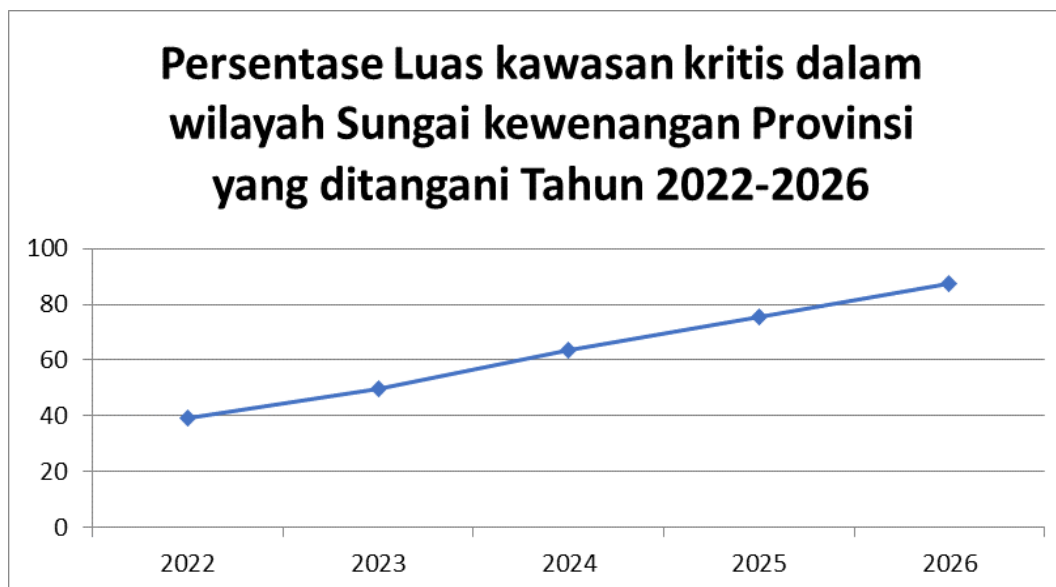


3.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Penurunan lingkungan kumuh	Persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh.	185 Ha	172 Ha	160 Ha	148 Ha	136 Ha	
4.	Terselenggaranya Penataan bangunan gedung	Meningkatnya penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis provinsi	-	25,00 %	37,50 %	37,50 %	37,50 %	37,50%
5.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan tahapan air minum layak, perkotaan dan perdesaan	78,06 %	79,08 %	83,92 %	85,00 %	87,00 %	90,00%
6.	Pengembangan jasa konstruksi	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	Rasio Tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.	40,00 %	47,00 %	54,00 %	61,00 %	68,00 %	68,00%

Berdasarkan table 22 terkait gambaran Pelayanan SKPD terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada gambar 13-18.



Gambar 13. Persentase Target Jalan Mantap Provinsi Jambi Tahun 2022-2026



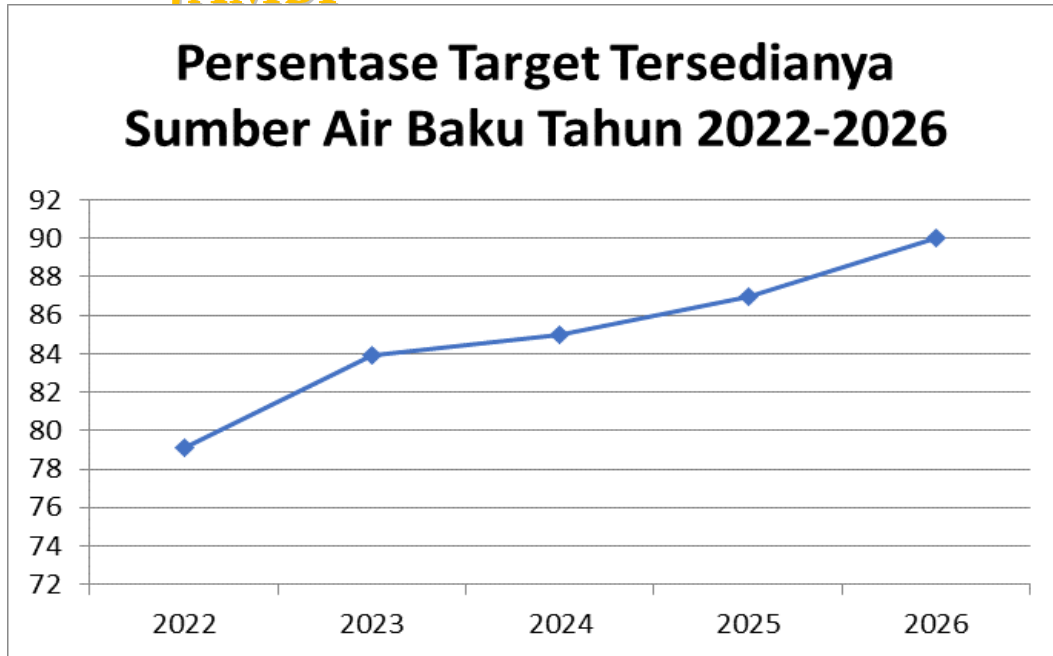
Gambar 14. Persentase Luas Kawasan kritis dalam wilayah Sungai kewenangan Provinsi yang ditangani Tahun 2022-2026



Gambar 15. Persentase Target Luas Baku Daerah Irigasi Yang Terairi Tahun 2022-2026



Gambar 16. Target Luas Penurunan Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2022-2026



Gambar 17. Persentase Target Tersedianya Sumber Air Baku Tahun 2022-2026



Gambar 18. Persentase Angkatan kerja bidang Konstruksi yang disertifikasi Profesi Tahun 2022-2026

## **BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan cara mewujudkan sasaran SKPD agar lebih efektif dan efisien. Keterkaitan antara strategi dan sasaran sangatlah erat, guna dalam penentuan alternative strategi melalui metode pembobotan. Perumusan arah kebijakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berpedoman kepada arah kebijakan yang sudah disusun di dalam Rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang infrastruktur dengan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase dan irigasi, peningkatan efisiensi pemanfaatan ruang, peningkatan aksesibilitas wilayah.

Adapun penjabaran arah kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 1) Penataan pola penanganan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi)
- 2) Memprioritaskan penanganan jalan pada ruas-ruas yang rusak dan rusak berat
- 3) Efektifitas kinerja pemeliharaan rutin jalan
- 4) Peningkatan efisiensi pemanfaatan ruang
- 5) Melakukan pembinaan terkait infrastruktur melalui elatihan, diskusi, seminar dan sosialisasi tentang norma, standar, pedoman, manual serta perkembangan teknologi yang mendukung pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase dan irigasi)

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai target – target sasaran. Adapun kebijakan yang akan di rumuskan untuk 5 (lima) tahun kedepan periode 2021-2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi harus tetap;

1. Mengacu pada misi RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, salah satunya antara lain:

- a) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta berkelanjutan.
  - b) Fokus pada RPJMD Provinsi Jambi tahap 3 yaitu pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat, terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta perkembangan penerapan IPTEK.
2. Mengacu pada kegiatan Strategis dalam RPJMN Tahun 2021 sebagai berikut :
- a) Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
    - Penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai batanghari
    - Peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) batanghari
    - Pembangunan prasarana pengendalian banjir di kab. Batanghari
    - Penanganan Danau Kerinci
    - Kapasitas tampung per kapita
    - Peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan
  - b) Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja yaitu waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)
  - c) Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja :
    - Peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living
    - Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
  - d) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM bidang Vokasi konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
    - Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang ahli dan terampil
    - Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja

- e). Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
- Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR
  - Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif
  - Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur
  - Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR
  - Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis Provinsi (KSP) atau Wilayah Perkotaan
3. Berdasarkan isu strategis nasional dengan fasilitasi pembangunan infrastruktur menunjang pembangunan sebagai berikut :
- a) Mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera
- Batas sumsel (palembang)-Jambi-Batas Riau (pekanbaru). Dimana jalur ini mendukung penguatan simpul jalan toll sumatera yang menghubungkan Sumatera selatan – Jambi – Riau
- b) Akses pendukung Pelabuhan Ujung Jabung
- Kota jambi – Pelabuhan Ujung Jabung. Jalur ini mendukung aktifitas barang dan jasa kawasan ekonomi dan pelabuhan utama.
4. Mengacu pada Arah Pengembangan Pembangunan berdasarkan RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 berdasarkan Perda Nomor :10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033. Salah satunya ;
- a) Pengembangan infrastruktur di pusat kegiatan nasional (PKN):
- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum sesuai kebutuhan masyarakat,
  - Peningkatan TPA regional serta prasarana dan sarana persampahan,
  - Peningkatan dan pengembangan system pengelolaan limbah terpadu melalui pipasaniitasi
  - Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman.

b) Pengembangan infrastruktur dipusat kegiatan local (PKL)

- Prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum, tempat pembuangan akhir sampah, instalasi pengelolaan limbah Tinja
- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan
- Pengembangan prasarana dan sarana permukiman

c). Pengembangan infrastruktur di pusat kegiatan wilayah (PKW)

- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan
- Peningkatan TPA regional serta prasarana dan sarana persampahan
- Peningkatan dan pengembangan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)
- Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman.

5. Mengacu pada Arahan kebijakan misi ke-2 RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 Provinsi Jambi yaitu Memantapkan Kualitas Infrastruktur yang dilakukan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yaitu pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan sebagai berikut :

- a) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar
- b) Peningkatan kuantitas dan ketersediaan irigasi, air bersih dan bendungan
- c) Percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, agama, sosial dan budaya
- d) Percepatan peningkatan penanganan jalan Provinsi (Jalan Simpang Pelawan - Sungai Salak - Pekan Gedang)
- e) Percepatan Penuntasan Jalan Simpang Padang Lamo - Simpang Log pond - batas Provinsi Sumbar
- f) Percepatan fasilitasi pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu
- g) Pembangunan Baru Jembatan Sentano perbatasan Tebo dan Provinsi Riau
- h) Fasilitasi Percepatan Pembangunan jalan tol (Jambi - Rengat) melalui penetapan lokasi jalan tol



- i) Percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang menuju Pelabuhan Ujung Jabung
- j) Fasilitas Percepatan Pembangunan Baru Jalan Khusus
- k) Percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang menuju Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu
- l) Rehabilitasi jalan kewenangan Provinsi yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- m) Peningkatan status jalan Kabupaten dalam status mantap menjadi jalan Provinsi
- n) Peningkatan jalan menuju Pelabuhan Roro Kuala Tungkal
- o) Peningkatan Jalan Tembus Batang Asai – Jangkat
- p) Fasilitas Pembangunan Baru Jembatan Batanghari III
- q) Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan ekonomi baru SENTUSA (Sengeti – Tungkal – Sabak)
- r) Pembangunan Baru Jembatan Sungai Pengabuan
- s) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Batang Uleh, Tanduk dan Sungai Limun Singkut
- t) Percepatan investasi industri aspal berbahan baku kelo dan mendorong penggunaan karet sebagai bahan baku aspal

Tabel 24. Arah Kebijakan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan	1. Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	1. Pemenuhan standar mutu jalan, kuantitas dan kualitas peralatan operasional, serta penanganan pembebasan lahan	1. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan Provinsi terutama akses menuju kawasan strategis provinsi
		2. Persentase Jalan Provinsi menuju kawasan strategis		

		provinsi dalam kondisi mantap		
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.	Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air	<p>1. Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi , rawa, dan pengairan lainnya.</p> <p>2. Meningkatkan pengendalian terhadap daya rusak air.</p>
3	Tersediaannya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	Meningkatkan pemanfaatan sumber air baku	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan air baku
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	<p>1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan</p> <p>2. Persentase Pengurangan luas kawasan kumuh 0%</p>	<p>1. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak.</p> <p>2. Identifikasi data base sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan</p>	<p>1. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman (TPA Regional, Pipa Sanitasi, Dan Pengelolaan Limbah/IPAL)</p> <p>2. Peningkatan ketersediaan akan kebutuhan lingkungan layak huni bagi masyarakat.</p>
5.	Meningkatnya kuantitas angkatan	Persentase angkatan kerja konstruksi yang	Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkatan	Meningkatkan mutu angkatan kerja konstruksi melalui

	kerjakonstruksi yang berkualitas	telah disertifikasi profesi	kerja konstruksi	pelatihan tersertifikasi profesi.
6.	Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah	Persentase Pendapatan Daerah Meningkat	1. Meningkatkan Jasa Pakai Alat Laboratorium  2. Meningkatkan SDM berlisensi (bersertifikasi)	Peningkatan upgrade peralatan laboratorium

## **BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Menurut Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Bab IV Urusan Pemerintahan; Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren; Pasal 12 ayat (2) dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Memiliki 2 (dua) Urusan wajib Pelayanan dasar yaitu :

1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada periode 2021-2026 akan senantiasa memperhatikan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai berikut :

- 1) Tersedianya infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat guna memperlancar roda perekonomian
- 2) Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata
- 3) Menyelesaikan Pembangunan Ruas sehingga kedepan tidak terdapat lagi Ruas Provinsi yang jenis permukaannya masih terdapat lapen, agregat, telford dan tanah diupayakan memiliki jenis perkerasan minimal aspal

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2021-2026 ini lebih digambarkan program/kegiatan prioritas pada bidang – bidang infrastruktur untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

### **a). Bidang Sumber Daya Air**

- 1) Acuan dasar (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Berdasarkan kewenangan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, antara lain :

- Pengelolaan sumber daya air dan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota.
- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000ha – 3000ha.

2) Acuan pada upaya yang dilakukan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dalam percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan, antaranya :

- Fasilitasi percepatan pembangunan Bendungan di Kabupaten Merangin
- Percepatan penuntasan pemanfaatan Irigasi Suban Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Tanduk di Kerinci
- Penuntasan jaringan primer dan sekunder Irigasi Limun Singkut di Kabupaten Sarolangun
- Revitalisasi Irigasi Batang Uleh di Kabupaten Bungo
- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Rawa Sei. Ayam, Sei. Senyerang, Teluk Ketapang, Teluk Nilau, Koto Kandis, Nipah Panjang I-II, Rantau Rasau, Simpang Datuk, Simpang Puding dan Sungai Raya

3) Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Berikut program yang terkait dalam RPJMD Provinsi Jambi yang dimaksud, yaitu :

- Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
- Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
- Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- Pembangunan Bendung Irigasi
- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Bendung Irigasi
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa

4) Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan bidang sumber daya air dapat dilihat pada lampiran 1.

b). Bidang Bina Marga

1) Acuan dasar (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Berdasarkan kewenangan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu Penyelenggaraan jalan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi.

2) Acuan pada upaya yang dilakukan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dalam percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan, antaranya :

- Meningkatkan konektivitas, dengan;
  - a) Percepatan peningkatan penanganan jalan Provinsi (Jalan Simpang Pelawan - Sungai Salak - Pekan Gedang)
  - b) Percepatan Penuntasan Jalan Simpang Padang Lamo - Simpang Log pond - batas Provinsi Sumbar

- c) Pembangunan Baru Jembatan Sentano perbatasan Tebo dan Provinsi Riau;
- d) Fasilitas Percepatan Pembangunan jalan tol (Jambi - Rengat) melalui penetapan lokasi jalan tol
- e) Percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang menuju Pelabuhan Ujung Jabung
- f) Fasilitas Percepatan Pembangunan Baru Jalan Khusus
- g) Peningkatan status jalan Kabupaten dalam status mantap menjadi jalan Provinsi
- h) Peningkatan Jalan Tembus Batang Asai – Jangkat
- i) Fasilitas Pembangunan Baru Jembatan Batanghari III
- j) Pembangunan Baru Jembatan Sungai Pengabuan;
- Pengurangan indeks resiko bencana, dengan;  
  
Mendorong pembangunan jalan evakuasi bencana di Kabupaten Sarolangun, Merangin Kerinci sebagai upaya dalam mitigasi bencana, rencana pembangunan jalur evakuasi di wilayah Provinsi Jambi.

### 3) Program/Kegiatan Prioritas

Untuk spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud :

- Program Penyelenggaraan Jalan
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan
- Pengelolaan Leger Jalan
- Survey kondisi jalan dan jembatan yang harus lakukan setiap tahun

- Pembangunan Jalan
- Pelebaran Jalan Menuju Standar
- Pelebaran Jalan Menambah Lajur
- Rekonstruksi Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi
- Pembangunan Jembatan
- Pembangunan Flyover
- Penggantian Jembatan
- Pelebaran Jembatan
- Rehabilitasi Jembatan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Pemeliharaan Berkala Jembatan
- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- Pengawasan Teknik Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

Untuk mencapai program/kegiatan diatas diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

- Rencana terkait dengan jalan mantap akan dilakukan dengan sistem kontrak long segment sehingga jalan-jalan yang rusak bisa ditangani lebih panjang. Kontrak long segment tersebut akan melihat prioritas penanganan seluruh/sepanjang ruas jalan baik efektif maupun fungsional. Long segment merupakan penanganan preservasi jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus (bisa lebih dari satu ruas) yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi jalan yang seragam yaitu jalan mantap dan standar sepanjang segmen.
- Program/kegiatan prioritas untuk 3 tahun kedepan yaitu penanganan jalan kewenangan provinsi yang rusak ringan dan rusak berat



- Program/kegiatan prioritas untuk 3 tahun kedepan yaitu penanganan jalan kewenangan provinsi yang rusak ringan dan rusak berat, diantaranya;
  - a) Pembangunan jalan Desa Simpang - Ujung Jabung sehingga dapat mendukung peningkatan ekonomi Ujung Jabung, Kemingking dan Candi Muaro Jambi
  - b) Pembangunan jalan Suak Kandis - Desa Simpang sehingga dapat mendukung peningkatan ekonomi Ujung Jabung, Kemingking dan Candi Muaro Jambi
  - c) Pelebaran jalan diruas jalan Sei. Duren - Sei. Buluh, ruas jalan Tempino - Muara Bulian mendukung peningkatan ekonomi Geopark menuju destinasi wisata dunia (UNESCO)
  - d) Pelebaran jalan diruas jalan Desa Simpang/Berbak - Simp. Jembatan Ma. Sabak mendukung peningkatan ekonomi Ujung Jabung, Kemingking dan Candi Muaro Jambi
  - e) Pelebaran jalan diruas jalan Simp. Sawmil - Simp. Logpon mendukung kawasan transmigrasi ex Bathin III Ulu
  - f) Rekontruksi jalan Simp. Lagan - Sp. Zona Lima (Sp. Palabi) mendukung akses penunjang pertumbuhan ekonomi Ujung Jabung
  - g) Rekontruksi jalan Simp. Talang Pudak - Suak Kandis guna mendukung akses peningkatan ekonomi Ujung Jabung, Kemingking dan Candi Muaro Jambi
  - h) Rekontruksi jalan Simp. Pauh - Air Hitam mendukung peningkatan ekonomi Geopark menuju destinasi wisata dunia (UNESCO)
  - i) Rekontruksi jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam untuk mendukung peningkatan ekonomi Geopark menuju destinasi wisata dunia (UNESCO)
  - j) Rekontruksi jalan di ruas jalan Raden Mattaher - Jln. M. Husni Thamrin, Jl. Abdul Kartawirana, Jl. Rangkayo Hitam - Jl. Rangkayo Pingai - Jl. Sentot Alibasa, Jl. Dr. Sutomo, Jl. DR. Setia Budi - Jln. KH. Hasim Ashari - Jln. Pangeran Diponegoro, Jln. Kol. Polisi M.

Taher - Jln. GR. Djamin DT. Bagindo - Jln. Kol. Pol. Ahmad Bestari - Jln. Brigjend. Katamso, Jln. Hos Cokro Aminoto, Jln. Slamet Riyadi - Jln. Urip Sumoharjo, Jln. Prof. Dr. Sri Soedewi, Ms - Jln. Yusuf Singedekane- Jln. H. A. Manap - Jl. Arif Rahman Hakim, Jln. RE. Martadinata - Jln. Jend. A. Yani - Jl. Jend MT. Haryono, Jl. Ade Irma Suryani - Jl. Dr. Siwabesi - Jl. KH. Abdul Malik Jambi, Jln. Abdul Rahman Saleh, Jln. Kapt. Pattimura - Jln. Kapten Bakarudin, Jl. R. Siagian - Simp. Alkal - bandara Sultan Thaha Syaifuddin - Lingkar Timur guna mendukung peningkatan ekonomi Kemingking dan Candi Muaro Jambi

k) Pemeliharaan berkala jalan Ma. Bungo – Peninjauan – Junction, Jln. Peninjauan – Lubuk Mengkuang guna mendukung kawasan transmigrasi ex Bathin III Ulu.

l) Pemeliharaan rutin jalan di Kab. Tanjung Jabung Barat, Jln. Kab. Tanjung Jabung Timur, Jln. Kab. Muaro jambi, Jln. Kabupaten Batanghari, Jln. Kab. Sarolangun, Jln. Kab. Tebo, Jln. Kab. Bungo, Jln. Kab, Merangin guna mendukung kawasan peningkatan ekonomi Ujung Jabung, Kemingking, Candi, Geopark dan Bathin III Ulu.

4) Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan bidang bina marga dapat dilihat pada lampiran 2.

c). Bidang Cipta Karya

1) Acuan dasar (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas daerah kabupaten/kota.
- Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota.
- Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi

- Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
  - Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kab/kota.
  - Penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas 10 ha – 15 ha.
- 2) Acuan pada upaya yang dilakukan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dalam percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan, antaranya :
- Pembangunan Islamic Center
  - Pembangunan Jambi Sport Center
  - Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat
  - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi MBR
  - Penyediaan Air Minum Layak
  - Pembentukan Pengembangan dan Pembinaan BPSPAM
  - Pembangunan Sistem Air Minum
  - Pembangunan IPAL
  - Pembangunan TPA Regional
- 3) Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :

- Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku
- Program pengendalian daya rusak air, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

- Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman.
- Program Lingkungan Sehat
- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

4) Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan bidang cipta karya dapat dilihat pada lampiran 3.

d). Bidang Perumahan

1) Acuan dasar (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu :

- Penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman dikawasan strategis daerah provinsi.
- Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
- Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.
- Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

2) Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :

- Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman
- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
  - Pendistribusian dan serah terima rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
  - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
  - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
  - Program Peningkatan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
  - Program Peningkatan Pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3) Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan bidang perumahan dapat dilihat pada lampiran 4.

Selain bidang prioritas, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Juga terdapat bidang/subbidang sebagai penunjang infrastruktur ke-PU-an, antara lain :

e). UPTD Bina Konstruksi dan Pengendalian

- 1) Acuan pada upaya yang dilakukan dalam misi ke 6 (enam) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu keterkaitan dalam pemenuhan mutu angkatan kerja konstruksi yang tersertifikasi profesi untuk mendukung daya saing Sumber Daya Manusia.

2) Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :

- Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

- Penyiapan Instruktur/ Asessor/ Penyelenggaraan Pelatihan
  - Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
  - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
  - Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
  - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
  - Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
  - Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
  - Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
  - Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
  - Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU
  - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
  - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- 3) Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan UPTD Bina Konstruksi dan Pengendalian dapat dilihat pada lampiran 5.

f). UPTD Workshop Dan Peralatan (WDP)

- 1) Acuan pada upaya yang dilakukan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu keterkaitan dalam pengurangan indeks resiko bencana yaitu pemenuhan pengadaan ekskavator atau alat berat lainnya di kecamatan, terutama di daerah rawan bencana longsor dan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Diupayakan penanganan kewenangan jalan provinsi melalui 3 wilayah.

2) Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2021-2026. Berikut program/kegiatan yang terkait yang dimaksud, yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Penyelenggaraan Jalan seperti Rehabilitasi jalan

3) Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan UPTD Workshop Dan Peralatan (WDP) dapat dilihat pada lampiran 6.

g). UPTD Bahan Konstruksi

1) Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2021-2026 pada persentase peningkatan pendapatan/retribusi bidang infrastruktur ke-PU-an dibanding kondisi tahun awal, Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

2) Rencana Kebutuhan Pelatihan tahun 2022 – 2026

- Pelatihan Bidang Ketrampilan Personil Laboratorium
  - Pelatihan Laboratorium Campuran Aspal Panas
  - Pelatihan Laboratorium Beton Ringan (Mortar Ringan)
  - Pelatihan Labotatorium Tanah
  - Pelatihan Laboratorium Beton Tanpa Pemadatan
  - Pelatihan Laboratorium Lapis Pondasi berAgregat
- Pelatihan Peningkatan Pemahaman SNI/ISO 17025 – 2018
  - Pelatihan Pemahaman Sistim Manajemen Laboratorium SNI/ISO 17025 – 2018
  - Pelatihan Audit Internal
  - Pelatihan Kaji Ulang Manajemen
  - Pelatihan K3 Laboratorium
  - Pelatihan Ketidak Pastian Pengukuran

3) Rencana kebutuhan peralatan tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 25. Kebutuhan peralatan tahun 2022-2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS PERALATAN	KEBUTUHAN ALAT
I	<b>LAB. TANAH</b> Pengujian Sempel UDS	- Konsolidasi - Derecsheer - Dail 0.001 mm - Proving ring 2000 Lbs - Proving ring 500 Kg - Proving ring 300 Kg - Mata kor Gravel (tiga Jenis)	1 Unit 2 Unit 12 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs
	Cor Driiing Mesin	- Mata kor Trikon Bid 4" - Kor Singele	1 Pcs 1 Pcs 2 Pcs
II	CBR On Place <b>LAB. ASPAL</b> Aspal Bitumen	- Dongkrak 20 Ton  - Viskositas - Oven Kehilangan Berat - Kadar Parafin - Mata Kor Aspal 4 " - Mesin Kor Mobile	2 Pcs  1 Unit 1 Unit 1 Unit 6 Pcs/thn 1 Set
III	Camp. Aspal Keras <b>LAB. BETON</b> Penujian Beton Keras	- Hammertes - Mata Kor Beton 4" - PAN 90 x 90 x 6 cm - Semi Elektrik Stracker - Send Equivalent Test	2 Pcs 6 Pcs/thn 24 Pcs 1 Unit 2 Unit
IV	Pengujian Pasir <b>LAB. AIR</b>  Pengujian Air Beton	- Ph meter - Water Purification sistim - Sterilizer - Spectrometer - COD Reaktor - Spectrometer COD - Timbangan Analitik	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit
V	<b>PERATAN KANTOR</b>	- AC 2PK - Komputer PC - UPS - Printer - Meja Kerja Ka. Lab - Meja Kerja Staf - Kursi Kerja Staf	4 Unit 6 Unit 12 Unit 12 Unit 1 Unit 24 Unit 24 Pcs



VI	<b>KELISTRIKAN</b>	- Kursi Laboratorium	24 Pcs
		- Lemari Arsif	6 Pcs
VII	<b>GEDUNG LABOR</b>	- Fillingkabinet	6 Pcs
		- Lemari Pakaian (Loker)	24 Unit
VIII	<b>KENDARAAN DINAS</b>	- Penataan Instalasi Listrik	1 Unit
		- Stabilisasi tegangan listrik	1 Unit
VIII	<b>KENDARAAN DINAS</b>	- Perluasan & Penataan ruang labor	LS
		- Pemb. IPAL	1 Unit
VIII	<b>KENDARAAN DINAS</b>	- Interior R. Kepala Lab & Kasi	4 Unit
		- Mobil Kepala Laboratorium	1 Unit
VIII	<b>KENDARAAN DINAS</b>	- Mobil Operasional Laboratorium	1 Unit
		- Kendaraan Dinas Roda Dua	1 Unit

4) Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan UPTD Bahan Konstruksi dapat dilihat pada lampiran 7.

#### h). Bidang Bina Program dan Tata Ruang

1) Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan Program dan Tata ruang dan evaluasi terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan yang sesuai dengan RTRW Provinsi Jambi 2013-2033. Pada RTRW Provinsi Jambi tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi tahun 2013-2033 Provinsi Jambi memiliki 7 kawasan strategis Provinsi yaitu KSP Kota Jambi – Bulian – Sengeti; KSP Perkotaan Muaro Bungo – Muaro Tebo; KSP Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi; KSP Perkotaan Kerinci – Sungai Penuh; KSP Bangko – Sarolangun; KSP Kawasan Candi Muaro Jambi; dan KSP Kawasan Panas Bumi Kerinci – Merangin. Selain itu bidang tata ruang mendorong kegiatan :

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan melalui survei pemetaan

- Program Penyelenggaraan Jalan (Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah)

2) Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Bina Program dan Tata Ruang dapat dilihat pada lampiran 8.

i). Sekretariat

1) Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan Tupoksi sub bagian kesekretariatan yang didukung program/kegiatan penunjang yang lebih bersifat rutin, pemeliharaan, Bintel aparatur, dan pengadaan barang dan jasa.

2) Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat dapat dilihat pada lampiran 9.

## **BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Indikator kinerja Infrastruktur akan menunjukkan bahwa kondisi akhir tahun 2021 (kondisi jalan, jembatan, drainase dan irigasi) sebagai pijakan untuk mencapai kinerja pada akhir RPJMD Provinsi Jambi tahun 2026. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2026, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan – kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu strategis berdasarkan skala prioritas yang ada dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

## **BAB VIII. Penutup**

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan daerah – daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Kemudian pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kab.sarolangun, Kab.Tebo, Kab.Muaro Jambi dan Kab.Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang pembentukan kota sungai penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Prov.Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 kota.

Provinsi Jambi berada pada bagian tengah Pulau Sumatera berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala pada lalu lintas internasional. Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 53.435,92 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas luas daratan 48.989,98 Km<sup>2</sup> dan luas lautan 4.445,94 Km<sup>2</sup> serta dengan panjang garis pantai 223,025 km. Secara geografis wilayah Provinsi Jambi terletak antara 0°74'–2°46,16' Lintang Selatan dan 101°12'–104°44' Bujur Timur. Kondisi topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter di atas permukaan laut (m

dpl) di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat kontur lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat adalah kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Dengan kondisi topografi yang bervariasi sehingga sektor pertanian sangat beragam di Provinsi Jambi mulai dari tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Semua jenis tanaman tersebut dalam proses budidayanya membutuhkan air untuk kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada proses budidaya sampai pascapanen dan pemasaran harus didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung seperti kondisi jalan dan irigasi yang baik.

Infrastruktur yang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia sebagai aspek budidaya dan aspek distribusi untuk mendukung kegiatan perekonomian. Tingkat kebutuhan manusia terhadap infrastruktur sebagai tulang punggung aspek budidaya dan aspek distribusi semakin meningkat seiring dengan semakin ekstensifnya kegiatan produksi dan konsumsi. Untuk kuantitas pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan pengembangan ekonomi suatu wilayah. Semakin banyak infrastruktur yang dalam kondisi baik maka akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dan perekonomian wilayah tersebut.

Dalam laporan pencapaian kegiatan selama periode Renstra ataupun RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi terlihat secara fisik dan keuangan realisasinya cukup berhasil, namun permasalahan yang ditimbulkan harus tetap diperhatikan agar pelaksanaan 5 (lima) tahun selanjutnya dapat terlaksana sesuai dengan visi misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.

Target Untuk Capaian Kegiatan selama periode Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik dan produk ini merupakan laporan pencapaian selama periode Renstra pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.



Saran maupun kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak, sangatlah kami harapkan untuk implementasi laporan kinerja selanjutnya.

Jambi, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Ir. Muhammad Fauzi, MT

NIP. 196403041992031004

Lampiran 1. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Sumber Daya Air

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)											
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03				URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR (SDA)						80,686,423,706		142,302,122,747		193,398,027,207		195,198,027,207		237,966,980,530		
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30.35%	39.38%	59,411,061,262	49.61%	103,556,787,450	63,45%	98,298,027,207	75,48%	134,448,027,207	87,52%	175,166,980,530	87,52%	570,880,883,656
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen		1	520,946,227	2	1,327,456,227	5	5,000,000,000	5	5,000,000,000	2	2,000,000,000	15	13,848,402,454
1	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi	Dokumen		1	193,914,587	2	305,296,587	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	9	1,699,211,174

					Baku	Tanah dan Air Baku	Air Tanah dan Air Baku yang Disusun														
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahan, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahan, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahan, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Dokumen		5	1,438,139,109	16	3,788,139,109	5	3,500,000,000	5	3,500,000,000	5	3,500,000,000	36	15,726,278,218
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen		8	3,731,374,815	4	2,504,413,815	5	3,500,000,000	5	3,500,000,000	5	3,500,000,000	27	16,735,788,630
1	03	02	1.01	05	Pembangunan Bendungan	Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	Bendungan		-	-	-	-	-	-	-	-	1	30,000,000,000	1	30,000,000,000
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit		-	-	-	-	-	-	2	20,000,000,000	2	20,000,000,000	4	40,000,000,000
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik		1	1,004,959,270	9	6,783,446,926	10	7,000,000,000	10	7,500,000,000	10	8,000,000,000	40	30,288,406,196
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM		0.2	34,054,743,903	0.3	43,688,942,000	0.25	30,000,000,000	0.25	35,000,000,000	0.25	40,000,000,000	1	182,743,685,903
1	03	02	1.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit		-	-	-	-	-	-	2	6,000,000,000	2	7,000,000,000	4	13,000,000,000
1	03	02	1.01	12	Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang	KM		-	-	-	-	2	5,000,000,000	1	2,750,000,000	-	-	3	7,750,000,000

							Dibangun														
1	03	02	1.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder / Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit		-	-	-	-	2	10,000,000,000	2	10,000,000,000	2	10,000,000,000	6	30,000,000,000
1	03	02	1.01	17	Pembangunan Breakwater	Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	KM		-	-	0.5	1,456,300,677	1	3,000,000,000	1	3,500,000,000	1	4,000,000,000	4	11,956,300,677
1	03	02	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM		0.03	3,323,667,619	0.1	10,556,300,677	0.1	11,000,000,000	0.1	11,500,000,000	0.1	12,000,000,000	0.43	48,379,968,296
1	03	02	1.01	19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Terbangunnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Unit		-	-	-	-	-	-	1	2,500,000,000	1	2,500,000,000	2	5,000,000,000
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Terehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,000,000,000	2	2,000,000,000
1	03	02	1.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Terehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM		-	-	0.103	250,000,000	0.25	300,000,000	0.25	350,000,000	0.25	400,000,000	1	1,300,000,000
1	03	02	1.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	2	500,000,000	2	500,000,000
1	03	02	1.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Terehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM		-	-	-	-	-	-	2	500,000,000	1	300,000,000	3	800,000,000
1	03	02	1.01	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	KM		-	-	0.03	100,000,000	0.1	250,000,000	0.1	300,000,000	0.1	350,000,000	0.33	1,000,000,000



							yang Direhabilitas i														
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km		3	6,342,999,227	5	12,929,854,677	5	15,000,000,000	5	17,000,000,000	5	20,000,000,000	23	71,272,853,904
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit		2	348,486,677	3	1,281,046,677	3	1,281,046,677	3	1,281,046,677	3	2,000,000,000	14	6,191,626,708
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM		-	-	10	12,956,300,677	1.5	250,000,000	3	300,000,000	3	350,000,000	18	13,856,300,677
1	03	02	1.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM		-	-	-	-	-	-	2	500,000,000	1	300,000,000	3	800,000,000
1	03	02	1.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit		-	-	-	-	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	6	1,200,000,000
1	03	02	1.01	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terpeliharanya Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara	KM		-	-	-	-	0.03	250,000,000	0.1	500,000,000	0.1	500,000,000	0.23	1,250,000,000
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen		3	4,861,981,619	2	789,765,098	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	20	8,651,746,717
1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Lembaga		-	-	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	20	4,000,000,000

						Kewenangan Provinsi	yang Dibina danDiberday akan														
1	03	02	1.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis(Rekom tek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendas i Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen		-	-	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	20	4,000,000,000
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaa n Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasny a	Lembaga		2	3,589,848,209	5	4,166,980,530	5	4,166,980,530	5	4,166,980,530	5	4,166,980,530	22	20,257,770,329
1	03	02	1.02		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>76.90%</b>	<b>78.10%</b>	<b>21,275,362,444</b>	<b>79.38%</b>	<b>38,745,335,297</b>	<b>80.78%</b>	<b>95,100,000,000</b>	<b>82.18%</b>	<b>60,750,000,000</b>	<b>83.68%</b>	<b>62,800,000,000</b>	<b>83.68%</b>	<b>278,670,697,741</b>
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen		19	2,660,151,413	29	6,113,480,210	20	5,000,000,000	15	3,500,000,000	20	5,000,000,000	103	22,273,631,623
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM		-	-	-	-	2	20,000,000,000	2	20,000,000,000	2	20,000,000,000	6	60,000,000,000
1	03	02	1.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung		-	-	-	-	1	30,000,000,000	-	-	-	-	1	30,000,000,000

1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM		0.5	1,695,318,119	0.7	2,421,760,345	2	10,000,000,000	2	10,000,000,000	2	10,000,000,000	7	34,117,078,464
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasin ya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yangDirehab ilitasi	Km		1	1,261,809,619	2	7,820,000,000	2	10,000,000,000	2	12,000,000,000	2	15,000,000,000	9	46,081,809,619
1	03	02	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasin ya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitas i	Bendung		1	699,257,619	-	-	1	5,000,000,000	-	-	-	-	2	5,699,257,619
1	03	02	1.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasin ya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitas i	KM		28	5,435,659,376	57	12,040,886,650	19	3,600,000,000	14	3,000,000,000			118	24,076,546,026
1	03	02	1.02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Terlaksananya Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dikonservasi	Kawasan		-	-	-	-	-	-	1	300,000,000	1	300,000,000	2	600,000,000
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharany a Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasika n dan Dipelihara	KM		39	3,304,224,129	80	4,332,308,813	80	4,500,000,000	80	4,650,000,000	80	4,800,000,000	359	21,586,532,942
1	03	02	1.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Beroperasi dan Terpeliharany a Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasika n dan Dipelihara	KM		558	5,006,963,260	534	4,862,947,370	534	5,000,000,000	534	5,250,000,000	534	5,500,000,000	2,694	25,619,910,630
1	03	02	1.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terlaksananya Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI		-	-	-	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	1,500,000,000
1	03	02	1.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Terpeliharany a Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara	Kawasan		1	1,211,978,909	1	1,153,951,909	1	1,500,000,000	1	1,550,000,000	1	1,700,000,000	5	7,115,930,818

Lampiran 2. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Bina Marga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)											
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				76.81												
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					79.6	799,085,000	83.23	803,043,200	85.32	830,146,240	87.83	824,844,864	90.02	812,107,750	426	4,069,227,054
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, Pengembangan Jaringan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan Teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen		9	16,000,000	9	16,000,000	11	18,400,000	13	19,000,000	14	22,000,000	56	91,400,000
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Lahan untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Dokumen		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen		1	600,000	2	1,200,000	3	2,800,000	2	1,300,000	3	2,800,000	11	8,700,000
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen		2	1,210,000	2	1,355,200	2	1,626,240	2	1,788,864	2	1,967,750	10	7,948,054
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km		13	104,000,000	15	132,000,000	13	119,600,000	16	147,200,000	11	101,200,000	68	604,000,000

1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Meningkatnya Lebar Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Km		13	78,000,000	22	140,800,000	18	115,200,000	16	102,400,000	21	138,600,000	90	575,000,000
1	03	10	1.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Meningkatnya Lebar Jalan Dengan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur	Km		1.7	10,200,000	1	6,000,000	1	6,000,000	2.3	13,800,000	-	-	6	36,000,000
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km		25	210,425,000	29	223,188,000	21	176,720,000	25	206,056,000	23	174,400,000	123	990,789,000
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km		20	66,000,000	20	70,000,000	13	49,400,000	26	104,000,000	25	112,500,000	104	401,900,000
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			675	45,000,000	650	44,500,000	756	55,000,000	812	68,000,000	725	75,000,000	3618	287,500,000
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M		175	61,250,000	360	135,000,000	268	125,000,000	260	132,000,000	-	-	1,063	453,250,000
1	03	10	1.01	13	Pembangunan Flyover	Terbangunnya Flyover	Panjang Flyover yang Dibangun	M		-	-	-	-	389	120,000,000	-	-	-	-	389	120,000,000
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	Tergantinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	M		105	42,000,000	-	-	30	10,200,000	-	-	-	-	135	52,200,000
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi			54	2,000,000	105	2,200,000	95	2,400,000	-	-	-	-	254	6,600,000
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M		28	5,000,000	26	2,600,000	30	2,850,000	32	3,200,000	30	3,200,000	146	16,850,000
1	03	10	1.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			852.1	6,000,000	338	4,800,000	285	2,450,000	35	2,550,000	300.5	2,550,000	1,810.60	18,350,000
1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terpantaunya dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen		2	400,000	2	400,000	2	500,000	2	550,000	2	550,000	10	2,400,000
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			14	146,000,000	14	18,000,000	15	17,000,000	16	18,000,000	15	172,340,000	74	371,340,000

Lampiran 3. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Cipta Karya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 1.000,-)											
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota						4,750,000		4,000,000		105,000,000		31,000,000		80,000,000		224,750,000
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dokumen		2	2,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	5	5,000,000
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Perbaikan SPAM	Terselenggaranya supervisi dalam Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM Regional	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM Regional	Dokumen		1	2,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	-	-	3	4,000,000
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Terbangunnya SPAM Regional	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik		-	-	-	-	150	80,000,000	150	30,000,000	150	75,000,000	450	185,000,000
1	03	03	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerjasama antar Penyelenggara SPAM	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	Kab/Kota		-	-	1	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000
1	03	03	1.01	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Meningkatnya kelembagaan pelaksana penyelenggaraan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	Kab/Kota		-	-	-	-	1	2,000,000	-	-	-	-	1	2,000,000
1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Beroperasi dan Terpeliharanya SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,000,000	1	3,000,000

							dan terpelihara														
1	03	03	1.01	10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pengembang an SPAM Lintas Kabupaten/ Kota	Dokumen		1	750,000	1	1,000,000	-	-	-	-	1	1,000,000	3	2,750,000
1	03	03	1.01	11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembang an SPAM Lintas Kabupaten/ Kota	Ha		-	-	-	-	10	20,000,000	-	-	1	1,000,000	11	21,000,000
1	03	03	1.01	12	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Terbentuknya Badan Usaha Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM yang dibentuk	Badan Usaha		-	-	-	-	1	1,000,000	-	-	-	-	1	1,000,000
1	03	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																
1	03	4	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						3,850,000		77,900,000		59,750,000		30,900,000		25,900,000		198,300,000
1	03	4	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SP A Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen		4	2,550,000	9	7,750,000	7	6,800,000	-	-	-	-	20	17,100,000
1	03	4	1.01	02	Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembanguna n/Rehabilitas i/Peningkata n TPA/TPS/SP A Kewenangan Provinsi	Dokumen		-	-	3	1,350,000	3	1,650,000	-	-	-	-	6	3,000,000



1	03	4	1.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Terbangunnya TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/ SPA Kewenangan Provinsi	Rumah Tangga		-	-	8000	67,500,000	8000	50,000,000	4000	30,000,000	4000	20,000,000	24000	167,500,000
1	03	4	1.01	06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000
1	03	4	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/ Kota	Dokumen		2	800,000	2	800,000	2	800,000	1	400,000	1	400,000	8	3,200,000
1	03	4	1.01	08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Terlaksananya Pembinaan Teknis danPemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan bagi Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok Masyarakat		2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	10	2,500,000
1	03	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																
1	03	5	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						500,000		13,900,000		45,404,300		24,404,300		24,404,300		108,612,900
1	03	5	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Dokumen		1	500,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	49	40,500,000
1	03	5	1.01	02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan	Unit		-	-	101	2,000,000	101	2,000,000	101	2,000,000	101	2,000,000	404	8,000,000



1	03	5	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga		-	-	-	-	4600	30,004,000	4600	10,004,000	4600	10,004,000	13800	50,012,000
1	03	5	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen		-	-	-	-	3	1,500,300	3	500,300	3	500,300	9	2,500,900
1	03	5	1.01	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatnya Kapasitas Kelompok Masyarakat dengan melakukan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat		-	-	2	400,000	2	400,000	2	400,000	2	400,000	8	1,600,000
1	03	5	1.01	08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kabupaten/Kota dalam Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/ Kota	Dokumen		-	-	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	8	4,000,000
1	03	5	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit		-	-	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	8	2,000,000
1	03	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																

1	03	6	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan StrategisProvinsi					350,000		63,500,000		60,500,000		60,500,000		60,500,000		245,350,000	
1	03	6	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen		2	350,000	11	11,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	43	41,350,000
1	03	6	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan /Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen		-	-	10	1,500,000	10	1,500,000	10	1,500,000	10	1,500,000	40	6,000,000
1	03	6	1.01	03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	Orang		-	-	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	400	800,000
1	03	6	1.01	04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit		-	-	10	30,000,000	10	30,000,000	10	30,000,000	10	30,000,000	40	120,000,000
1	03	6	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Tersedianya Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Unit		-	-	11	19,000,000	11	17,000,000	11	17,000,000	11	17,000,000	44	70,000,000
1	03	6	1.01	06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit		-	-	9	1,800,000	9	1,800,000	9	1,800,000	9	1,800,000	36	7,200,000

1	03	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN																
1	03	7	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi					22,300,400		25,000,400		30,000,400		20,000,400		25,000,400		122,302,000	
1	03	7	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terbangunnya dan Berkembangnya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Sistem Jaringan		1	22,300,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	5	122,300,000
1	03	7	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	Sistem Jaringan		1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	5	2,000
1	03	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																
1	03	8	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						188,650,000		185,650,000		185,150,000		184,150,000		4,579,250		748,179,250
1	03	8	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan , Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk	Dokumen		11	161,250,000	10	159,250,000	10	159,250,000	10	159,250,000	10	159,250	51	639,159,250

							Kepentingan Strategis Daerah Provinsi															
1	03	8	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit		1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000	5	80,020,000	
1	03	8	1.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Terlaksananya Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembanguna n Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen		2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	10	5,000,000	
1	03	8	1.01	05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Identfikasi dan Penetapan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit		2	2,600,000	2	2,600,000	2	2,100,000	1	1,100,000	1	1,100,000	8	9,500,000	
1	03	8	1.01	08	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelengga raan Bangunan Gedung kepada Penyelengga ra Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang		200	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	208	5,000,000	

1	03	8	1.01	09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Terdaftarnya Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Unit		10	300,000	10	300,000	10	300,000	10	300,000	10	300,000	50	1,500,000
1	03	8	1.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	Dokumen		150	500,000	150	500,000	150	500,000	150	500,000	150	500,000	750	2,500,000
1	03	8	1.01	11	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Tersedianya Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	Dokumen		51	2,000,000	50	1,000,000	50	1,000,000	25	1,000,000	50	500,000	226	5,500,000
1	03	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																
1	03	9	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						85,800,000		52,500,000		52,000,000		27,000,000		27,000,000		244,300,000
1	03	9	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	Dokumen		-	-	1	1,500,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	4,500,000
1	03	9	1.01	01	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional	Kawasan		4	84,800,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	12	234,800,000

							Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
1	03	9	1.01	06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Dokumen		1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	5	2,500,000
1	03	9	1.01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan / Pemeliharaa n Bangunan dan Lingkungan	Dokumen		1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	5	2,500,000

Lampiran 4. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Perumahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)											
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						100,000		650,000		475,000		650,000		475,000		2,250,000
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen		1	100,000	3	275,000	2	200,000	3	275,000	3	200,000	12	1,050,000
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen		-	-	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	4	300,000
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakann Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen		-	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	-	-	3	300,000
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi korban Bencana Alam atau terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang terkena Relokasi Program Provinsi	Jumla'h Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi korban Bencana atau yang terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen		-	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	4	400,000
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen		-	-	1	100,000	-	-	1	100,000	1	100,000	3	300,000

1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					75,000		540,000		540,000		540,000		540,000		2,235,000	
1	04	02	1.02	02	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan \Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang		50	75,000	50	90,000	50	90,000	50	90,000	50	90,000	250	435,000
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi tentang mekanisme penggantian Hak atas Tanag dan bangunan	Tersosialisasinya mekanisme penggantian Hak atas Tanag dan Bangunan	Jumkah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang		-	-	50	90,000	50	90,000	50	90,000	50	90,000	200	360,000
1	04	02	1.02	04	Sosialisasi Pengembangan PerumahanBaru dan mekanisme Akses Perumahan KPR - FLPP	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR - FLPP	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan mekanisme Akses Perumahan KPR - FLPP	Orang		-	-	50	90,000	50	90,000	50	90,000	50	90,000	200	360,000
1	04	02	1.02	05	pembentukan dan pelatihan Tim Satgas Tim Pemdamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping, Fasilitator	Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	Orang		-	-	50	90,000	50	90,000	50	90,000	50	90,000	200	360,000
1	04	02	1.02	06	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen		-	-	1	90,000	1	90,000	1	90,000	1	90,000	4	360,000
1	04	02	1.02	07	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen		-	-	1	90,000	1	90,000	1	90,000	1	90,000	4	360,000
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi							1,300,000		3,485,000		2,710,000		3,690,000		11,185,000	
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah		-	-	50	1,000,000	49	980,000	50	1,000,000	50	1,000,000	199	3,980,000
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen		-	-	1	300,000	-	-	-	-	-	-	1	300,000
1	04	02	1.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)	Ha		-	-	-	-	1	1,000,000	-	-	-	-	1	1,000,000



1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah		-	-	-	-	28	980,000	32	1,120,000	59	2,065,000	119	4,165,000
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program 'Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah		-	-	-	-	15	525,000	14	490,000	15	525,000	44	1,540,000
1	04	02	1.03	06	Operasional dan Pemeliharaan LingkunganPerumahan pada Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah		-	-	-	-	-	-	15	100,000	15	100,000	30	200,000
1	04	02	1.04		Pendisrubusian dan serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					-	-	-	-	-	-	100	290,000	100	435,000	100	725,000
1	04	02	1.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Laporan		-	-	-	-	-	-	1	150,000	1	225,000	2	375,000
1	04	02	1.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Laporan		-	-	-	-	-	-	1	140,000	1	210,000	2	350,000
01	04	03			Program Kawasan Permukiman																
01	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1,075,000	775,000		1,075,000		1,075,000		1,075,000		5,075,000	
01	04	03	1.01	01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan		1	75,000	2	150,000	2	150,000	2	150,000	2	150,000	9	675,000
01	04	03	1.01	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan		-	-	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	4	300,000
01	04	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran / Peremajaan / Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan		-	-	2	150,000	2	150,000	2	150,000	2	150,000	8	600,000

01	04	03	1.01	04	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan		-	-	-	-	1	75,000	1	75,000	1	75,000	3	225,000
01	04	03	1.01	05	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen		-	-	-	-	1	75,000	1	75,000	1	75,000	3	225,000
01	04	03	1.01	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumu	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumu	Laporan		-	-	-	-	1	75,000	1	75,000	1	75,000	3	225,000
01	04	03	1.01	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima \ Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Progra Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen		-	-	-	-	1	75,000	1	75,000	1	75,000	3	225,000
01	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terleg alisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisas	Dokumen		1	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000
01	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan		-	-	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	4	800,000
01	04	03	1.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dokumen		-	-	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	4	800,000
01	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							15,315,000		27,900,000		27,900,000		27,900,000		27,900,000	

01	04	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersusunnya Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen		2	315,000	2	1,200,000	2	1,200,000	2	1,200,000	2	1,200,000	10	5,115,000
01	04	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan		-	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	4	400,000
01	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah		550	11,000,000	550	11,000,000	550	11,000,000	550	11,000,000	550	11,000,000	2,750	55,000,000
01	04	03	1.02	04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen		-	-	40	400,000	40	400,000	40	400,000	40	400,000	160	1,600,000
01	04	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan		-	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	4	400,000

01	04	03	1.02	06	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersusunnya Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen		-	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	4	400,000
01	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha		11.44	4,000,000	10.600	15,000,000	10.570	15,000,000	10.570	15,000,000	10.600	15,000,000	54	64,000,000
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						2,025,000		1,150,962		1,612,500		1,962,981		2,410,818		9,162,261
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen		2	2,000,000	2	692,308	2	1,000,000	2	1,346,154	2	1,788,462	10	6,826,924
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi		104	25,000	36	8,654	52	12,500	70	16,827	93	22,356	355	85,337
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan		-	-	1	150,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	4	750,000
1	04	05	1.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan		-	-	1	150,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	4	750,000
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen		-	-	1	150,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	4	750,000

1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	04	06	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah							200,000		300,000		400,000		500,000		1,400,000	
1	04	06	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan		-	-	1	200,000	1	300,000	1	400,000	1	500,000	4	1,400,000

Lampiran 5. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Bina Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)											
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						9,600,000	13,000,000	13,400,000	13,450,000	12,900,000	62,350,000					
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						5,250,000	6,050,000	6,500,000	6,850,000	6,950,000	31,600,000					
1	03	11	1.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tersedianya Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen		1	120,000	1	150,000	1	150,000	1	170,000	1	170,000	5	760,000
1	03	11	1.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Tersedianya Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Orang		75	1,230,000	75	1,400,000	75	1,600,000	75	1,730,000	75	1,780,000	375	7,740,000
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Orang		120	1,800,000	120	2,000,000	120	2,150,000	120	2,230,000	120	2,280,000	600	10,460,000
1	03	11	1.01	05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Dokumen		1	400000	2	450000	3	500000	3	550000	3	550000	12	2,450,000
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	Orang		0	600,000	40	650,000	40	700,000	40	750,000	40	750,000	160	3,450,000
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan	orang		75	1,000,000	75	1,250,000	75	1,250,000	75	1,270,000	75	1,270,000	375	6,040,000



					Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Konstruksi	Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
1	03	11	1.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen		1	100,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	5	700,000
1	03	11	1.02		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>						<b>3,450,000</b>		<b>3,700,000</b>		<b>3,400,000</b>		<b>3,100,000</b>		<b>2,450,000</b>		<b>16,100,000</b>
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan		1	650,000	1	700,000	1	650,000	1	650,000	1	650,000	5	3,300,000
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen		1	1,000,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	300,000	5	2,050,000
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Orang		25	1,000,000	60	1,250,000	60	1,000,000	75	1,000,000	75	1,000,000	295	5,250,000
1	03	11	1.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Tersedianya Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Infromasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	Dokumen		1	300,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	700,000	0		4	3,000,000
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen		1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	5	2,500,000
			1.03		<b>Kebijakan khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>	<b>Terselenggaranya kebikan khusus terhadap penyelenggaran konstruksi</b>					<b>900,000</b>		<b>3,250,000</b>		<b>3,500,000</b>		<b>3,500,000</b>		<b>3,500,000</b>		<b>14,650,000</b>
1	03	1	1.03	01	Penyiapan / Pembuatan NSPK kebijakan Khusus Penyelenggara Jasa Konstruksi sesuai peraturan Perundang-undangan	Tersedianya NSPK kebijakan khusus Penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah NSPK kebijakan khusus Penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan	Dokumen		1	500,000	3	2,000,000	3	2,000,000	3	1,500,000	3	1,500,000	13	7,500,000
1	03	1	1.03	02	Pengawasan dan evaluasi tertib usaha, Tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada APBD Provinsi	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dam tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada APBD Provinsi	Dokumen		1	200,000	2	500,000	2	500,000	3	1,000,000	3	1,000,000	11	3,200,000

1	03	1	1.03	03	Pengawasan dan evaluasi tertib usaaha, Tertib pengelenggaran, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada Lintas Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib pengelenggaran dan tertib pemanfaatan jasa Konstruksi pada lintas Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaran, dam tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada Lintas Kab/Kota	Dokumen		1	200,000	3	750,000	3	1,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	13	3,950,000
---	----	---	------	----	---	---	---	---------	--	---	---------	---	---------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	----	-----------



Lampiran 6. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan UPTD Workshop Dan Peralatan (WDP)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)											
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15,510,133		33,061,146		35,767,259		38,643,983		41,658,375		164,640,897
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,605,124		1,765,637		1,942,201		2,136,421		2,350,063		9,799,447
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1	1,605,124	1	1,765,637	1	1,942,201	1	2,136,421	1	2,350,063	5	9,799,447
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						3,197,015		3,516,717		3,868,387		4,255,226		4,630,748		19,468,095
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	38,863	1	42,749	1	47,024	1	51,726	1	56,899	5	237,263
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	2,845,946	1	3,130,541	1	3,443,595	1	3,787,954	1	4,116,750	5	17,324,788
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	44,172	1	48,590	1	53,449	1	58,793	1	64,673	5	269,679

1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		150	268,033	150	294,836	150	324,319	150	356,750	150	392,425	750	1,636,365
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					822,341		904,575		995,033		1,094,535		1,203,987		5,020,473	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	7,000	1	7,700	1	8,470	1	9,317	1	10,248	5	42,735
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	116,226	1	127,848	1	140,633	1	154,695	1	170,164	5	709,566
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		25	699,115	27	769,027	29	845,930	32	930,523	34	1,023,575	147	4,268,171
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,965,605		3,262,166		3,588,383		3,947,221		4,341,940		18,105,317	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		53	2,651,761	54	2,916,937	54	3,208,631	54	3,529,494	54	3,882,442	269
1	03	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		53	313,844	54	345,228	54	379,751	54	417,726	54	459,498	269	1,916,049
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																

1	03	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		1	1,417,786	2	2,835,572	2	3,119,129	2	3,431,042	2	3,774,146	9	14,577,675
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3	1,500,000	3	1,500,000	3	1,500,000	3	1,500,000	3	1,500,000	15	7,500,000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						6,920,044		23,612,049		25,373,254		27,210,579		29,131,636		112,247,563
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM		400	6,920,044	400	23,612,049	400	25,373,254	400	27,210,579	400	29,131,636	2000	112,247,563

Lampiran 7. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)											
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						3,656,099,600		4,185,000,000		4,850,000,000		5,255,000,000		5,610,000,000		23,556,099,600
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						424,813,600		500,000,000		550,000,000		550,000,000		600,000,000		2,624,813,600
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		50	424,813,600	50	500,000,000	50	550,000,000	50	550,000,000	50	600,000,000	250	2,624,813,600
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						229,097,672		285,000,000		300,000,000		305,000,000		310,000,000		1,429,097,672
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		35	51,809,492	40	85,000,000	40	90,000,000	45	90,000,000	45	90,000,000	205	406,809,492
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	100,274,100	12	120,000,000	12	125,000,000	12	125,000,000	12	130,000,000	60	600,274,100
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan		12	77,014,080	12	80,000,000	12	85,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	60	422,014,080

						Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu														
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					804,909,128		1,000,000,000		1,500,000,000		1,800,000,000		2,000,000,000		7,104,909,128	
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		7	804,909,128	7	1,000,000,000	7	1,500,000,000	7	1,800,000,000	7	2,000,000,000	35	7,104,909,128
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,197,279,200		2,400,000,000		2,500,000,000		2,600,000,000		2,700,000,000		12,397,279,200	
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		7	2,197,279,200	7	2,400,000,000	7	2,500,000,000	7	2,600,000,000	7	2,700,000,000	35	12,397,279,200

Lampiran 8. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Bina Program dan Tata Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)											
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2,957,938		2,799,825		3,149,811		3,425,855		3,733,608		16,067,037
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,957,938		2,799,825		3,149,811		3,425,855		3,733,608		16,067,037
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3	490,766	3	800,000	3	835,600	3	890,876	3	1,112,398	3	4,129,640
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		9	135,800	9	147,500	9	165,800	9	175,390	9	198,500	9	822,990
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		9	95,243	9	180,400	9	213,200	9	225,200	9	235,789	9	949,832
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		9	997,074	9	200,200	9	235,700	9	255,700	9	265,400	9	1,954,074
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		9	165,300	9	185,300	9	200,255	9	236,809	9	240,989	9	1,028,653
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dokumen		2	273,630	2	350,825	2	375,800	3	405,900	3	423,752	3	1,829,907

							Realisasi Kinerja SKPD														
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		2	800,125	2	935,600	2	1,123,456	3	1,235,980	3	1,256,780	3	5,351,941
1	03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>						<b>5,250.000</b>		<b>3,650.000</b>		<b>2,650.000</b>		<b>2,650.000</b>		<b>4,950.000</b>		<b>19,150.000</b>
1	03	12	1.01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>						<b>2,750.000</b>		<b>1,750.000</b>		<b>750.000</b>		<b>750.000</b>		<b>2,750.000</b>		<b>8,750.000</b>
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen		1	2,000.000	1	1,000.000	-	-	-	-	1	2,000.000	3	5,000.000
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen		1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	5	1,250.000
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen		2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	10	2,500.000
1	03	12	1.02		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>						<b>1,200.000</b>		<b>900.000</b>		<b>900.000</b>		<b>900.000</b>		<b>1,200.000</b>		<b>5,100.000</b>
1	03	12	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen		1	300.000	1	300.000	-	-	-	-	1	300.000	3	900.000
1	03	12	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Dokumen		1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	5	1,500.000
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen		1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	5	1,500.000
1	03	12	1.02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Dokumen		1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	5	1,500.000
1	03	12	1.03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>						<b>750.000</b>		<b>450.000</b>		<b>450.000</b>		<b>450.000</b>		<b>450.000</b>		<b>2,550.000</b>

1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen		1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	5	1,250.000
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen		1	500.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	5	1,300.000
1	03	12	1.04		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi</b>						<b>550.000</b>		<b>550.000</b>		<b>550.000</b>		<b>550.000</b>		<b>550.000</b>		<b>2,750.000</b>
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen		1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	5	1,250.000
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen		1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	5	1,250.000
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus		1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	5	1,500.000
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen		1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	5	1,250.000



Lampiran 9. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)											
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						43,790,839		48,851,400		54,274,658		338,545,834		372,571,351		858,034,081
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,957,938		2,799,825		3,149,811		3,425,855		3,733,608		16,067,037
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3	490,766	3	800,000	3	835,600	3	890,876	3	1,112,398	15	4,129,640
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		9	135,800	9	147,500	9	165,800	9	175,390	9	198,500	45	822,990
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		9	95,243	9	180,400	9	213,200	9	225,200	9	235,789	45	949,832
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		9	997,074	9	200,200	9	235,700	9	255,700	9	265,400	45	1,954,074
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen		9	165,300	9	185,300	9	200,255	9	236,809	9	240,989	45	1,028,653

							Perubahan DPA-SKPD														
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		2	273,630	2	350,825	2	375,800	3	405,900	3	423,752	12	1,829,907
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		2	800,125	2	935,600	2	1,123,456	3	1,235,980	3	1,256,780	12	5,351,941
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						32,206,802		35,858,200		39,607,345		43,580,220		48,097,690		199,350,257
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		260	31,237,983	270	34,870,000	280	38,357,000	290	42,192,700	300	46,411,970	1400	193,069,653
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1	968,819	1	988,200	1	1,250,345	1	1,387,520	1	1,685,720	5	6,280,604
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		1	263,823	1	275,800	1	297,850	1	305,822	1	342,500	5	1,485,795
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						548,283		603,112		663,423		729,765		802,742		3,347,325
1	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2	231,000	2	254,100	2	279,510	2	307,461	2	338,207	10	1,410,278
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		3	317,283	3	349,012	3	383,913	3	422,304	3	464,535	15	1,937,047
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						931,485		1,075,500		1,120,560		1,335,700		1,610,400		6,073,645
1	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1	165,100	1	185,500	1	200,560	1	210,500	1	235,600	5	997,260
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		15	766,385	25	890,000	30	920,000	35	1,125,200	40	1,374,800	145	5,076,385
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,960,916		2,025,080		2,539,813		2,714,800		3,041,341		12,281,950
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4	186,482	4	205,130	4	225,643	4	248,208	4	273,028	20	1,138,491

1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	314,545	1	50,520	1	68,520	1	78,900	1	97,800	5	610,285
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		3	774,771	3	898,700	3	1,288,700	3	1,389,770	3	1,587,330	15	5,939,271
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1	171,540	1	185,500	1	198,750	1	212,582	1	225,983	5	994,355
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	513,578	1	685,230	1	758,200	1	785,340	1	857,200	5	3,599,548
1	03	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1	53,500	1	85,400	1	98,600	1	1,185,200	1	1,259,880	5	2,682,580
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>1.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			Unit			<b>128,092</b>		<b>490,800</b>		<b>610,890</b>		<b>676,150</b>		<b>769,255</b>		<b>2,675,187</b>
1	03	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-	-	2	600,000	-	-	4	1,000,000	-	-	6	1,600,000
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	-	3	800,000	-	-	3	1,500,000	-	-	6	2,300,000
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		-	-	10	15,000	15	20,000	20	25,000	25	30,000	70	90,000
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		26	128,092	28	150,800	32	165,890	33	185,850	35	200,500	154	831,132
1	03	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	3	325000	4	425,000	5	465,300	7	538,755	19	1,754,055
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>3,353,707</b>		<b>3,869,129</b>		<b>4,170,767</b>		<b>4,466,447</b>		<b>4,670,109</b>		<b>20,530,159</b>
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	15,040	1	17,850	1	25,688	1	28,790	1	30,852	5	118,220
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	834,549	1	1,165,557	1	1,195,557	1	1,225,557	1	1,255,557	5	5,676,777
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	167,581	1	185,722	1	198,722	1	224,880	1	258,700	5	1,035,605
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan		2	2,336,537	2	2,500,000	2	2,750,800	2	2,987,220	2	3,125,000	10	13,699,557

							Umum Kantor yang Disediakan														
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,703,616		2,129,754		2,412,049		281,616,897		309,846,206		597,708,521	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		90	1,134,796	90	1,248,276	90	1,373,103	90	1,510,414	90	1,661,455	450	6,928,044
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		90	209,707	90	230,678	90	253,746	90	279,120,683	90	307,032,751	450	586,847,564
1	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3	359,113	5	650,800	5	785,200	6	985,800	6	1,152,000	25	3,932,913
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM																
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi					800,000		800,000		800,000		800,000		800,000		4,000,000	
2	10	03	1.01	1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen		1	800,000	1	800,000	1	800,000	1	800,000	1	800,000	5	4,000,000
2	10	03	7.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi					500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		2,500,000	
2	10	03	7.02	1	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Tersedianya Data Rencana Pengadaan	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah	Dokumen		1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	5	2,500,000

						Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)														
2	10	03	7.03			Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)					500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		2,500,000
2	10	03	7.03	01	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen		1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	5	2,500,000
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						550,000		550,000		550,000		550,000		550,000		2,750,000
2	10	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen		1	350,000	1	350,000	1	350,000	1	350,000	1	350,000	5	1,750,000
2	10	04	1.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara		2	200,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	10	1,000,000
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN																
2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						2,300,000		2,300,000		2,300,000		2,300,000		2,300,000		11,500,000
2	10	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen		2	300,000	2	300,000	2	300,000	2	300,000	2	300,000	10	1,500,000
2	10	05	1.01	02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk	Laporan		1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	5	10,000,000

					Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Provinsi	pembangunan														
2	10	06	1.02		<b>Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						300,000		300,000		300,000		300,000		300,000		1,500,000
2	10	06	1.02	01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	5	750,000
2	10	06	1.02	02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	5	750,000
2	10	07			<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>																
2	10	07	1.01		<b>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						800,000		800,000		800,000		800,000		800,000		4,000,000
2	10	07	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan		1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	5	2,500,000
2	10	07	1.01	02	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi aesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku	Ditetapkannya Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur	Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur	Dokumen		1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	5	1,500,000
2	10	08			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>																
2	10	08	1.01		<b>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</b>						1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		6,000,000
2	10	08	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan		2	600,000	2	600,000	2	600,000	2	600,000	2	600,000	10	3,000,000



2	10	08	1.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong																
2	10	08	1.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi	Laporan		1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	5	1,500,000
2	10	08	1.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen		1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	5	1,500,000
2	10	10			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>																
2	10	10	1.01		<b>Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						<b>1,200,000</b>		<b>1,200,000</b>		<b>1,200,000</b>		<b>1,200,000</b>		<b>1,200,000</b>		<b>6,000,000</b>
2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan		1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	5	1,500,000
2	10	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen		1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	5	1,500,000
2	10	10	1.01	03	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya			1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	5	1,500,000
2	10	10	7.01	04	Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen		1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	5	1,500,000
2	10	10	7.02		<b>Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi</b>						<b>300,000</b>		<b>300,000</b>		<b>300,000</b>		<b>300,000</b>		<b>300,000</b>		<b>1,500,000</b>
2	10	10	7.02	01	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Tersusunnya Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dokumen		1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	5	1,500,000
2	10	12			<b>PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH</b>																
2	10	12	7.01		<b>Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak</b>						<b>500,000</b>		<b>500,000</b>		<b>500,000</b>		<b>500,000</b>		<b>500,000</b>		<b>2,500,000</b>

					atas Tanah Aset Pemerintah																
2	10	12	7.01	01	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	Laporan		10	500,000	10	500,000	10	500,000	10	500,000	10	500,000	50	2,500,000



Lampiran 10. Kawasan Strategis Berdasarkan RTRWN dan RPJMN 2020-2024

## Kawasan Strategis Berdasarkan RTRWN dan RPJMN 2020-2024

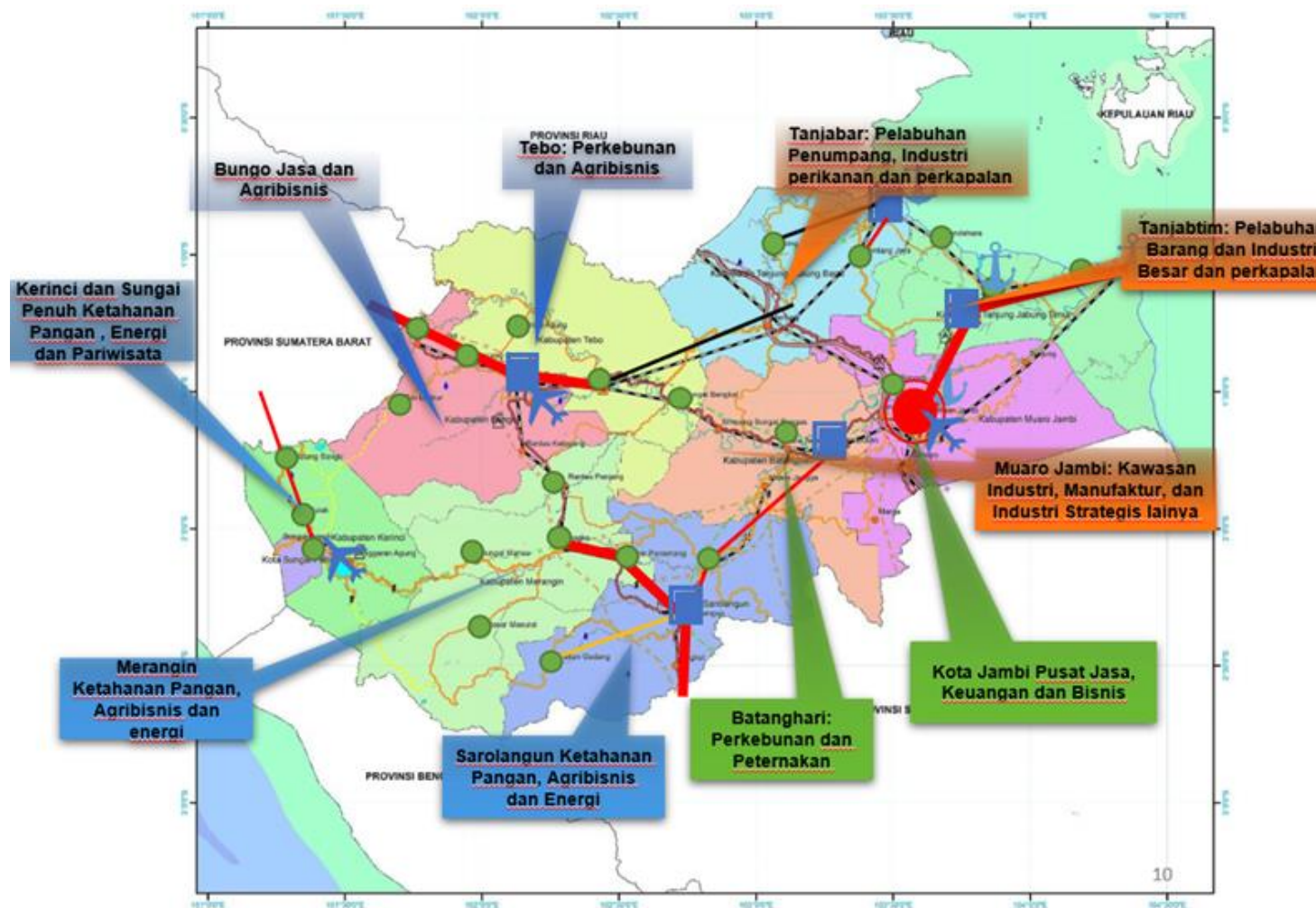
- 1 **Kepentingan Daya Dukung Lingkungan Hidup**
  - TN Kerinci Seblat
  - TN Bukit Tigapuluh
  - TN Bukit Duabelas
  - TN Berbak Sembilang
- 2 **Kepentingan Ekonomi**
  - PKN Jambi
  - KI Ujung Jabung
  - KI Kemingking
  - Kawasan Ex Transmigrasi Bathin III Ulu
- 3 **Kepentingan Sosial Budaya**
  - KSN Percandian Muaro Jambi



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013



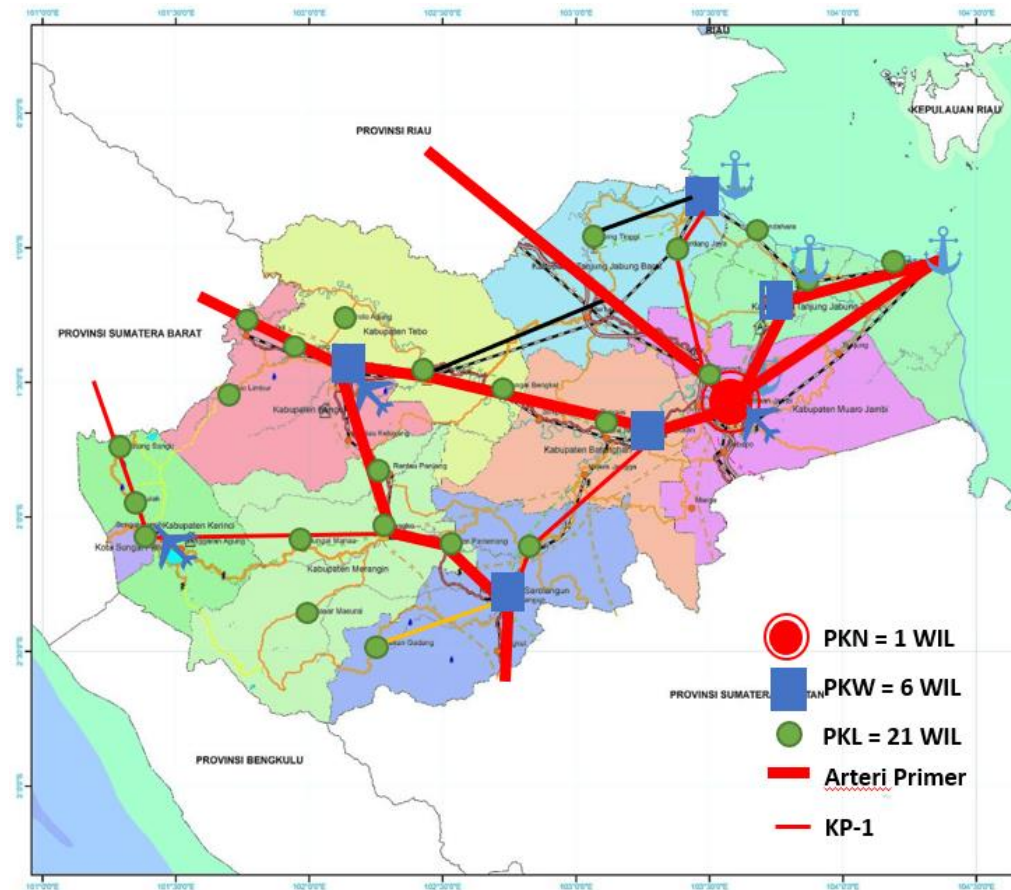
Lampiran 12. Peran dan Fungsi Wilayah Kab/Kota di Provinsi Jambi



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013



Lampiran 13. Rencana Sistem Pusat-pusat Kegiatan

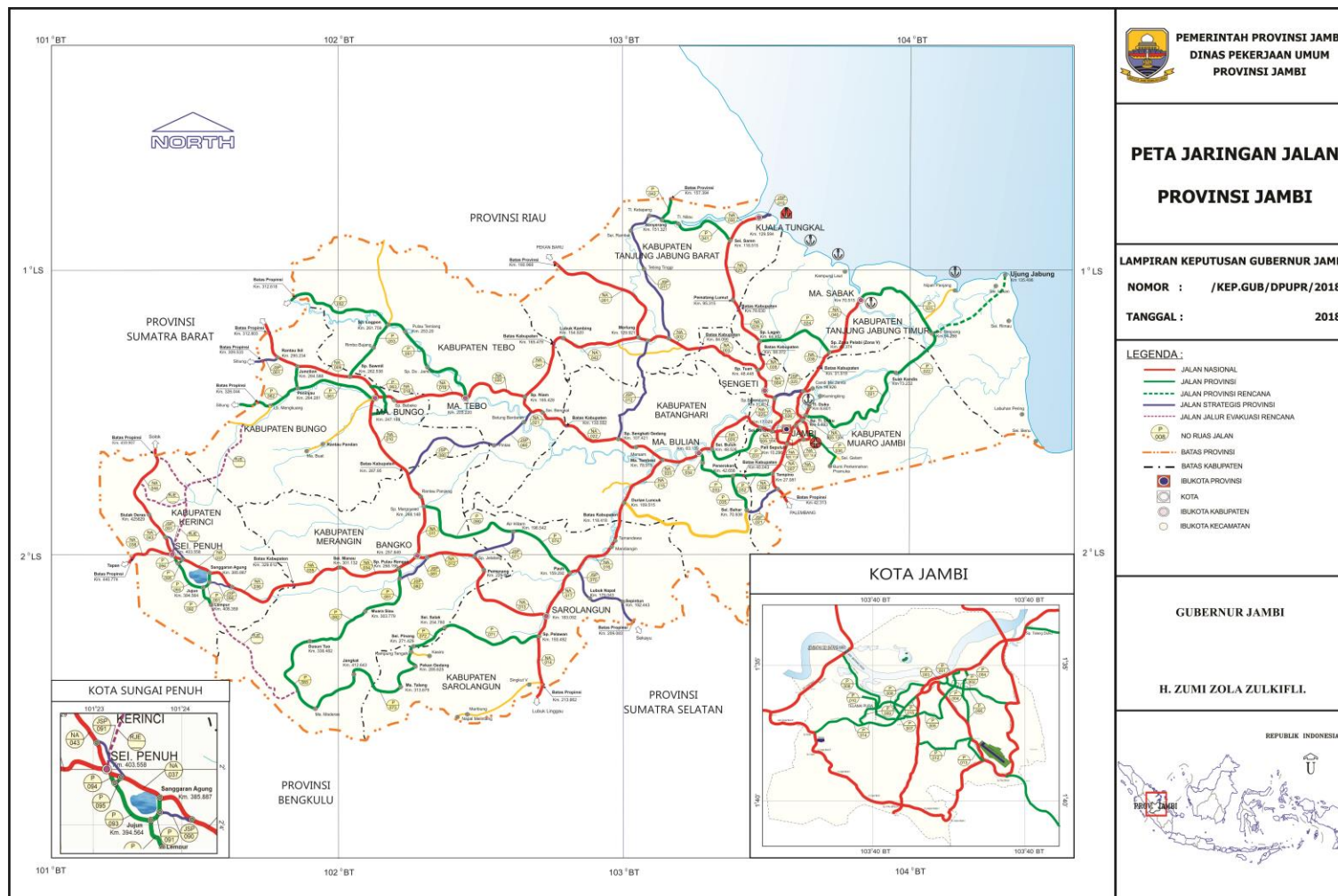


PKN	PKW	PKL
Kawasan perkotaan Jambi	1. Muara Bungo 2. Sarolangun 3. Kuala Tungkal 4. Muara Bulian 5. Muara Sabak	1. Perkotaan Sei.Penuh; 2. Perkotaan Bangko; 3. Perkotaan Sengeti; 4. Perkotaan Ma.Tebo 5. Perkotaan Batang Sangir; 6. Perkotaan Sanggaran Agung; 7. Perkotaan Siulak; 8. Perkotaan Sungai Manau; 9. Perkotaan Pasar Masurai 10. Perkotaan Rantau Panjang; 11. Perkotaan Pasar Pamenang; 12. Perkotaan Pekan Gedang; 13. Perkotaan Singkut; 14. Perkotaan Pauh; 15. Perkotaan Rantau Kelayang; 16. Perkotaan Embacang Gedang; 17. Perkotaan Tuo Limbur; 18. Perkotaan Rantau Ikil; 19. Perkotaan Wirotto Agung; 20. Perkotaan Sungai Bengkal; 21. Perkotaan Simpang Sungai Rengas; 22. Perkotaan Muara Tembesi; 23. Perkotaan Muara Jangga ; 24. Perkotaan Pijoan; 25. Perkotaan Sebapo; 26. Perkotaan Marga; 27. Perkotaan Tanjung; 28. Perkotaan Merlung; 29. Perkotaan Tebing Tinggi; 30. Perkotaan Serdang Jaya; 31. Perkotaan Mendahara; 32. Perkotaan Nipah Panjang; dan 33. Perkotaan Pandan Jaya

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013



Lampiran 15. Jalan Kewenangan Provinsi Jambi

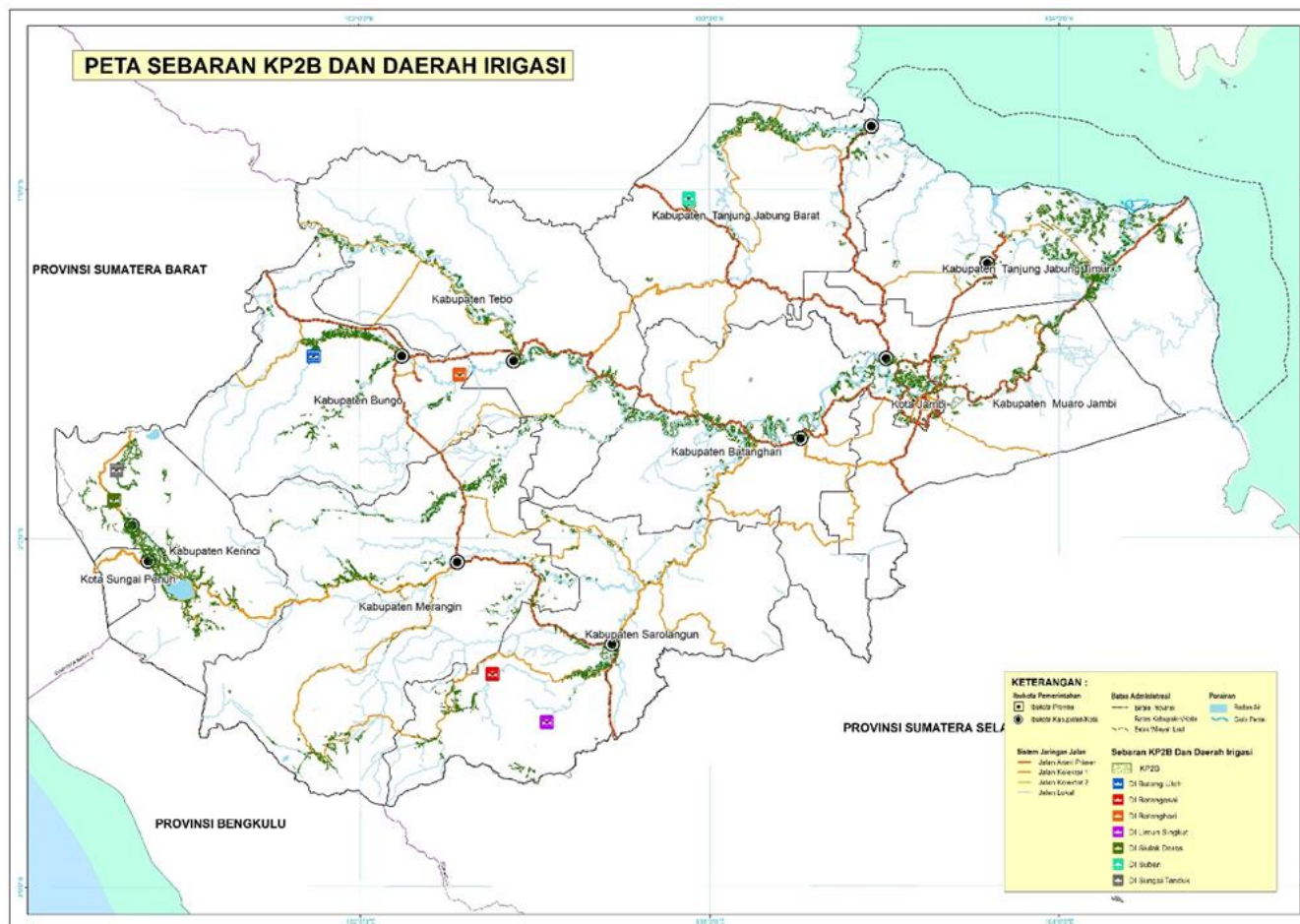


Sumber : Keputusan Gubernur Jambi Nomor 216/KEP.GUB/DPUPR/2018





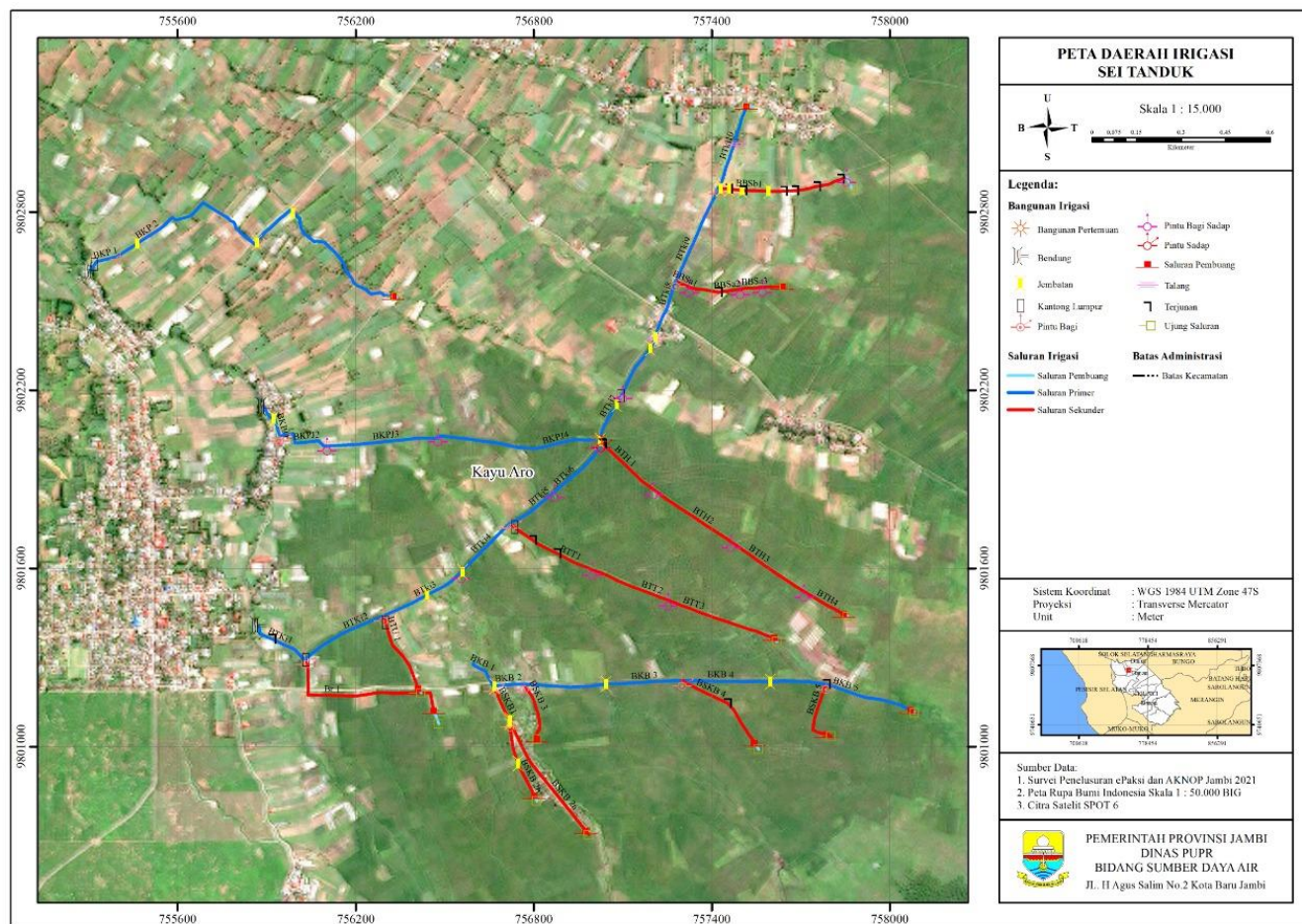
Lampiran 17. Peta Sebaran KP2B dan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jambi



Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015  
Tahun 2015



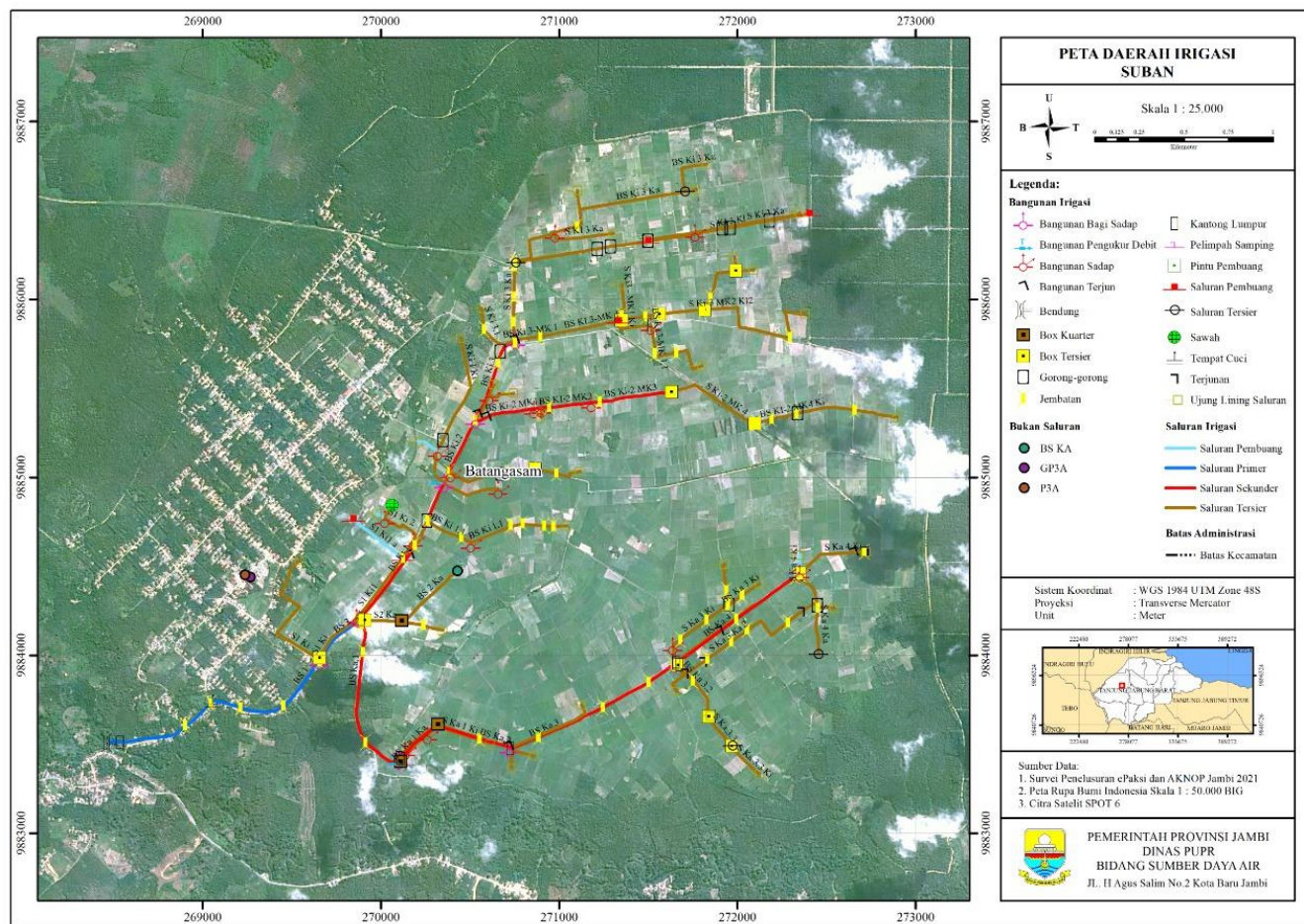
Lampiran 18. Peta Daerah Irigasi Sei. Tanduk



Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015

Tahun 2015

Lampiran 19. Peta Daerah Irigasi Suban

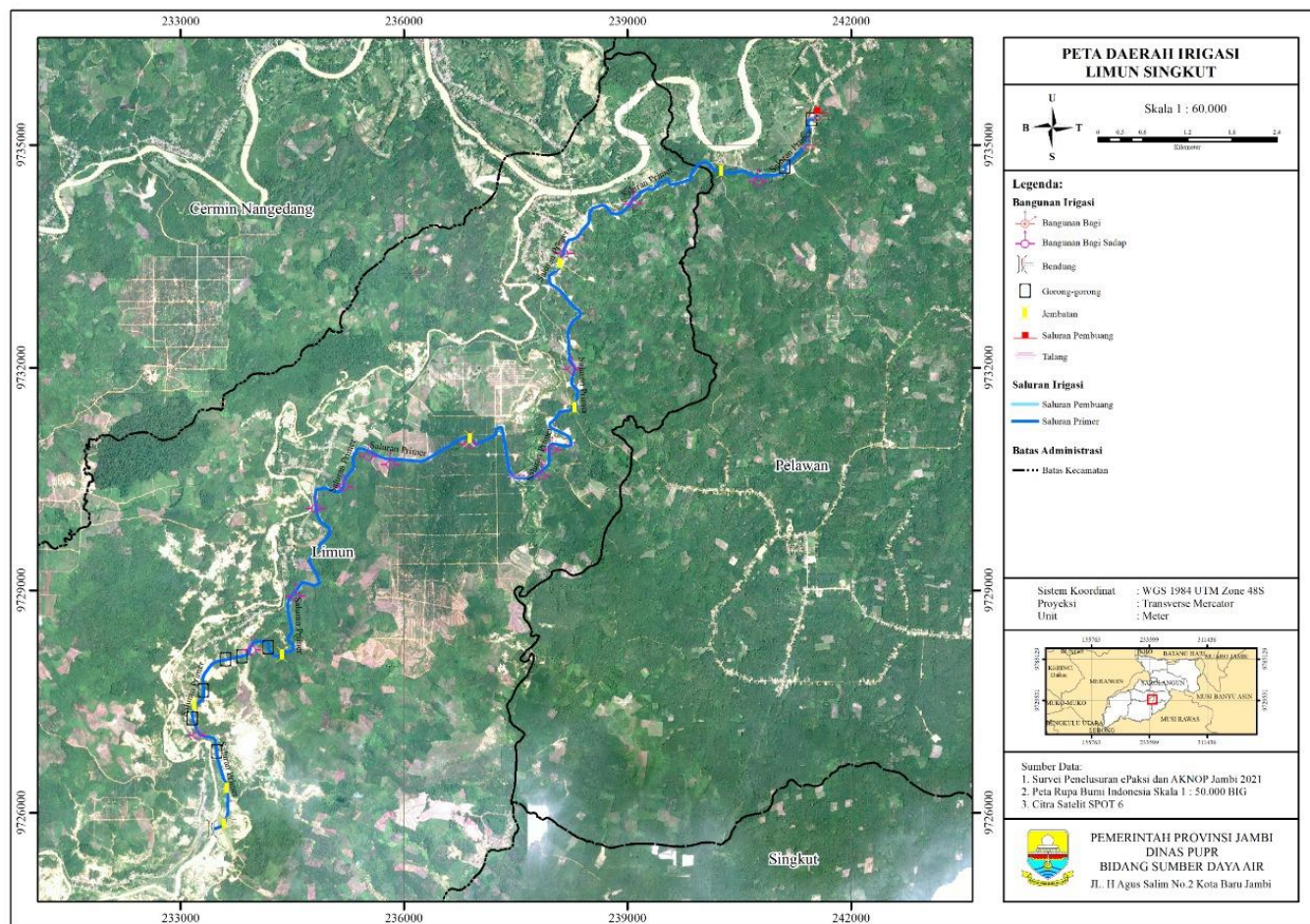


Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015

Tahun 2015



Lampiran 20. Peta Daerah Irigasi Limun Singkut

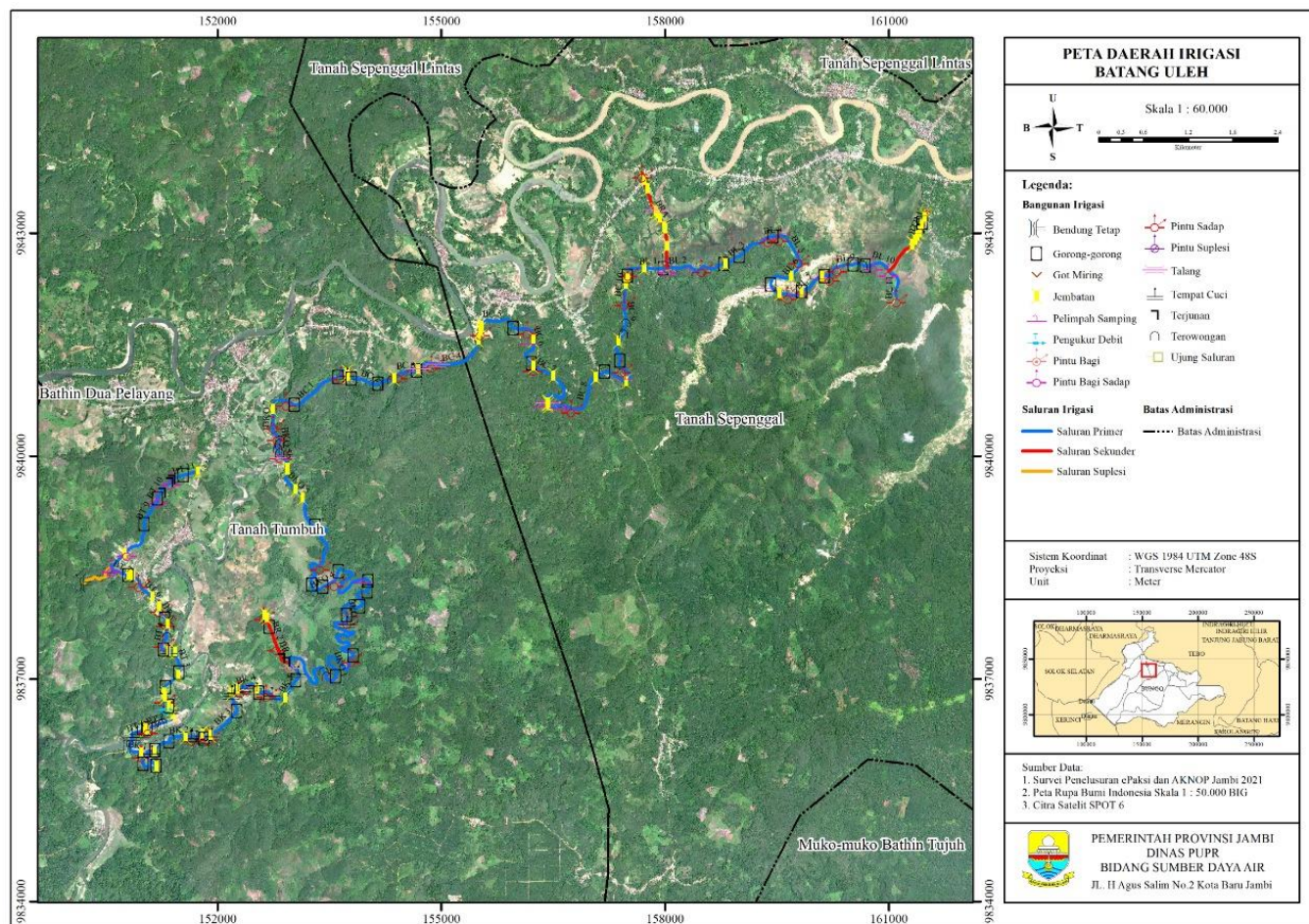


Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015

Tahun 2015



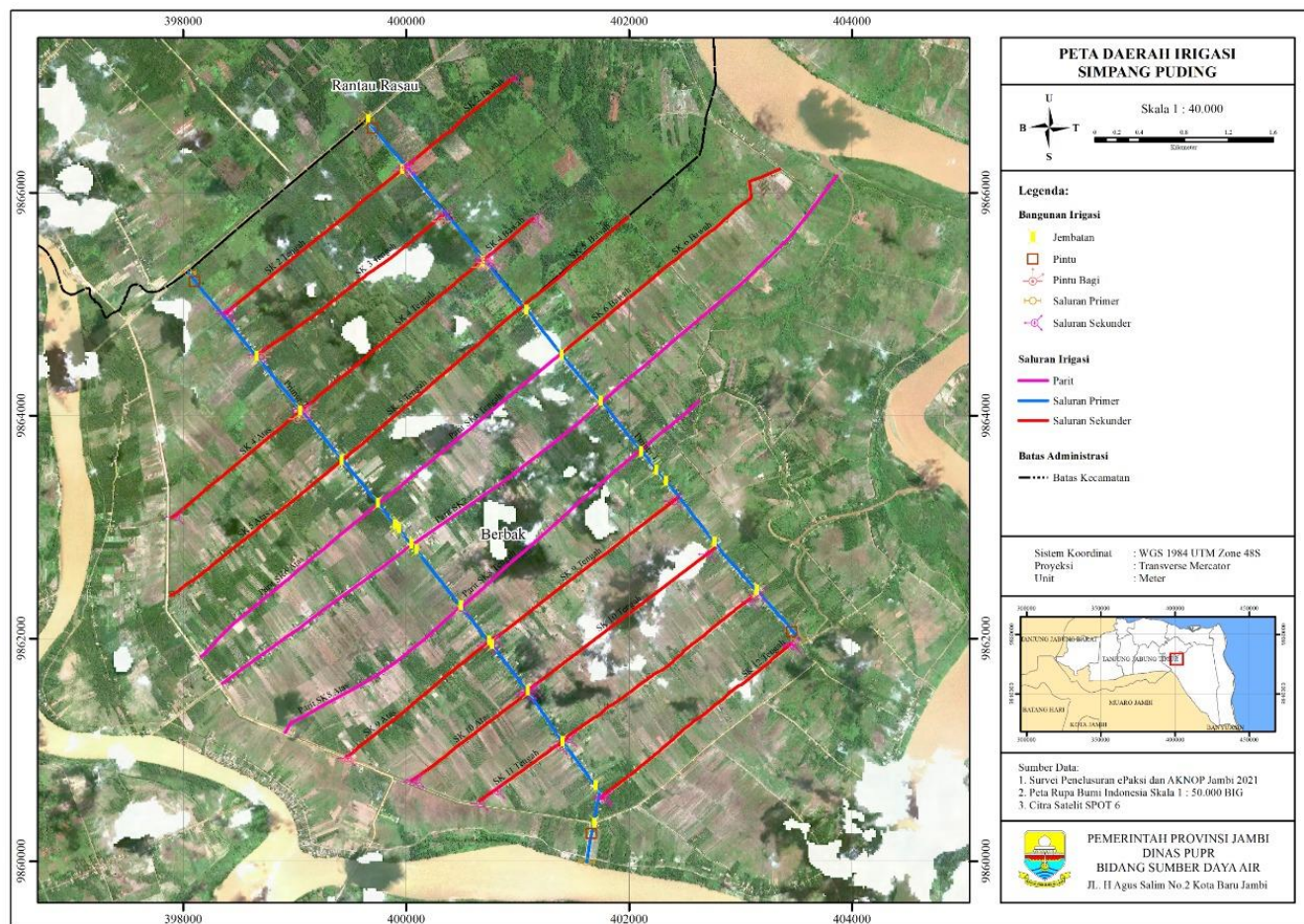
Lampiran 21. Peta Daerah Irigasi Batang Uleh



Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015

Tahun 2015

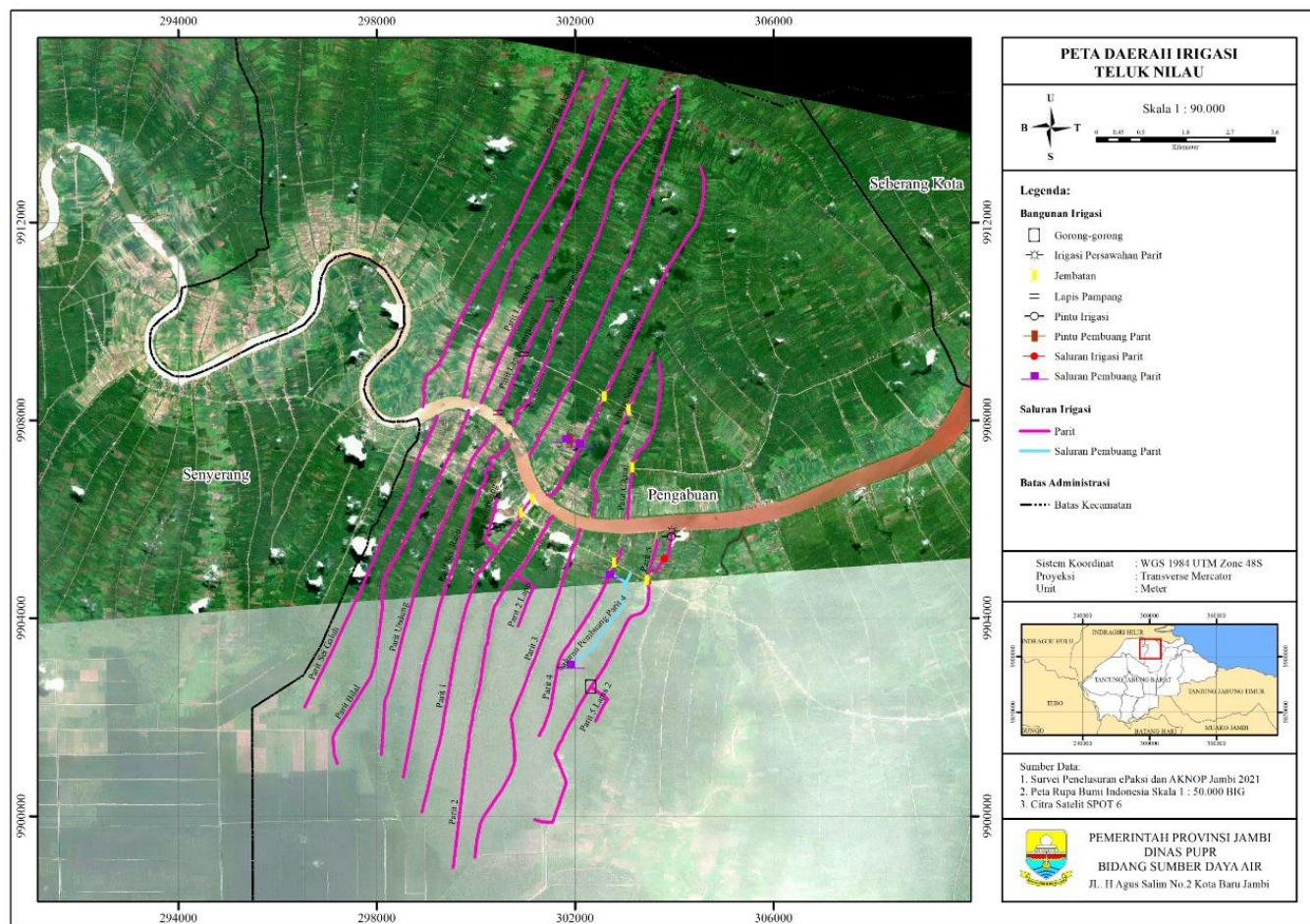
Lampiran 22. Peta Daerah Irigasi Rawa Simpang Puding



Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015  
Tahun 2015



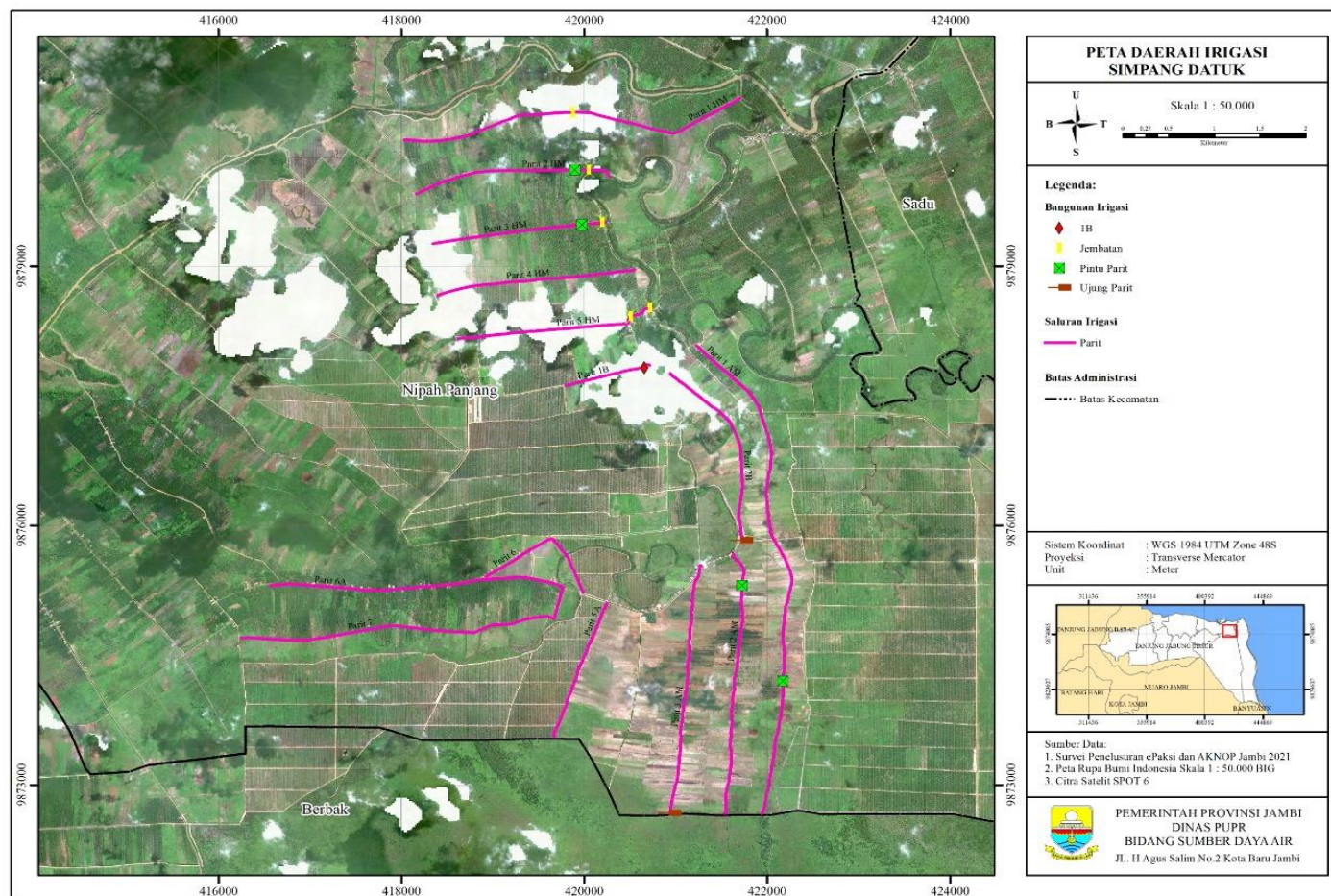
Lampiran 23. Peta Daerah Irigasi Rawa Teluk Nilau



Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015

Tahun 2015

Lampiran 24. Peta Daerah Irigasi Rawa Simpang Datuk



Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015

Tahun 2015



Lampiran 25. Dokumentasi Sarana, Prasarana dan Peralatan Pada UPTD Workshop dan Peralatan



Sumber : Dokumentasi UPTD Workshop dan Peralatan (WDP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021



## Jenis-jenis Alat Berat



Sumber : : Dokumentasi UPTD Workshop dan Peralatan (WDP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Tahun 2021

## Jenis-jenis Peralatan



Sumber : : Dokumentasi UPTD Workshop dan Peralatan (WDP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Tahun 2021



***TRONTON***



***DUMP TRUCK***



***MITSUBISHI STRADA SINGLE CABIN***

Sumber : : Dokumentasi UPTD Workshop dan Peralatan (WDP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Tahun 2021

